MODUL

PELATIHAN PENGGERAK PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

PUSDIKLAT
TENAGA ADMINISTRASI
2024

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam, kita panjatkan puji ke hadirat Allah SWT, Sang Pemilik Segala Hikmah. Berkat rahmat dan tuntunan-Nya, Pusdiklat Tenaga Administrasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dengan bangga mempersembahkan Modul Pelatihan Teknis Administrasi ini. Karya ini tak akan terwujud tanpa semangat dan sumbangsih dari berbagai pihak. Untuk itu, kami mengungkapkan rasa terima kasih setulusnya kepada Para Pelaksana, dan terutama para Penyusun yang telah mencurahkan dedikasinya.

Semoga modul ini menjadi jejak berharga dalam perjalanan meningkatkan kualitas pelatihan di lingkungan Kementerian Agama. Setiap bab dan paragraf di dalamnya dirancang sebagai cerminan dari Kurikulum dan Silabus (Kursil) yang telah disusun dengan teliti, menyingkap standar kompetensi, indikator keberhasilan, hingga rincian materi yang memperkaya wawasan para peserta pelatihan.

Harapan kami, modul ini tidak hanya menjadi panduan, tetapi juga pendorong bagi peserta untuk menyelami pembelajaran dengan antusiasme, serta mempermudah tugas para fasilitator dalam menyampaikan ilmunya. Semoga setiap halaman yang terurai ini menjadi langkah menuju pencapaian pembelajaran yang lebih bermakna dan tujuan yang diharapkan.

Jakarta, 20 September 2024
Kepala Pusdiklat Tenaga
Administrasi

Dr. Syafi'i, M.Ag

Susunan Redaksi

Judul: *Modul Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama RI*

Penggung Jawab:
…..

Penyusun:
Alissa Wahid
Ahmad Zainul Hamdi
Marzuki Wahid
Alamsyah M Dja'far
Nurmey Nurulhaq

Penyusun Ulang dan Editor:
Alamsyah M Djafar

Kontributor
Penyelia Aksara:

Halaman :
Tahun : 2024

Pusdiklat Tenaga Adminstrasi
Jalan Ir. Haji Juanda No. 37, Cemp. Putih, Ciputat Timur
Tangerang Selatan, Banten 15411
pusdikadm@kemenag.go.id
+62 (21)744-1611

DAFTAR ISI

PENGGERAK PENGUATAN MODERASI BERAGAMA i
KATA PENGANTAR ii
SUSUNAN REDAKSI iii
DAFTAR ISI iv

PENDAHULUAN 1
SESI II PERKENALAN DAN MEMBANGUN KOMITMEN PEMBELAJARAN (*BUILDING LEARNING COMMITMENT*) 31
SESI III UDAR ASUMSI MEMBANGUN PERSPEKTIF 37
SESI IV SKETSA KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA 52
SESI V ANALISIS SOSIAL DENGAN *SCENARIO THINKING* 84
SESI VI ANALISIS SOSIAL DENGAN PERANGKAT ANALISIS GUNUNG ES 90
SESI VII NILAI-NILAI UNIVERSAL DALAM AGAMA 105
SESI VIII KONSEP MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF TEOLOGI 124
SESI IX KONSEP MODERASI BERAGAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 129
SESI X ESENSI DAN NILAI MODERASI BERAGAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 140
SESI XI WAWASAN KEBANGSAAN 148
SESI XII KAPASITAS DAN CITRA DIRI PENGGERAK MODERASI BERAGAMA 163
SESI XIII EKOSISTEM MODERASI BERAGAMA 169
SESI XIV STRATEGI PENGUATAN MODERASI BERAGAMA: PROSES U 175
SESI XV MEMBANGUN GERAKAN: KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN 182
SESI XVI MEMBANGUN GERAKAN : BINA DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK **188**
SESI XVII REFLEKSI, EVALUASI, DAN RENCANA AKSI 199
MODUL TAMBAHAN 205

BAB XV MEMBANGUN GERAKAN : TIM DAN JARINGAN 205
REFERENSI.....215
LAMPIRAN.....218
LAMPIRAN 1 | LEMBAR EVALUASI PELATIHAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA.....218
LAMPIRAN 2 | LEMBAR UJI PRA DAN PASCAPELATIHAN (*PRE AND POST-TEST*) PENGUATAN MODERASI BERAGAMA 219

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan tingkat kebinekaan yang tinggi. Kebinekaan ini menjadi identitas penting keindonesiaan. Mengingkari kebinekaan bangsa Indonesia berarti mengingkari Indonesia itu sendiri. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah suku dan sub suku di Indonesia mencapai 1.331 suku. Pada 2013, jumlah ini diklasifikasi oleh BPS bekerja sama dengan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) menjadi 633 kelompok suku besar. Adapun terkait jumlah bahasa, Badan Bahasa pada 2017 memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah di Indonesia, tidak termasuk dialek dan sub-dialeknya.[1]

Sejak awal, para pendiri bangsa menyadari kebinekaan ini. Dengan kesadaran kebinekaan yang tinggi, Pancasila akhirnya disepakati sebagai ideologi berbangsa dan bernegara yang mengikat seluruh komponen bangsa yang beragam. Semangat persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan tertuang dalam slogan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Realitas kebinekaan bangsa Indonesia menjadi kebanggaan bersama dan diyakini sebagai salah satu modal penting dalam pembangunan nasional. Sekalipun demikian, kebinekaan itu juga menyimpan potensi yang –jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi destruktif dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan menghambat tujuan pembangunan nasional.

Kerukunan dan toleransi kehidupan antarumat beragama di Indonesia selama ini menjadi perhatian banyak kalangan dan membuat mereka mengakui Indonesia sebagai negara yang berhasil

[1] Lukman Hakim Saifuddin, “Prolog,” *Moderasi Beragama*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), 2-3.

mempertahankan kemajemukan dan menghindarkan dari konflik sosial keagamaan.[2]

Sayangnya, dewasa ini kita sedang menghadapi situasi kehidupan sosial-keagamaan yang memiliki daya destruksi terhadap kebinekaan bangsa. Setidaknya, ada tiga tantangan kehidupan keagamaan yang dihadapi saat ini. **Tantangan pertama** berkaitan dengan menguatnya pandangan, sikap, dan perilaku keagamaan eksklusif yang bersemangat menolak perbedaan dan menyingkirkan kelompok lain. Cara beragama ini tidak hanya mempertanyakan keabsahan Indonesia sebagai rumah bersama bagi kelompok-kelompok yang berbeda, tetapi juga berusaha membangun ulang Indonesia menjadi sebuah negara eksklusif yang hanya dimiliki kelompok tertentu.

Pada 2012, CSIS melakukan survei nasional. Dari 1.200 total responden, ditemukan bahwa 33,4% tidak mau bertetangga dengan orang yang berlainan agama; 25% tidak percaya kepada umat agama lain, dan 68% menentang pembangunan tempat ibadah agama lain di lingkungannya.[3] Data-data di atas menunjukkan betapa kuatnya sikap keberagamaan eksklusif, sebuah sikap keberagamaan yang dibangun di

---

[2] Nurcholish Madjid, "Islamic Roots of Modern Pluralism: Indonesian Experience," *Studia Islamika*, Vol. 1, No. 1 (1994); Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in ZIndonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2001); Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016); K.A. Steenbrink, "The Pancasila ideology and an Indonesian Muslim theology of religions," *The Muslim World*, Vol. 85, No. 3-4 (1998); D.E. Ramage, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the ideology of tolerance* (London; New York: Routledge, 2002); B.F. Intan, *Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis* (New York: Peter Lang, 2006); Irwan Abdullah, "Politik Bhinneka Tunggal Ika dalam keragaman budaya Indonesia," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 5, No. 2 (2003): 1-13; Parsudi Suparlan, "Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman sukubangsa atau kebudayaan?," *Antropologi Indonesia*, Vol. 72 (2003); Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Wahid Institute, 2009); Farid Masdar Mas'udi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam* (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2010).

[3]Kompas, "Toleransi Jadi Tantangan," Kompas.com, 2012, https://nasional.kompas.com/read/2012/06/06/03234293/toleransi.jadi.tantangan?page=all.

atas hilangnya kepercayaan kepada kelompok lain, yang jika dibiarkan akan berujung pada tindakan penyingkiran kepada kelompok lain yang berbeda.

Tantangan kedua berkaitan dengan tingginya angka kekerasan bermotif agama. Pandangan, sikap, dan cara beragama yang eksklusif pada akhirnya melahirkan berbagai praktik intoleransi dan kekerasan keagamaan yang menghancurkan dan mematikan.[4] Setidaknya, sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998, berbagai konflik sosial keagamaan muncul di berbagai wilayah seperti yang terjadi di Poso dan Ambon

Pada 2002, meledak bom Bali yang menewaskan 202 orang.[5] Peristiwa ini disusul dengan pengeboman Hotel J.W. Marriot Jakarta, dengan korban 11 orang meninggal dan 152 mengalami luka serius (2003).[6] Pada 2004, 5 orang meninggal dan ratusan lainnya mengalami luka berat karena ledakan bom di Kedutaan Besar Australia Jakarta.[7] Setahun kemudian, bom terbesar kedua meluluh-lantakkan Kuta Bali dan menewaskan 22 orang dan melukai lebih dari 100 orang.[8] Pada 2009, sepasang bom diledakkan di Hotel J.W. Marriot dan Ritz Carlton Jakarta, dengan korban 7 orang meninggal dan 50 lainnya luka-luka.[9]

---

[4] Rizal Sukma, "Ethnic Conflict in Indonesia: Causes and the Quest for Solution", dalam Kusuma Snitwongse dan W. Scott Thompson (eds.), *Ethnic Conflict in Souteast Asia* (Singapura: ISEAS, 2005), 1.

[5] K. Ramakrishna, dan S.S. Tan, *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia* (Singapore: World Scientific and Institute of Defence and Strategic Studies, 2003); B. Singh, "The challenge of militant Islam and terrorism in Indonesia," *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 58, No. 1 (2004): 47-68; J. Magouirk, S. Atran, dan M. Sageman, "Connecting terrorist networks," *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 31, No. 1 (2008): 1-16; B. West, "Collective memory and crisis: the 2002 Bali bombing, national heroic archetypes and the counter-narrative of cosmopolitan nationalism," *Journal of Sociology*, Vol. 44, No. 4 (2008): 337-353; F. Galamas, "Terrorism in Indonesia: an overview," *Research Papers*, Vol. 4 (2015): 215; A.S. Zora, "Terrorism in Indonesia: A review on rehabilitation and deradicalization," *Journal of Terrorism Research*, Vol. 6, No. 2 (2015): 36-56.

[6] G.S. Oak, "Jemaah Islamiyah's fifth phase: the many faces of a terrorist group," *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 33, No. 11 (2010): 989-1018.

[7] M. Subhan, "Pergeseran orientasi gerakan terorisme Islam di Indonesia (Studi terorisme tahun 2000-2015)," *Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 4 (2016): 59-67.

[8] M. Subhan, "Pergeseran orientasi gerakan terorisme Islam di Indonesia (Studi terorisme tahun 2000-2015)."

[9] Rizal Sukma, J. Ma'ruf, dan K. Abdullah, "The attitude of Indonesian Muslims towards terrorism: an important factor in counter-terrorism?," *Journal of Human Security*,

Peristiwa kekerasan atas nama agama kembali terjadi. Pada 14 Januari 2016, salah satu jaringan ISIS di Indonesia melakukan serangan dengan senjata api dan meledakkan bom di Jalan Thamrin Jakarta dan mengakibatkan hilangnya nyawa 8 orang.[10] Pada 2018, terjadi pengeboman di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jemaat Sawahan, Rusunawa Wonocolo Sidoarjo, dan Markas Polrestabes Surabaya di tahun 2018.[11]

Pada akhirnya, di depan ideologi keagamaan yang tertutup, dipenuhi kebencian dan kekerasan ini, Indonesia dipertaruhkan. Inilah **tantangan ketiga**, yaitu berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Atas nama agama, Pancasila mulai digugat dan dipertanyakan. Indonesia dianggap sebagai berhala. Hormat bendera merah putih diyakini mencederai iman. Di sinilah, kita menemukan ideologi khilafah dijajakan sebagai alternatif pengganti NKRI.

Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada Oktober 2010 hingga Januari 2011, melakukan survei kepada siswa dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) se-Jabodetabek. Hasilnya: 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan; 84,8% siswa dan 76,2% guru setuju dengan penerapan Syariat Islam; 52,3% siswa dan 14,2% membenarkan serangan bom.[12]

Vol. 7, No. 1 (2001): 21; M. Subhan, "Pergeseran orientasi gerakan terorisme Islam di Indonesia (Studi terorisme tahun 2000-2015)."

[10] A. Fenton dan D. Price, "ISIS, jihad and Indonesian law: Legal impacts of the January 2016 Jakarta terrorist attacks," *Issues in Legal Scholarship*, Vol. 14, No. 1 (2016): 1-26; Y.P. Suratman, "The effectiveness of de-radicalization program in Southeast Asia: does it work? The case of Indonesia, Malaysia, and Singapore," *Journal of Asian Studies*, Vol. 5, No. 2 (2017): 135-156; H.F. Sundoko, R. Akbar, D. Zulkaidi, dan T.A. Argo, "Toward a Defensive Global City: Urban (In) security in an Age of Terror—The Case of Jakarta, Indonesia," in *Metropolitan Governance in Asia and the Pacific Rim* (Singapore: Springer, 2018), h. 33-56; Gary van Klinken, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars* (London; New York: Routledge, 2007).

[11] I.A. Irawan, "Pergeseran orientasi terorisme di Indonesia 2000-21018," kumparan.com 17 Mei 2018, https://kumparan.com/erucakra-garuda-nusantara/pergeseran-orientasi-terorisme-di-indonesia-2000-2018 (Diakses 7 Juni 2019).

[12] BBC, "Survei: hampir 50% pelajar setuju tindakan radikal," www.bbc.com, 2011, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/04/110426_surveiradikalisme.

Pada 2016, Jaringan GUSDURian melakukan pemetaan sosial media dan internet, di mana hasilnya adalah narasi keislaman dan keindonesiaan didominasi oleh pandangan keagamaan yang menganggap bahwa demokrasi dan Indonesia dianggap sebagai musuh bagi Islam.[13] Karena demokrasi dan Indonesia dianggap sebagai musuh Islam, maka ideologi yang harus dipeluk umat Islam adalah ideologi khilafah.

Di tahun yang sama, Wahid Foundation melakukan survei kepada para siswa SLTA aktivis Unit Kerohanian Islam (Rohis), di mana 37 % sangat setuju dan 41 % setuju Indonesia menjadi khilafah Islam.[14]

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Convey Indonesia pPada tahun 2018, melakukan survei tentang intoleransi dan terorisme di kalangan guru, siswa, dosen, dan mahasiswa. Penelitian tersebut melibatkan 1.859 siswa dan mahasiswa, serta 322 guru dan dosen di 34 provinsi dan 68 kota di Indonesia.[15] Penelitian tersebut menunjukkan, 86% siswa dan mahasiswa, dan 87.89% guru dan dosen yang menjadi responden setuju pemerintah melarang keberadaan kelompok-kelompok keagamaan minoritas yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam.[16] Dari seluruh responden, 91.23% di antaranya setuju bahwa syariat Islam harus diterapkan pada level negara, 37.71% setuju bahwa jihad bermakna "*qitâl*" atau mengangkat senjata berperang melawan non-muslim, 37.71% setuju bahwa bom bunuh diri adalah bagian dari ajaran jihad dalam Islam, dan 61.92% memahami bahwa sistem kekhalifahan merupakan sistem pemerintahan Islam.[17]

Inilah sebagian dari wajah kehidupan keagamaan di Indonesia saat ini. Pemahaman, sikap, dan cara beragama yang eksklusif, intoleran,

---

[13] Infid dan Gusdurian, "Laporan Mapping Internet dan Sosial Media" (Jakarta, 2016).

[14] Berita Satu, "Survei Wahid Foundation: 86% Aktivis Rohis Ingin Berjihad ke Suriah,"www.beritasatu.com,2017,https://www.beritasatu.com/megapolitan/414934/survei-wahid-foundation-86-aktivis-rohis-ingin-berjihad-ke-suriah.

[15] PPIM UIN Jakarta dan Convey, *Api dalam Sekam: Keberagamaan Muslim Gen-Z, Survei nasional tentang Keberagamaan di Sekolah dan Universitas di Indonesia* (Jakarta: PPIM UIN Jakarta and Convey Indonesia, 2018).

[16] PPIM UIN Jakarta dan Convey, *Api dalam Sekam: Keberagamaan Muslim Gen-Z*.

[17]PPIM UIN Jakarta dan Convey, *Api dalam Sekam: Keberagamaan Muslim Gen-Z*.

memuja kekerasan, dan menolak NKRI terus menerus dipasarkan. Cara beragama seperti ini akan menghancurkan sendi-sendi kebangsaan yang selama ini dibangun melalui tata kehidupan yang saling merangkul, menghargai, dan mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan berbagai masalah bersama. Karena itulah, perlu dibangun pemahaman keagamaan yang lebih moderat dengan mengedepankan sikap inklusif, dialogis, humanis, toleran, adil, dan damai.

Moderasi Beragama diyakini sebagai salah satu modal sosial penting dalam menunjang pembangunan nasional berkelanjutan. Moderasi Beragama telah ditetapkan secara sah sebagai faktor penunjang pembangunan nasional dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kementerian Agama diberi mandat sebagai institusi utama (*leading sector)* dalam membangun kehidupan keagamaan moderat bangsa Indonesia.

Pada 2023, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama. Aturan ini memandatkan lebih dari 40 Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menjalankan Penguatan Moderasi Beragama sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pada Pasal 3 ditegaskan, Penguatan Moderasi Beragama dilaksanakan untuk: (1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama; (2) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; (3) penyelarasan relasi cara beragama dan berbudaya; (4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan (5) pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, pelatihan penguatan moderasi beragama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama RI menjadi sangat signifikan dilakukan. Secara khusus Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama ini diselenggarakan

dengan tujuan membentuk kader Moderasi Beragama yang mampu mendiseminasikan Moderasi Beragama kepada pegawai di lingkungan tempat kerjanya dan warga di lingkungan tempat tinggalnya. Pelatihan ini ditujukan pula untuk memastikan ASN memiliki pemahaman dan praktik beragama yang moderat. Modul ini disusun untuk memandu secara konseptual dan operasional pelaksanaan Pelatihan Moderasi Beragama bagi ASN di lingkungan Kementerian Agama RI tersebut.

B. Tujuan Penyusunan Modul

Penyusunan modul ini bertujuan untuk:

1. memandu fasilitator dalam:
   a. mengelola forum Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama bagi ASN Kementerian Agama RI agar terstandarisasi secara nasional.
   b. menemukan langkah dan metode yang tepat dan efektif dalam menyampaikan materi-materi pelatihan secara praktis dan mudah.
   c. mendapatkan informasi-informasi pokok seputar pengetahuan dan kemampuan dasar yang harus dimiliki peserta beserta langkah-langkahnya.
2. memandu narasumber dalam menyampaikan materi atau mengelola forum yang sesuai dengan tujuan sesi.
3. memandu panitia dalam menyiapkan perlengkapan, peralatan, dan administrasi pelatihan.
4. menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi kalangan umum yang memiliki perhatian pada isu toleransi, perdamaian, dan Moderasi Beragama.

C. Komposisi Modul

Modul ini disusun sebagai panduan bagi fasilitator dalam memandu proses pelatihan dalam pembelajaran yang holistik dan terhubung antara

satu bahasan dengan bahasan berikutnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pelatihan. Pada modul ini, terdapat lima belas bab. Selain bab pendahuluan, bab-bab selanjutnya di dalam modul ini merupakan sesi-sesi penting dalam proses pelatihan. Di dalam setiap sesi terdapat elemen-elemen pokok berikut:

1. **Sesi**, yakni kumpulan materi yang diikat dalam sebuah topik tertentu.
2. **Pengantar**, yakni penjelasan ringkas materi dan hubungannya dengan materi sebelum dan sesudahnya.
3. **Tujuan**, yaitu kompetensi yang harus dicapai pada akhir sesi.
4. **Pokok Bahasan**, berisi kisi-kisi materi yang harus disampaikan kepada peserta.
5. **Waktu**, yakni alokasi waktu yang disediakan untuk sesi tersebut.
6. **Peralatan dan Bahan**, yakni alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses fasilitasi forum.
7. **Langkah-langkah Fasilitasi**, adalah tahapan praktis menjalankan sesi pelatihan secara runut.
8. **Catatan,** informasi berisi informasi penting yang ditujukan bagi fasilitator atau panitia terkait materi, tahapan, dan informasi teknis kepelatihan.
9. **Tips,** informasi praktis yang dapat dilakukan fasilitator.
10. **Lampiran Materi**, yakni bahan bacaan untuk menambah dan memperkaya pengetahuan.

Penyesuaian dan improvisasi dalam penggunaan modul ini dapat terjadi pada pemilihan materi-materi dan teknik fasilitasi sesuai dengan karakteristik peserta pelatihan yang spesifik. Namun, isi modul ini harus menjadi acuan utama dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi pelatihan Penguatan Moderasi Beragama di lingkungan Kementerian Agama RI.

Catatan: *Fasilitator juga memiliki keleluasaan untuk berkreasi menyajikan permainan, memilih metode, dan media sejauh masih sejalan dengan tujuan umum program dan target setiap materinya, dengan tetap mengedepankan pendekatan pendidikan orang dewasa.*

D. Fasilitator

Fasilitator merupakan pihak yang memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam menjalankan dan mengelola forum pada setiap sesi. Mereka bertanggung jawab pada keberhasilan tujuan sesi dan pelatihan secara umum. Fasilitator pelatihan ini harus memenuhi syarat, yaitu merupakan alumni Pelatihan Fasilitator Nasional dan/ atau Pelatihan Para Pelatih (*Training of Trainer*) PMB yang telah memiliki sertifikat dari Pusdiklat Kemenag, dipandang layak, dan memiliki kapasitas sebagai fasilitator.

Pelaksanaan dan pengelolaan forum dijalankan fasilitator dengan membentuk tim fasilitator yang terdiri dari dua atau lebih fasilitator. Tim fasilitator bertugas untuk:

1. Memastikan proses pelatihan berjalan sesuai dengan kurikulum pelatihan.
2. Memastikan substansi bahasan setiap materi tersampaikan secara lengkap dan tepat.
3. Memfasilitasi forum secara profesional sehingga seluruh peserta berproses secara aktif.
4. Membuat catatan terhadap dinamika forum dan penilaian terhadap peserta selama pelatihan. Penilaian tersebut menjadi salah satu acuan dalam penetapan kelulusan peserta. Format penilaian terlampir.

E. Narasumber

Pelatihan dapat menghadirkan narasumber untuk menyampaikan materi berikut:

1. Sketsa Kehidupan Keberagamaan di Indonesia;

2. Nilai-Nilai Universal Agama;
3. Nilai Moderasi Dalam Perspektif Teologis Agama;
4. Konsep MB Kementerian;
5. Membangun Gerakan dengan Kepeloporan; dan
6. Resolusi Konflik.

Narasumber yang menyampaikan materi diatas diklasifikasi dalam dua jenis, yaitu narasumber pakar dan narasumber fasilitator, dengan kriteria berikut:

Narasumber pakar [istilah disesuaikan dengan kebijakan Kemenkeu]

1. Warga negara yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu untuk memberikan dan menyampaikan materi dalam pembelajaran PMB;
2. Dapat menyampaikan materi lewat media dalam jaringan; dan
3. Pernah terlibat dalam satu atau lebih pelatihan PMB
4. mendapat rekomendasi dan/atau persetujuan dari Pokja.

Narsumber Fasilitator [istilah disesuaikan dengan kebijakan Kemenkeu]

1. Alumni Pelatihan Instruktur Nasional dan/ atau Pelatihan Para Pelatih (Training of Trainer) PMB yang telah memiliki sertifikat dan dipandang layak serta memiliki kapasitas sebagai fasilitator;
2. merupakan satu kesatuan tim yang bertangunggjawab penuh dalam memfasilitasi kegiatan PMB; dan
3. disusun dan ditetapkan oleh Pokja.

F. Tujuan Pelatihan

Tujuan Umum

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu menginisasi gerakan Penguatan Moderasi Bergama bagi pegawai di lingkungan tempat kerja dan warga di lingkungan tempat tinggalnya.

Tujuan Khusus :

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu:

1. Menjelaskan dasar dan tujuan Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pelopor
2. Mengingat minimal lima nama peserta, fasilitator, atau panitia dan menjelaskan Kembali hasil kesepakatan apa yang harus dilakukan tidak dilakukan selama pelatihan
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kekeliruan asumsi dalam kehidupan beragama.
4. Mengenali fenomena umum intoleransi dan ekstresmisme keagamaan dan tiga tantangan dasar Moderasi Beragama.
5. Mempraktikkan analisis sosial tentang masa depan Indonesia dengan *scenario thinking*.
6. Mempraktikkan analisis Gunung Es terhadap fenomena intoleransi di Indonesia (fenomena, pola dan tren, sistem-struktur, dan cara paradigma/cara pandang/model mental).
7. Mengidentifikasi nilai dan ajaran universal agama-agama di Indonesia.
8. Mengidentifikasi nilai dan ajaran agama-agama yang sejalan dengan indikator Moderasi Beragama.
9. Menjelaskan konsep Penguatan Moderasi Beragama Pemerintah Indonesia (konsep, indicator, peta jalan, dan posisi MB dalam RPJMN)
10. Menganalisis pentingnya kedudukan Kementerian Agama RI sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang agama dan peran mempekuat persatuan dan kesatuan bangsa.
11. Mengenali kapasitas dan citra diri penggerak Moderasi Beragama dan memformulasikan peran dalam Penguatan Moderasi Beragama
12. Mempraktikkan analisis aktor sosial politik dalam isu intoleransi dengan *Social Presencing Theatre.*

13. Menyusun rencana aksi Penguatan Moderasi Beragama di lingkungan kerja dan masyarakat dengan Teori Proses U.
14. Menunjukkan kecakapan dalam mengimplementasikan nilai-nilai kepemimpinan dan Kepoloporan untuk Penguatan Moderasi Beragama
15. Menunjukkan kecakapan dalam menjalankan bina damai dan resolusi konflik untuk Penguatan Moderasi Beragama;
16. Mengevaluasi pelaksanaan pelatihan dan menyusun menyusun rencana aksi individu untuk Penguatan Moderasi Beragama

G. Pelatihan yang Dikembangkan dalam Modul

1. Desain Pelatihan

Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama bagi ASN Kementerian Agama RI ini didesain dengan pendekatan "U Proses". Pelatihan ini berangkat dari realitas kehidupan keagamaan di Indonesia yang muncul di permukaan saat ini. Dari sini, peserta diajak menyelam untuk menemukan pola, tren, struktur, dan cara pandang atau *mental model* yang melahirkan realitas tersebut.

Peserta kemudian diajak merekonstruksi realitas kehidupan keagamaan ideal (beragama secara moderat) melalui proses memikirkan dan menata ulang cara pandang yang melahirkan tindakan keagamaan di permukaan (*rethinking*), mendesain kembali struktur yang melahirkan realitas kehidupan keagamaan saat ini (*redesigning*), mengemasnya menjadi program yang menjawab tantangan yang dihadapi (*reframing*), dan melakukan aksi-aksi nyata yang menjawab peristiwa yang muncul di lapangan (*reacting*).

2. Peserta Pelatihan

Pelatihan Penggerak PMB ini diselenggarakan untuk:

a. Pejabat administrator;
b. Pejabat pengawas;
c. Kepala madrasah negeri/ satuan pendidikan keagamaan negeri
d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
e. Penyuluh agama PNS; dan/ atau;
f. guru pendidikan agama pns;

3. Prinsip Pembelajaran

Modul ini didesain dengan paradigma empat pilar pembelajaran (4 *pillars of* learning): *learning to know, to do, to be*, dan *to live together*. Paradigma ini mendorong proses pembelajaran untuk memfasilitasi peserta dapat mengalami keempat proses tersebut.

1) ***Learning to know* (belajar agar tahu)**

Prinsip ini memosisikan pembelajaran sebagai usaha untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan. Untuk mengimplementasikan "*learning to know*", fasilitator/trainer pelatihan menempatkan dirinya sebagai kawan berdialog bagi peserta untuk mengembangkan penguasaan pengetahuan mereka. Pilar ini berfungsi membantu peserta mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan. Dalam pelatihan ini, peserta dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang sketsa kehidupan keagamaan di Indonesia saat ini, nilai-nilai universal agama, konsep Moderasi Beragama Kemenag RI, dan ekosistem Moderasi Beragama. Proses pemahaman dilakukan dengan berbagai metode dan tidak hanya melalui metode ceramah (*lecture*).

2) *Learning to do* (belajar agar dapat melakukan)

Prinsip ini memandang pendidikan membekali manusia tidak sekadar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh untuk terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Proses

belajar menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif, peningkatan kompetensi, serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan, perasaan, serta kemauan untuk berbuat atau merespons peristiwa atau stimulus. Dalam pelatihan ini, peserta dimampukan untuk mengelola kehidupan keagamaan dalam fokus kerjanya. Berbagai instrumen seperti Analisis Gunung Es (*Iceberg Analysis*), Proses U (*U Process*), membangun tim kerja dan jaringan, bina damai dan resolusi konflik.

3) ***Learning to be*** **(belajar untuk mengembangkan diri)**

Prinsip ini memosisikan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian dari proses pengembangan diri (*learning to be*), yaitu proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Dalam prinsip ini, peserta diajak untuk berproses memahami dirinya dalam konteks keberagaman dan inklusi sosial, serta memperkuat nilai-nilai pribadi yang selaras seperti adil, respek, dan moderat. Ini dilakukan melalui metode Peta Bukanlah Wilayah, aktivitas mandiri, dan lain-lain.

4) ***Learning to live together*** **(belajar untuk hidup bersama)**

Prinsip ini meletakkan pendidikan sebagai proses yang akan melatih keterampilan untuk menjalani hidup bersama, saling menghargai, terbuka, saling memberi dan menerima. Nilai dan prinsip inilah yang akan menopang sikap toleransi antarras, etnis, dan agama dalam praktik kehidupan. Prinsip ini diterapkan melalui berbagai metode seperti *Social Presencing Theatre* (*4D Mapping*), diskusi kelompok, tugas kelompok, aktivitas mandiri, dan lain-lain.

4. Pendekatan Pembelajaran

Pelatihan ini menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi). Pendekatan ini memosisikan peserta sebagai individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman bersama. Pendekatan ini berangkat dari paradigma bahwa orang dewasa bisa belajar dengan baik, antara lain apabila:

1) dilibatkan secara aktif dalam proses belajar;
2) materi belajar terkait langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari;
3) materi bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan mereka;
4) diberi kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mereka dalam proses belajar;
5) proses belajar mempertimbangkan pengalaman dan daya pikir.

Pelatihan ini akan mengikuti daur pendidikan orang dewasa, yaitu memfasilitasi proses mengungkapkan, menganalisis, menyimpulkan, dan mengalami dengan penjabaran sebagai berikut:

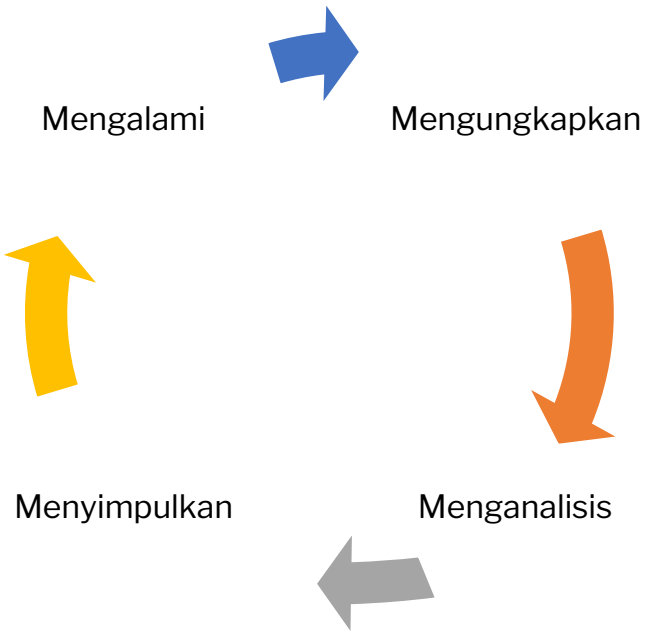

1) **Mengungkapkan,** dilakukan dengan cara mengajak peserta untuk mengungkapkan pengalaman mereka, lalu meminta tanggapan atau kesan mereka sendiri atas pengalaman tersebut.
2) **Menganalisis,** dilakukan dengan cara mendorong peserta untuk menemukan pola dengan mengkaji sebab-sebab dan kaitan-kaitan permasalahan yang ada dalam pengalaman tersebut, misalnya terkait dengan tatanan, aturan, nilai, sistem, atau hal lainnya yang menjadi akar persoalan.
3) **Menyimpulkan,** dengan cara mendorong peserta untuk menarik kesimpulan dengan cara merumuskan makna pengalaman tersebut dengan cara pandang dan pengertian baru yang lebih utuh berupa prinsip atau kesimpulan umum.
4) **Mengalami,** dengan cara mengajak peserta untuk merencanakan tindakan-tindakan baru yang lebih baik berdasarkan hasil pemahaman atau pengertian baru tersebut, sehingga sangat memungkinkan untuk menciptakan kenyataan-kenyataan baru yang lebih baik.

Peserta sebelum proses pelatihan berada dalam tahap "mengalami", kemudian selama proses belajar dilatih untuk melewati proses "mengungkapkan", "menganalisis", dan "menyimpulkan". Setelah selesai, peserta akan kembali masuk tahap "mengalami' dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh selama pelatihan, lalu terlatih pula untuk melakukan daur pendidikan orang dewasa dalam menyikapi pengalamannya dalam kehidupan sosial sehari-hari di lingkungan masing-masing.

Dengan pendekatan ini, seluruh peserta diposisikan sebagai narasumber penting dalam proses belajar bersama melalui pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Oleh karenanya, proses pelatihan bersifat partisipatoris yang melibatkan peserta sebagai subjek aktif melalui aneka kegiatan dalam bentuk curah

pendapat, diskusi kelompok, tanya-jawab, permainan, bermain peran *(role play)*, maupun bentuk lainnya.

Konsekuensi utama dari pendekatan ini adalah dibutuhkan fasilitator dengan tingkat keahlian yang tinggi, baik dalam pemahaman isu moderasi beragana maupun dalam teknik fasilitasi forum itu sendiri. Hal ini untuk menghindari perangkap khas andragogi di mana pengalaman peserta dianggap sebagai realitas akhir.

Konsekuensi lainnya adalah kebutuhan terhadap media dan perlengkapan yang lebih beragam, sekalipun bisa disesuaikan dengan keterbatasan perlengkapan yang ada. Media dan perlengkapan yang diperlukan seperti LCD, laptop, papan tulis putih, kertas *flipchart*, spidol besar, spidol kecil, lakban atau perekat lainnya, gunting, kertas metaplan, kertas HVS, dan bolpoin. Beberapa materi memerlukan media khusus sesuai dengan keperluan masing-masing seperti instrumen diskusi, latihan, dan instrumen lain yang perlu digandakan sebelum proses kelas dimulai.

5. Kurikulum Pelatihan

1. Mata Pelatihan

Kurikulum pelatihan ini terdiri dari enam kelompok **Mata Pelatihan** (berikut ini:

a. **Pembukaan dan Perkenalan** berisi sesi Pembukaan dan Arahan dan Perkenalan dan Kontrak Belajar. Setelah mengikuti sesi-sesi dalam Mata Diklat ini, peserta dapat saling mengenal, mengetahui harapan, kekhawatiran, dan kesepakatan selama pelatihan. Selain itu, peserta memahami gambaran umum konteks pelatihan ini dalam program dan visi Kementerian Agama RI.

b. **Menalar Keragaman** berisi tiga sesi utama: Udara Asumsi, Membangun Perspektif; Sketsa Kehidupan Beragama di Indonesia; dan Analisis Sosial dengan Perangkat Analisis

Gunung Es. Mata Setelah menjalani sesi-sesi pada Mata Diklat ini peserta menyadari kekeliruan berpikir dalam memahami perbedaan dan isu-isu sosial keagamaan, mengenali lebih dalam peta dan dinamika keberagaman masyarakat di Indonesia, dan memiliki kemampuan dalam menganalisis pola, struktur, dan cara pandang penyebab situasi keberagamaan saat ini.

c. **Nilai-Nilai Universal Agama dan Argumen Teologis Moderasi Beragama** berisi sesi Nilai-nilai Universal dalam Agama. Setelah mengukuti sesi pada Mata Diklat ini, peserta memahami nilai-nilai universal dan landasan teologis dalam agama terkait Moderasi Beragama. Selain itu, peserta juga dapat merumuskan dan mengenali isu-isu dan argumen-argumen teologis yang berkembang dan digunakan secara bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai moderasi beragama.

d. **Konsep Moderasi Beragama Pemerintah Republik Indonesia.** Setelah mengikuti Mata Diklat ini peserta memahami konsep Moderasi Beragama yang dirumuskan Kementerian Agama RI beserta indikator-indikatornya, memahami Peta Jalan Pengarusutamaan Moderasi Beragama dan posisinya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan menyadari makna pentingnya Moderasi Beragama, baik dalam konteks sosial, kebijakan negara, maupun kebutuhan masa depan Indonesia.

e. **Konsep Moderasi Pemerintah Republik Indonesia** berisi sesi Wawasan Kebangsaan, Sikap Diri ASN Kemenag RI, Ekosistem Moderasi Beragama. Setelah mengikuti sesi-sesi dalam Mata Diklat ini, peserta menyadari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai representasi negara yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 dan berkewajiban

melindungi dan melayani seluruh umat beragama secara adil tanpa diskriminasi. Peserta juga menyadari sikap diri ASN Kementerian Agama RI yang memperkuat gerakan Moderasi Beragama, dan memahami peran dan posisi yang harus mereka jalankan.

f. **Strategi Penguatan Moderasi Beragama** berisi sesi Strategi Penguatan Moderasi Beragama: Proses U dan Membangun Gerakan: Kepemimpinan dan Kepeloporan. Setelah mengikuti sesi-sesi dalam Mata DIklat ini, peserta memahami konsep Moderasi Beragama sebagai cara pandang baru dalam kehidupan bersama, mampu menyusun rencana aksi mewujudkan Moderasi Beragama di lingkungan Kementerian Agama dan masyarakat, dan memiliki kapasitas kepemimpinan dan kepeloporan yang sesuai untuk melakukan penguatan Moderasi Beragama di lingkungan kerja dan masyarakat.

2. Kurikulum Pelatihan

BAB	MATERI	POKOK BAHASAN	KOMPETENSI	METODE	WAKTU
MATA PELATIHAN I : PEMBUKAAN DAN PERKENALAN					
I	Pembukaan dan Arahan	● Gambaran umum kebijakan nasional Penguatan Moderasi Beragama pada Perpres 58/2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama ● Gambaran umum kebijakan Kementerian Agama tentang Penguatan Moderasi Beragama ● Gambaran umum sistem dan mekanisme pelatihan Penguatan Moderasi Beragama	● Peserta mampu menjelaskan gambaran umum kebijakan Penguatan Moderasi Beragama dalam Perpres 58/2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama; ● Peserta mampu menjelaskan gambaran umum kebijakan Kementerian Agam tentang Penguatan Moderasi Beragama; ● Peserta mampu menjelaskan gambaran umum sistem dan mekanisme pelatiahan Penguaran Moderasi Beragama.	● Presentasi ● Tanya-jawab	90 menit (2 jam pelatihan)
II	Perkenalan dan Membangun Komitmen Pembelajaran (*Building Learning Comitment*)	● Perkenalan seluruh peserta, fasilitator, dan panitia (nama, lembaga, harapan, kekhawatiran) ● Kesepakatan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan selama pelatihan	● Peserta mampu mengingat dan menyebutkan minimal lima nama peserta, fasilitator, atau panitia; ● Peserta mampu menjelaskan kembali hasil kesepakatan apa yang harus dilakukan tidak dilakukan selama pelatihan.	● *Class Check in* ● Permainan ● Tanya-jawab dengan *Menti.com*	135 menit (3 jam pelatihan)
MATA PELATIHAN II: MENALAR KERAGAMAN					
III	Udara Asumsi, Membangun Perspektif	● Kerentanan dan kewaspadaan terhadap kekeliruan asumsi dalam kehidupan beragama	● Peserta mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kekeliruan asumsi dalam kehidupan beragama.	● Tugas individu ● Presentasi ● Tanya-jawab	135 menit (3 jam pelatihan)

BAB	MATERI	POKOK BAHASAN	KOMPETENSI	METODE	WAKTU
		● Peta Bukan Teritori *(Map is Not Territory)* ● Tangga Kesimpulan *(Ladder of Inference)* ● Tiga Suara Tiga Keterbukaan *(Three Voices; Three Opennes)*	● Peserta mampu mengenali perbedaan fakta dan asumsi ● Peserta mampu menjelaskan Tangga Kesimpulan sebagai proses yang membentuk pola pikir, sikap dan perilaku. ● Peserta mampu menjelaskan ulang Tiga Suara Tiga Keterbukaan.		
IV	Sketsa Kehidupan Beragama di Indonesia	● Situasi umum kehidupan keberagamaan di Indonesia saat ini. ● Tiga tantangan dasar yang mendasari kebijakan Penguatan Moderasi Beragama ● Fenomena intoleransi dan ekstremisme keagamaan. ● Dua arus paradigma praktik keberagamaan: substantif-inklusif versus eksklusif-legal formalistis.	● Peserta mampu menjelaskan situasi umum kehidupan keberagaman masyarakat di Indonesia; ● Peserta mampu menjelaskan tiga tantangan dasar yang mendasari kebijakan Penguatan Moderasi Beragama; ● Peserta mampu mengenali fenomena umum intoleransi dan ekstresmisme keagamaan di Indonesia. ● Peserta mampu mengenali perbedaan paradigma praktik keberagamaan yang subtanstif-inklusif dengan eklusif- legal formalistis.	▪ Ceramah ▪ Tanya-jawab ▪ Curah Pendapat	90 menit (2 jam pelatihan)
V	Analisis Sosial dengan *Scenario Thinking*	● Skenario masa depan Indonesia berdasarkan situasi kehidupan keberagamaan saat ini. ● Refleksi praktik beragama inklusif dan eksklusif dalam kehidupan bangsa dan NKRI	● Peserta mampu mempraktikkan analisis sosial tentang masa depan Indonesia dengan *scenario thinking*. ● Peserta mampu menilai praktik-praktik beragama yang inklusif dan eksklusif dalam kehidupan bangsa dan NKRI;	● Curah pendapat ● Diskusi kelompok dengan *Scenario Thinking*	90 menit (2 jam pelatihan)

BAB	MATERI	POKOK BAHASAN	KOMPETENSI	METODE	WAKTU
		● Pentingnya Moderasi Beragama dalam membangun Indonesia masa depan.	● Peserta mampu menjelaskan pentingnya Moderasi Beragama dalam membangun Indonesia masa depan.		
VI	Analisis Sosial dengan Perangkat Analisis Gunung Es	● Analisis sosial terhadap praktik beragama intoleran di Indonesia ● Perangkat Analisis Gunung Es (*Iceberg Analysis*) ● Analisis sosial atas kompleksitas intoleransi di Indonesia (fenomena, pola dan tren, sistem-struktur dan paradigma/cara pandang (mental model) aktor)	● Peserta mampu menganalisis praktik-praktik beragama intoleran dan ekstrem kekerasan di Indonesia; ● Peserta mampu menjelaskan langkah-langkah dan konsep-konsep kunci dalam melakukan Analisis Gunung Es (*Iceberg Analysis*); ● Peserta mampu mempraktikkan analisis Gunung Es terhadap fenomena intoleransi di Indonesia (fenomena, pola dan tren, sistem-struktur, dan cara paradigma/cara pandang/model mental).	● Ceramah ● Tanya- jawab dengan *menti.com* ● Diskusi kelompok ● Presentasi ● Curah pendapat (*brainstorming*) ● Praktik Analisis Gunung Es (*Iceberg Analysis*)	225 menit (5 jam pelatihan)
MATA PENDIDIKAN PELATIHAN III: NILAI-NILAI UNIVERSAL AGAMA DAN ARGUMEN LANDASAN MODERASI BERAGAMA					
VII	Nilai-nilai Universal dalam Agama	● Konsep Moderasi dalam pandangan teologis agama ● Nilai-nilai universal agama: kemanusiaan, kasih sayang, keadilan, dan kemaslahatan ● Relasi agama dan negara dalam pandangan agama ● Nilai-nilai ajaran agama universal dan partikular	● Peserta mampu membedakan nilai-nilai ajaran agama universal dan partikular; ● Peserta mampu mengidentifikasi nilai dan ajaran universal agama-agama di Indonesia.	● Curah pendapat ● Diskusi kelompok ● Presentasi	90 menit (2 jam pelatihan)

BAB	MATERI	POKOK BAHASAN	KOMPETENSI	METODE	WAKTU
		● Nilai-nilai universal agama: menemukan titik temu nilai ajaran agama-agama di Indonesia			
MATA PELATIHAN IV: KONSEP MODERASI BERAGAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA					
VIII	Konsep Moderasi Beragama Perspektif Teologi	● Konsep Moderasi Beragama dalam pandangan agama-agama ● Dasar ajaran agama yang mendasari konsep Moderasi Beragama ● Indikator Moderasi Beragama dari perspektif agama-agama ● Nilai universal agama dalam konsep moderasi beragama: titik temu lintas agama	● Peserta mampu menjelaskan konsep Moderasi Beragama dalam pandangan agama-agama; ● Peserta mampu menjelaskan ajaran agama yang mendasari konsep Moderasi Beragama; ● Peserta mampu mengidentifikasi nilai dan ajaran agama-agama yang sejalan dengan indikator Moderasi Beragama; ● Peserta mampu mengenali nilai-nilai Moderasi Beragama yang sejalan dengan nilai Universal agama-agama.	● Curah pendapat ● Tanya Jawab ● Presentasi	135 menit (3 Jam Pelatihan)

BAB	MATERI	POKOK BAHASAN	KOMPETENSI	METODE	WAKTU
IX	Konsep Moderasi Beragama Pemerintah RI	● Konsep Moderasi Beragama ● Indikator Moderasi Beragama ● Peta Jalan Pengarusutamaan Moderasi Beragama ● Posisi Moderasi Beragama dalam RPJMN	● Peserta mampu menjelaskan konsep Moderasi Beragama; ● Peserta mampu menyebutkan Indikator Moderasi Beragama beserta contoh; ● Peserta mampu menjelaskan gambaran umum Peta Jalan Pengarusutamaan Moderasi Beragama; ● Peserta mampu menjelaskan posisi Moderasi Beragama dalam RPJMN.	● Curah pendapat ● Ceramah ● Tanya-jawab	135 menit (3 jam pelatihan)
MATA PELATIHAN V: MODERASI BERAGAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA					
X	Esensi dan Nilai Moderasi Beragama Kemenag RI	▪ 9 Kata Kunci Moderasi Beragama Pemerintah Otak ▪ Sistem otak ▪ Moral Foundation ▪ Promosi esensi dan nilai Moderasi Beragama	▪ Peserta mampu menyebutkan 9 Kata Kunci Moderasi Beragama ▪ Peserta mampu menjelaskan cara sistem otak bekerja ▪ Peserta mampu menyebut bentuk-bentuk *moral foundation*; ▪ Peserta mampu menjelaskan strategi dalam mempromosikan esensi dan nilai Moderasi Beragama.	▪ Curah pendapat ▪ Diskusi kelompok ▪ Presentasi	90 menit (2 jam pelatihan)
XI	Wawasan Kebangsaan	▪ Kerentanan kesatuan dan persatuan bangsa ▪ Pancasila sebagai kesepakatan bangsa ▪ Legalitas, legitimasi dan Mandat Kementerian Agama RI sebagai penyelenggara	▪ Peserta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengeruhi kerentanan kesatuan dan persatuan bangsa; ▪ Peserta mampu menjelaskan urgensi Pancasila sebagai kesepakatan bangsa;	● Curah pendapat ● Diskusi Kelompok	90 menit (2 jam pelatihan)

BAB	MATERI	POKOK BAHASAN	KOMPETENSI	METODE	WAKTU
		pemerintahan di bidang agama.	▪ Peserta mampu menilai pentingnya kedudukan Kementerian Agama RI sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang agama.		
XII	Kapasitas dan Citra Diri Penggerak Moderasi Beragama	▪ Deteksi dini praktik beragama moderat dan tidak moderat ▪ Kapasitas dan Citra diri Penggerak Moderasi Beragama (Wawasan Keagamaan, Wawasan Kebangsaan, Agensi dan Kemampuan, Paham Konteks Kehidupan Beragama, Sikap Diri) ▪ Peran penggerak Moderasi Beragama.	▪ Peserta mampu mengenali praktik beragama moderat dan tidak moderat; ▪ Peserta mampu mengenali kapasitas dan citra diri penggerak Moderasi Beragama; ▪ Peserta mampu memformulasikan peran penggerak Moderasi Beragama.	Diskusi Kelompok dengan metode "*Hot 7 Dots*"	135 menit (3jam pelatihan)
XIII	Ekosistem Moderasi Beragama	● Analisis aktor sosial politik dalam isu intoleransi ● Pemetaan ideal aktor dan jejaring kerja untuk Moderasi Beragama.	● Peserta mampu mempraktikkan analisis aktor sosial politik dalam isu intoleransi dengan *Social Presencing Theatre;* ▪ Peserta mampu merekomendasikan peta ideal aktor dan jejaring kerja untuk Penguatan Moderasi Beragama;	● Pemetaan empat dimesi (*four D's mapping*) dengan Teater Pertunjukan Sosial (*Social Presencing Theatre* ● Curah Pendapat ● Refleksi	135 menit (3 jam pelatihan)

BAB	MATERI	POKOK BAHASAN	KOMPETENSI	METODE	WAKTU
MATA PELATIHAN VI: STRATEGI PENGUATAN MODERASI BERAGAMA					
XIV	Strategi Penguatan Moderasi Beragama: Proses U	● Pengembangan langkah intervensi untuk perubahan beragama yang transformatif ● Teori Proses U (*Rethinking*, *Redesigning*, *Reframing*, *Reacting*)	● Peserta mampu merekomendasikan langkah-langkah intervensi untuk praktik beragama yang transformatif; ● Peserta mampu menyusun rencana aksi Penguatan Moderasi Beragama di lingkungan kerja dan masyarakat dengan Teori Proses U.	● *U Process* ● Tanya-jawab dengan *Menti*.com ● Diskusi kelompok ● *Gallery walk*	255 menit (5jam pelatihan)
XV	Membangun Gerakan : Kepemimpinan dan Kepeloporan	▪ Kepemimpinan ▪ Kepeloporan ▪ Perubahan transformatif	▪ Peserta mampu mengidentifikasi nilai dan karakteristik kepemimpinan ideal. ▪ Peserta mampu mengenali nilai-nilai kepeloporan; ▪ Peserta mampu menunjukkan sikap yang mendukung nilai-nilai perubahan transformatif.	● Menonton film ● Studi kasus ● Diskusi	90 menit (2 jam pelatihan)
XVI	Membangun Gerakan: Bina Damai dan Resolusi Konflik	● Bina Damai ● Resolusi konflik	● Peserta mampu mengidentifikasi kecakapan utama dalam menejalankan Bina Damai; ● Peserta mampu mengidentifikasi kecakapan utama dalam melakukan Resolusi Konflik.	▪ Ceramah ▪ Tanya-jawab ▪ Studi kasus	90 menit (2 jam pelatihan)
XVII	Refleksi, Evaluasi, dan Rencana Aksi	● Refleksi diri ● Evaluasi pelatihan ● Rencana aksi	▪ Peserta mampu menilai perubahan penting sebelum dan sesudah pelatihan; ▪ Peserta mampu mengevaluasi pelaksanaan pelatihan; ▪ Peserta mampu menyusun rencana aksi individu untuk Penguatan Moderasi Beragama.	▪ Curah pendapat ▪ Uji pasca pelatihan *(post test)*.	90 menit (20 jam pelatihan)

6. **Durasi Waktu Pelatihan**

Keseluruhan materi/paket pembahasan dalam pelatihan ini berdurasi **49 jam pelatihan (JP)** atau **22205 menit.** Berikut ini adalah sebaran sesi-sesi dengan alokasi waktunya: [Butuh penjelasan istilah-isitilah berikut Kelompok Dasar, Kelompok Inti, dan Penunjang]

NO	KELOMPOK MATA PELATIHAN DAN MATA PELATIHAN	JAM PELATIHAN (JP)	MENIT
A	**KELOMPOK DASAR**		
1	Pembukaan dan Arah Kebijakan PMB	2	**90**
B	**KELOMPOK INTI**		
1	**Perkenalan dan Membangun Komitmen Pembelajaran**	3	**135**
	a. Perkenalan dan Membangun Komitmen Pembelajaran (*Building Learning Comitment*)	3	**135**
	Menalar Keberagamaan		
	a. Udar Asumsi Membangun Perspektif	3	**135**
	b. Sketsa Kehidupan Beragama di Indonesia	2	**90**
	c. Analisis Sosial dengan *Scenario Thinking*	2	**90**
	d. Analisis Sosial dengan Perangkat Analisis Gunung Es	5	**225**
3	**Nilai-Nilai Universal Agama Dan Argumen Landasan Moderasi Beragama**		
	a. Nilai-nilai Universal dalam Agama	2	**90**
	b. Konsep Moderasi Beragama Perspektif Teologi	3	**135**
4	**Moderasi Beragama Pemerintah Republik Indonesia**		
	a. Esensi dan Nilai Moderasi Beragama Kemenag RI	2	**90**
	b. Wawasan Kebangsaan	2	**90**

	c. Kapasitas dan Citra Diri Penggerak Moderasi Beragam	3	**135**
	d. Ekosistem Penguatan Moderasi Beragama	3	**135**
	Strategi Penguatan Moderasi Beragama		
	a. Strategi Penguatan Moderasi Beragama: Proses U	5	**225**
	b. Ekosistem Penguatan Moderasi Beragama	3	**135**
	c. Membangun Gerakan: Kepemimpinan dan Kepeloporan	2	**90**
	d. Resolusi Konflik dan Bina Damai;	2	**90**
	e. Refleksi, Evaluasi, dan Rencana Aksi	2	**90**
C	**KELOMPOK PENUNJANG**		
1	Pengarahan Program	-	-
2	Evaluasi Program (*online*)	-	-
3	*Pre and Post Test* (*online*)	-	-
TOTAL		**49**	**2.205**

7. Alur Proses Pelatihan

Alur proses pelatihan ini didesain dengan menggunakan pendekatan Analisis Gunung (*Iceberg Analysis*) dan Teori U. Pendekatan pertama dikembangkan Peter Senge dan Hal Hamilton. Senge dosen senior pada Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat. Hamilton direktur Sustainable Food Lab dan salah satu pendiri Academy for Systemic Change. Analisis Gunung Es mengandaikan bahwa masalah yang tampak di permukaan sesungguhnya dipengaruhi oleh struktur penyebab yang tidak tampak. Untuk mengatasinya dibutuhkan upaya menyelami lebih dalam struktur penyebab, termasuk model mental yang dimiliki para aktor.

Teori U dikembangkan Otto Scharmer, kolega Senge di MIT dan salah seorang pendiri Presencing Institute. Teori U merupakan metode berbasis kesadaran untuk mengubah sistem. Teori U memadukan pendekatan pemikiran sistem (*system thinking*), inovasi, dan memimpin perubahan--dari sudut pandang kesadaran manusia yang terus berkembang. Teori U terdiri dari tiga elemen utama, salah satunya sebuah kerangka untuk melihat titik buta (blind spot) dari kepemimpinan dan perubahan sistem. Teori ini juga berisi metode-metode praktis dan perangkat-perangkat bagi para pembuat perubahan.[18]

Dengan menggunakan dua pendekatan ini, pelatihan dimulai dengan upaya mengudar asumsi-asumsi yang selama ini berkembang dalam kehidupan keberagamaan untuk kemudian membangun perspektif yang lebih tepat. Fenomena-fenomena kehidupan keagamaan yang tidak moderat akan didalami hingga menemukan model mental para aktor. Selanjutnya pelatihan akan mengajak peserta melakukan *rethinking*, *redesigning*, dan *reframing*. Dengan strategi ini diharapakan lahir reaksi atau respons yang lebih tepat dan berdampak dalam membangun Moderasi Beragama. Alur proses pelatihan secara terperinci dapat dilihat beerikut ini:

[18] Lihat Theory U dalam https://www.u-school.org/theory-u (diakses 10 Oktober 2024)

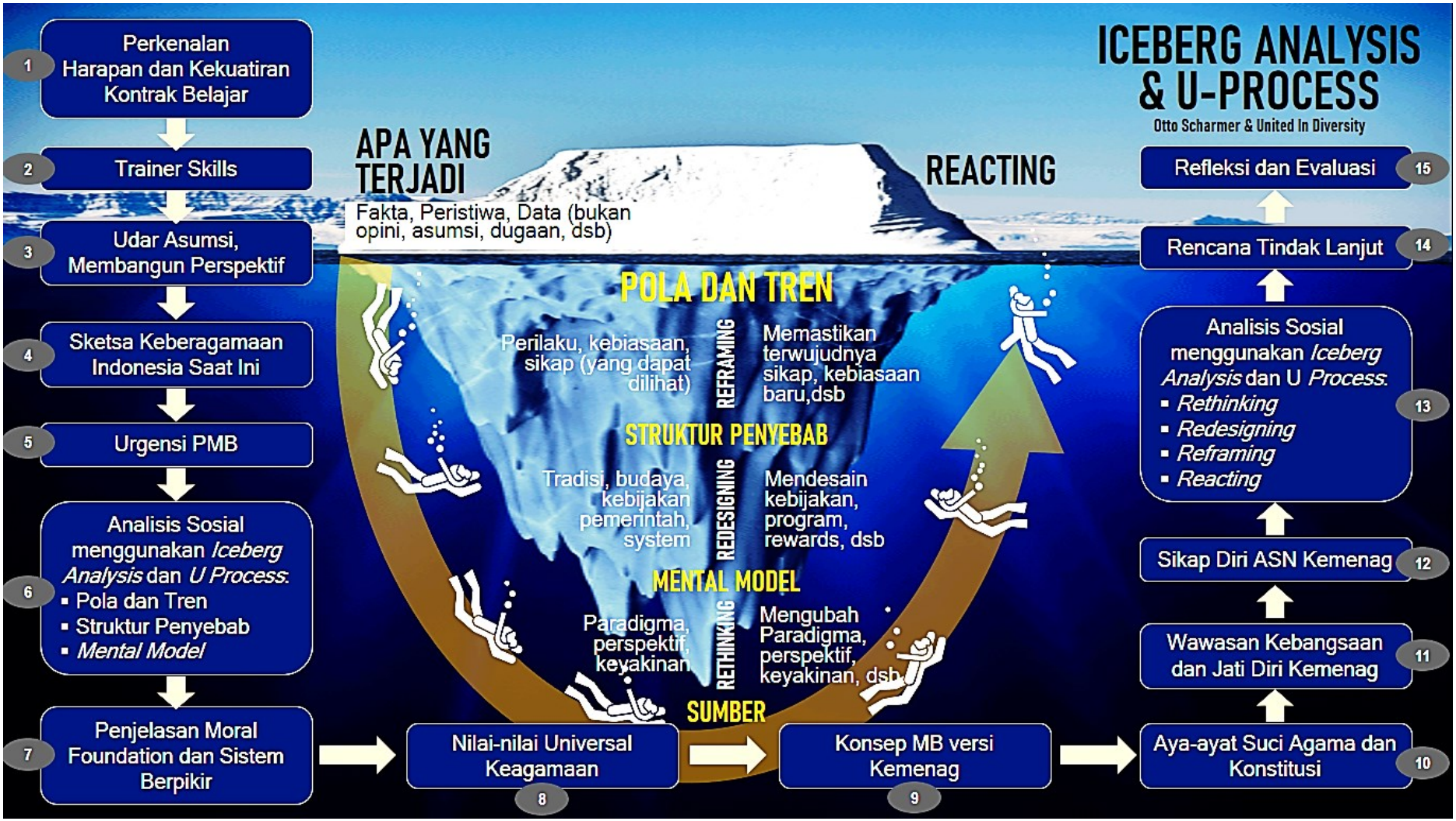
ICEBERG ANALYSIS & U-PROCESS
Otto Scharmer & United In Diversity
1 Perkenalan Harapan dan Kekuatiran Kontrak Belajar
2 Trainer Skills
3 Udar Asumsi, Membangun Perspektif
4 Sketsa Keberagamaan Indonesia Saat Ini
5 Urgensi PMB
6 Analisis Sosial menggunakan Iceberg Analysis dan U Process:
▪ Pola dan Tren
▪ Struktur Penyebab
▪ Mental Model
7 Penjelasan Moral Foundation dan Sistem Berpikir
APA YANG TERJADI
Fakta, Peristiwa, Data (bukan opini, asumsi, dugaan, dsb)
REACTING
POLA DAN TREN
Perilaku, kebiasaan, sikap (yang dapat dilihat)
REFRAMING
Memastikan terwujudnya sikap, kebiasaan baru,dsb
STRUKTUR PENYEBAB
Tradisi, budaya, kebijakan pemerintah, system
REDESIGNING
Mendesain kebijakan, program, rewards, dsb
MENTAL MODEL
Paradigma, perspektif, keyakinan
RETHINKING
Mengubah Paradigma, perspektif, keyakinan, dsb
SUMBER
8 Nilai-nilai Universal Keagamaan
9 Konsep MB versi Kemenag
10 Aya-ayat Suci Agama dan Konstitusi
11 Wawasan Kebangsaan dan Jati Diri Kemenag
12 Sikap Diri ASN Kemenag
13 Analisis Sosial menggunakan Iceberg Analysis dan U Process:
▪ Rethinking
▪ Redesigning
▪ Reframing
▪ Reacting
14 Rencana Tindak Lanjut
15 Refleksi dan Evaluasi

SESI II
PERKENALAN DAN MEMBANGUN KOMITMEN PEMBELAJARAN (*BUILDING LEARNING COMMITMENT*)

A. Pengantar

Perkenalan dan Membangun Komitmen Pembelajaran merupakan materi pertama dalam sesi pelatihan Moderasi Beragama. Materi ini belajar perlu diberikan mengingat para peserta berasal dari berbagai latar belakang dan belum saling mengenal. Bukan saja perkenalan antarpeserta, sesi ini juga diharapkan menjadi ruang pertemuan awal untuk membangun keterlibatan dengan panitia dan fasilitator pelatihan.

Di samping perkenalan, sesi ini juga digunakan untuk membuat komitmen pembelajaran yang bertujuan membangun persepsi dan kesepakatan yang sama tentang aturan-aturan selama pelatihan berlangsung. Beberapa aturan dirumuskan bersama dengan tujuan menciptakan kenyamanan, kedisiplinan, dan kelancaran seluruh agenda kegiatan. Terkait dengan kelancaran selama pelatihan, peserta diajak untuk memilih satu orang yang menjadi koordinator atau ketua kelas.

Sekalipun disebut “Perkenalan dan Membangun Komitmen Pembelajaran”, di sesi ini fasilitator juga akan menjelaskan tujuan, metode, dan alur pelatihan. Dengan memahami informasi-informasi tersebut, peserta sejak awal dipersiapkan untuk menjadi bagian dari keseluruhan tahap-tahap pelatihan hingga mencapai tujuan.

B. Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu:

1. Mengingat dan menyebutkan minimal lima nama peserta, fasilitator, atau panitia;
2. Menjelaskan kembali hasil kesepakatan apa yang harus dilakukan tidak dilakukan selama pelatihan.

C. Pokok Bahasan

1. Perkenalan seluruh peserta, fasilitator, dan panitia (nama, lembaga, harapan, kekhawatiran)
2. Kesepakatan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan selama pelatihan

D. Metode

- Permainan
- Tanya-jawab melalui *www.menti.com*
- Presentasi

Waktu

180 menit (4 jam pelatihan)

E. Peralatan dan Bahan

1. LCD
2. Laptop/Komputer
3. Kertas plano
4. Kertas metaplan
5. Gunting
6. Selotip
7. Spidol besar warna-warni
8. Spidol kecil warna-warni
9. Bolpoin
10. Kertas
11. Jaringan internet

F. Langkah-Langkah Fasilitasi

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
1	10 menit	**Pengantar** 1. Fasilitator membuka kelas dengan menyapa peserta dengan sapaan hangat dan akrab, sembari menanyakan kabar para peserta. 2. Fasilitator memperkenalkan diri secara singkat dan apa yang akan dilakukan selama pelatihan. 3. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi, yaitu setelah mengikuti sesi ini peserta mampu: a. Mengenal lebih dekat satu sama lain seluruh pihak dan komponen pelatihan; b. Menyadari harapan dan kekhawatiran peserta terhadap pelatihan; c. Memiliki kesepakatan apa yang harus dan tidak harus dilakukan selama pelatihan; dan d. Memahami tujuan, pendekatan, metode, dan alur pelatihan. **Catatan.** Sebelum sesi ini, peserta dipastikan telah mendapatkan dan mengisi lembar elektronik uji pra-pelatihan (*pre-test)* yang disediakan panitia yang hasilnya dapat diakses tim fasilitator. Tim fasilitator mencatat temuan-temuan penting untuk memetakan sikap da kapasitas peserta.
2	45 menit	**Perkenalan** 1. Fasilitator meminta peserta berdiri dan membentuk lingkaran besar. 2. Fasilitator meminta peserta sambil bertepuk tangan secara ritmis bersama-sama, setiap orang memperkenalkan nama dirinya dan memperkenalkan satu orang yang sudah dikenalnya. 3. Fasilitator meminta orang yang namanya disebut mendapat giliran berikutnya memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan salah seorang yang sudah dikenalnya. 4. Begitu seterusnya.
3	35 menit	**Harapan dan kekhawatiran** 1. Fasilitator meminta peserta menggunakan telepon genggam (*handphone*) masing-masing untuk membuka peramban web seperti *Google Chrome* dan menuliskan *www.menti.com*.

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
		Catatan. Fasilitator sebelumnya telah membuat daftar pertanyaan berikut ini pada www.mentimeter.com: 1. Sebutkan satu atau dua kata alasan apa yang membuat Anda semangat ikut pelatihan ini? 2. Apa harapan Anda terhadap pelatihan ini? 3. Apa yang Anda khawatirkan terhadap pelatihan ini? 2. Fasilitator meminta peserta memasukkan kode yang sudah tersedia. 3. Fasilitator meminta peserta menjawab pertanyaan pertama yang muncul dalam *www.menti.com*: "sebutkan satu atau dua kata alasan apa yang membuat Anda semangat ikut pelatihan ini." 4. Setelah semua peserta mengisi, fasilitator membaca jawaban-jawaban peserta dan memberi komentar singkat secara menarik. 5. Setelah selesai, fasilitator meminta peserta kembali menjawab pertanyaan kedua melalui *www.menti.com:* "Apa harapan Anda terhadap pelatihan ini?" 6. Setelah peserta menjawab, fasilitator kembali membaca jawaban-jawaban dan mengomentarinya secara menarik. 7. Setelah selesai, fasilitator peserta diminta kembali menjawab pertanyaan ketiga melalui *www.menti.com* pertanyaan berikut: "apa yang Anda khawatirkan terhadap pelatihan ini?" 8. Setelah peserta menjawab, fasilitator membacakan kembali jawaban-jawaban dan mengomentarinya secara menarik. 9. Fasilitator menyampaikan ringkasan dan poin-poin penting dari jawaban-jawaban peserta terhadap tiga pertanyaan di atas. **Tips.** Untuk mempersingkat proses reviu dan mempermudah peserta, fasilitator pendamping (*co-fasilitator*) dapat membantu fasilitator utama dengan menuliskan pada kertas plano poin-poin atau kata-kata kunci dari jawaban peserta. Catatan tersebut dibacakan kembali oleh fasilitator utama ketika meringkas materi sesi "Harapan dan kekhawatiran".
4	25 menit	**Membangun Kesepahaman Pembelajaran** 1. Fasilitator melempar pertanyaan kepada seluruh peserta "apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar forum pelatihan sesuai harapan?"

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
		2. Fasilitator mencatat dan mengelompokkan jawaban peserta pada kertas plano yang dibagi dalam dua kluser: yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. 3. Fasilitator membaca jawaban tersebut dan mengajak peserta untuk menyepakatinya sebagai kesepahaman pembelajaran. **Tips.** Fasilitator bisa memberi tanda centang jawaban ya disepakati dan memberi tanda silang untuk bagian yang tid disepakati. 4. Fasilitator membagikan kertas kepada setiap peserta dan meminta mereka menuliskan sanksi bagi peserta yang melanggar kesepahaman pembelajaran. 5. Fasilitator meminta peserta menggulung kertas yang sudah diisi tersebut seperti kertas arisan dan mengumpulkannya kepada fasilator. 6. Fasilitator menyampaikan kepada peserta, kertas tersebut akan dipakai saat peserta melanggar kesepahaman pembelajaran. Peserta yang melanggar akan mengambil salah satu kertas yang ada, membaca, dan menjalankannya.
5	15 menit	**Memilih Koordinator/Ketua Kelas:** 1. Fasilitator menyampaikan kepada peserta untuk menjamin kelancaran forum dan kelas, akan ditetapkan seorang koordinator/ketua kelas. 2. Penetapan koordinator/ketua kelas dilakukan dengan cara mengajak setiap peserta memutar-mutar tangannya di atas kepala dan dalam hitungan tertentu, fasilitator meminta setiap peserta menunjuk seseorang yan dipilih. Orang yang banyak ditunjuk ditetapkan sebagai koordinator/ketua kelas. 3. Fasilitator mengajak setiap peserta menetapkan tugas-tugas koordinator/ketua kelas.
6	45 menit	**Alur Pelatihan:** 1. Fasilitator menyampaikan kepada peserta untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai pelatihan, peserta akan diajak untuk melihat dan mendengarkan gambaran ikhtisar (*overview*) pelatihan. Dengan begitu peserta diharapkan memahami gambaran umum tentang tujuan, pendekatan, metode, dan alur pelatihan. 2. Fasilitator mempresentasikan Gambaran Ikhtisar (*Overview*) Pelatihan.

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
		Catatan. Fasilitator menampilkan bahan tayang Gambaran Ikhtisar Pelatihan 3. Fasilitator memberi kesempatan peserta memberi tanggapan, klarifikasi, atau pertanyaan di sela-sela atau di akhir presentasi. 4. Fasilitator merespons tanggapan, klarifikasi, atau pertanyaan tersebut sesuai waktu yang tersedia. 5. Fasilitator menegaskan ulang mengenai tujuan pelatihan dan pentingnya partisipasi aktif peserta.
7	5 menit	**Penutup:** ● Fasilitator menutup sesi dengan menegaskan ulang apa yang sudah dijalankan dalam sesi dan memastikan bahwa peserta mematuhi kesepahaman pembelajaran.
	180 menit	

G. Bahan Tayang

1. Gambaran Ikhtisar (*Overview*) Pelatihan
2. Pertanyaan kekhawatiran dan harapan

SESI III
UDAR ASUMSI MEMBANGUN PERSPEKTIF

A. Pengantar

Bagaimana cara kita memandang dan memaknai dunia? Cara kita memahami, menilai, bahkan meyakini tentang sesuatu di luar sana ditentukan dari apa yang ada di dalam kepala kita. Apa yang ada di dalam kepala kita dibangun dari proses yang lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Pertanyaannya adalah apakah yang kita pikirkan dan yakini tentang sesuatu sungguh-sungguh menggambarkan sesuatu itu atau ia berasal dari asumsi-asumsi subjektif kita?

Materi ini merupakan “ilmu alat” yang harus dimiliki peserta pelatihan sebelum memasuki materi-materi selanjutnya. Sebagaimana “ilmu alat”, materi ini membekali peserta dengan perangkat metodologis yang berguna untuk membongkar kekeliruan dalam bernalar karena asumsi-asumsi awal yang begitu saja dianggap sebagai kebenaran faktual. Materi ini membekali peserta untuk menyadari berbagai sikap dan tindakan negatif atas keragaman dan perbedaan yang lahir dari kekeliruan cara bernalar.

B. Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu:

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kekeliruan asumsi dalam kehidupan beragama.
2. Mengenali perbedaan fakta dan asumsi
3. Menjelaskan Tangga Kesimpulan sebagai proses yang membentuk pola pikir, sikap dan perilaku.
4. Menjelaskan Tiga Suara Tiga Keterbukaan.

C. Pokok Bahasan

1. Kerentanan dan kewaspadaan terhadap kekeliruan asumsi dalam kehidupan beragama

2. Peta Bukan Teritori *(Map is Not Territory)*
3. Tangga Kesimpulan *(Ladder of Inference)*
4. Tiga Suara Tiga Keterbukaan *(Three Voices; Three Opennes)*

D. Metode

- Tugas individu
- Presentasi
- Tanya-jawab

E. Waktu

135 menit (3 jam pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

- LCD
- Laptop/Komputer
- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting
- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoin
- Kertas

G. Langkah-langkah Fasilitasi

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
1	5 menit	**Pengantar:** 1. Fasilitator membuka kelas dengan menjelaskan tujuan sesi ini peserta mampu: a. Menyadari kekeliruan berpikir dan asumsi subjektif atas realitas, keragaman, dan perbedaan.

		b. Menyadari pentingnya pola pikir, sikap, dan perilaku inklusif c. Memiliki pemahaman yang meningkat tentang keberagaman sosial-keagamaan. 2. Fasilitator memberi pengantar bahwa selama ini banyak orang termasuk fasilitator maupun peserta yang terjebak dalam perangkap asumsi-asumsi subjektif yang diyakini sebagai kebenaran faktual atas fenomena keragaman dan perbedaan. Sesi ini salah satunya membantu mengatasi tantangan kekeliruan berpikir dan asumsi subjektif. **Tips.** Fasilitator sebaiknya memberi contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan dan pengalaman peserta. Contohnya pandangan terhadap etnis atau agama tertentu. Etnis A kasar. Agama B tidak suka agama C.
2	45 menit	**Peta Bukan Wilayah** 1. Fasilitator meminta masing-masing peserta untuk menggambar peta dari rumah ke lokasi pelatihan. 2. Setelah masing-masing peserta menggambar peta, fasilitator meminta mereka menukarkan gambar peta tersebut kepada kawan di samping. **Catatan.** Gambar peta sebaiknya ditukarkan kepada peserta yang belum mengetahui alamat rumah pemilik gambar peta. 3. Fasilitator bertanya kepada dua atau tiga orang peserta, “apakah dengan gambar peta tersebut, Anda bisa sampai ke tujuan?” 4. Fasilitator mengajak peserta melihat tampilan *google map* di layar berdasarkan salah satu alamat rumah peserta. 5. Fasilitator bertanya kepada dua-tiga peserta apakah dengan peta tersebut peserta akan sampai ke alamat tersebut? Mengapa *google map* lebih mudah dipahami ketimbang gambar peta yang dibuat para peserta? 6. Fasilitator menjelaskan kepada peserta bahwa apa yang sudah mereka alami menjelaskan tentang konsep “Peta Bukanlah Teritori (*map is not territory*)”. Peta adalah asumsi yang ada di kepala kita dan menjelaskan realitas internal, sedang *territory* adalah fakta yang menjelaskan realitas ekstrenal. Keduanya sering kali berbeda dan bisa menciptakan kekeliruan berpikir.
3	45 menit	**Tangga Kesimpulan dan Bias Kognitif** 1. Fasilitator menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kekeliruan dalam bernalar melalui teori *ladder of inference* (tangga penyimpulan) yang terdiri dari: o Menyeleksi data (*selected data*), o Menambah makna (*added meaning*)

		○ Membuat asumsi (*assumption*) ○ Membuat kesimpulan (*conclusion*) ○ Membentuk keyakinan (*beliefs*). **Catatan.** Fasilitator menampilkan bahan tayang Udar Asumsi Membangun Perspektif tentang *Ladder of Inference*. 2. Fasilitator memberi berbagai contoh kasus tentang kekeliruan berpikir. **Tips.** Untuk menghindari pandangan bawah fasilitator bersikap bias agama atau kelompok tertentu, fasilitator perlu memilih contoh yang beragam dari berbagai agama atau kelompok yang berbeda. Misalnya konflik tempat ibadah antara muslim dengan Kristen, Kristen dengan muslim, Hindu dengan Islam. 3. Fasilitator menekankan bahwa yang paling penting dari mempelajari *ladder of inference* adalah membongkar asumsi-asumsi dan keyakinan-keyakinan kita atas sesuatu, kemudian memugarnya kembali melalui *relective learning (pembelajaran reflektif)* dan *reflective loop (lingkaran reflektif)*. 4. Fasilitator melanjutkan dengan menjelaskan hal-hal yang membuat pengetahuan seseorang bias (*cognitive bias*): *egocentric memory, egocentric myopia, egocentric righteousness, egocentric hypocrisy, egocentric oversimplification, egocentric blindness.* **Catatan.** Fasilitator/trainer menampilkan bahan tayang Udar Asumsi Membangun Perspektif terkait Bias Kognitif.
4	35 menit	**Tiga Suara, Tiga Keterbukaan:** ⇒ Fasilitator menjelaskan mengapa banyak orang diam terhadap maraknya fenomena intoleransi dan ekstremisme keagamaan dengan menggunakan kerangka Proses-N dan Proses-U. ⇒ Fasilitator menjelaskan *tiga suara* (*three voices): suara menghakimi (voice of judgment), suara sinis (voice of cynicism), dan suara ketakutan (voice of fear*) dan tiga *keterbukaan* (*three openness): keterbukaan pikiran (open mind), keterbukaan hati (open heart) and keterbukaan kemauan (open will*). **Catatan.** Fasilitator menampilkan bahan tayang Udar Asumsi Membangun Perspektif terkait Tiga Suara Tiga Keterbukaan. ⇒ Fasilitator menutup tahapan ini dengan mendorong peserta untuk membuka pikiran, hati, dan kehendak untuk semakin

		terlibat dan bersuara dalam melawan kecenderungan intoleransi dan ekstremisme.
5	5 menit	**Penutup** 1. Fasilitator menutup sesi dengan membuat ringkasan atas pokok-pokok bahasan dan menyambungkannya dengan materi-materi selanjutnya.
	135 menit	

H. Lampiran Materi

1. Peta Bukan Wilayah
2. Tangga Penyimpulan (*Ladder of Inference*)
3. Bias Kognitif
4. Tiga Suara, Tiga Keterbukaan

I. Bahan Tayang

1. Udar Asumsi Membangun Perspektif

Lampiran Materi 1.

Peta Bukan Wilayah

- Konsep Peta Bukan Wilayah (*The Map is Not The Territory*) sebenarnya berasal dari seorang antropolog yang bernama Gregory Bateson. Peta (*map*) yang dimaksud adalah sebuah Realitas Internal (RI) yang mewakili "isi" kepala manusia. Sedangkan wilayah (*territory*) wilayah adalah Realitas Eksternal (RE) yang mewakili segala peristiwa atau kejadian di luar kepala manusia dan bersifat faktual.
- "Apa yang terjadi di luar kepala kita tidak sama dengan yang terjadi di dalam kepala kita". Artinya, peristiwa yang terjadi di luar kepala kita bersifat faktual dan netral. Ia menjadi memiliki makna dan juga nilai setelah memasuki Realitas Internal manusia yang didahului dengan proses kognitif yang dibentuk oleh pengalaman hidupnya. Itulah sebabnya satu informasi dapat memiliki banyak makna bila disampaikan ke beberapa orang. Segelas air teh dengan satu sendok teh gula pasir bisa dimaknai teh manis oleh seseorang, tetapi dimaknai teh yang kurang manis oleh orang lainnya.
- "Peta bukan wilayah sebenarnya" dapat dimaknai cara seseorang memandang dunia. Cara seseorang memandang tentu tidak sama dengan orang lain yang dipandang. Cara memandang hanya lah interpretasi saja, dan tidak akan sama dengan realitasnya.
- Seseorang terkadang lebih memilih menciptakan "peta" pikiran sendiri dibandingkan berhubungan langsung dengan realitasnya. Peta Indonesia bukanlah Indonesia itu sendiri, Indonesia bukanlah Indonesia yang digambarkan oleh peta Indonesia. Perhatikan cara orang memandang peta, dan perhatikan bagaimana orang tersebut merespons peta. Agar timbul kebijaksanaan dalam menyikapi peta tersebut, maka kita perlu mengamati dan menyadarinya.

Lampiran Materi 2

Ladder of Inference

- *Ladder of Inference* (Tangga Penyimpulan) diperkenalkan oleh Chris Argyris dan dikembangkan oleh Peter Senge, untuk membantu kita memahami bagaimana proses kognitif terjadi dalam pikiran kita, sehingga kita dapat mengisi celah dalam berpikir dan membuat keputusan berdasarkan kenyataan, juga membantu menguji pemikiran orang lain dan mencapai kesimpulan yang lebih baik secara bersama-sama.

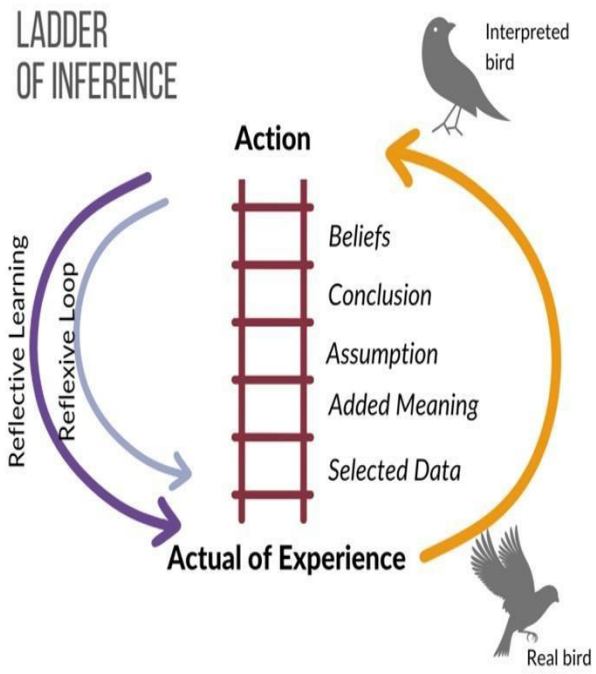

Secara alamiah, Tangga Penyimpulan terdiri dari tujuh tangga yang mewakili proses mental atau berpikir kita, yaitu:

1. **Realitas**, kondisi nyata yang bisa diamati berupa data dan informasi yang telah dikumpulkan.

2. **Data**, dari data yang dikumpulkan, maka akan dipilih data apa saja yang akan digunakan berdasarkan pengalaman sebelumnya dan kepercayaan yang dimiliki. Semua data tidak mungkin akan digunakan dalam proses ini, karena adanya keterbatasan dalam mengolah semua informasi dan membutuhkan kejelian dalam memilih data.
3. **Makna**, memahami makna dari kondisi fakta yang terjadi pada data yang dipilih dengan cara meneliti apa yang dilihat atau didengar.
4. **Asumsi**, membuat asumsi berdasarkan makna yang telah dipahami.
5. **Kesimpulan**, menarik kesimpulan dari asumsi yang dibuat.
6. **Keyakinan**, keyakinan atas kebenaran dikembangkan dari penarikan kesimpulan.
7. **Tindakan,** pengambilan tindakan yang berakar pada apa yang diyakini sebagai kebenaran.

* Berdasarkan pemahaman terhadap Tangga Penyimpulan ini, kita dapat lebih awas (*mindful*) terhadap langkah-langkah berpikir kita. Pada setiap anak tangga, kita dapat melakukan deliberasi dengan *reflective learning* dan *reflexive loop*. Dengan demikian kita tidak terjebak dalam penyimpulan yang bias dan terbatas. Menerapkan tangga ini secara sadar membuat orang untuk mundur selangkah dan melihat ke mana ia akan melompat ke kesimpulan.

Lampiran Materi 3

Bias Kognitif

- Bias kognitif adalah bias sistematis dalam memandang dunia dan kehidupan pada sistem berpikir kita. Ia akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang muncul dari cara orang memproses informasi. Karena masalah atau kejadian tertentu lebih mudah dipahami daripada yang lain, individu cenderung menggunakan kejadian ini sebagai tolok ukur untuk pengambilan keputusan. Bias kognitif seringkali terkait dengan memori.

- Meskipun seringkali sangat akurat, memori seseorang juga dapat menyebabkan kesalahan dalam berpikir.

- Cara orang mengingat suatu peristiwa dapat menjadi bias karena sejumlah alasan, dan pada gilirannya dapat menyebabkan pemikiran dan pengambilan keputusan yang bias.

- Beberapa bias kognitif yang perlu kita perhatikan dan waspadai, antara lain:

  ⇒ ***Egocentric Memory***

  Kecenderungan alamiah seseorang untuk 'melupakan' bukti dan informasi yang tidak mendukung pendapat dan 'mengingat' bukti dan informasi yang mendukung pendapatnya.

  Cara mengoreksinya adalah dengan sengaja mencari bukti dan informasi yang tidak mendukung pendapatnya dan secara eksplisit mengarahkan perhatian kepada bukti dan informasi ini. Ketika mencoba kemudian tidak menemukan bukti dan informasi tersebut, asumsikanlah bahwa proses mencarinya belum dilakukan secara benar.

  ⇒ ***Egocentric Myopia***

Kecenderungan alamiah seseorang untuk berpikir '*absolutist'* dalam sudut pandang yang sangat sempit.

Cara mengoreksinya adalah dengan secara rutin berpikir dengan sudut pandang yang berlawanan dengan sudut pandangnya. Misalnya, kalau Anda sebagai aktivis, coba berpikir sebagai pemerintah; kalau Anda sebagai wakil pemerintah, coba berpikir sebagai aktivis; kalau Anda sebagai pengusaha coba berpikir sebagai pekerja, begitu sebaliknya, dan seterusnya. Ketika Anda belum menemukan prasangka-prasangka pribadi dalam proses ini, tanyakanlah apakah Anda sudah jujur untuk mencobanya.

⇒ ***Egocentric Righteousness***

Kecenderungan alamiah seseorang untuk merasa lebih baik atau 'superior' karena yakin benar, padahal belum tentu benar.

Cara mengoreksinya adalah dengan secara berkala mengingatkan diri betapa banyak hal yang belum kita ketahui. Cobalah membuat daftar pertanyaan-pertanyaan dalam hidup yang belum terjawab. Jika daftarnya terlalu pendek atau sedikit apalagi kosong, Anda perlu meragukan cara Anda bertanya.

⇒ ***Egocentric Hypocrisy***

Kecenderungan alamiah untuk mengabaikan inkonsistensi. Misalnya inkonsistensi antara kata dan perbuatan atau standar yang kita terapkan pada diri sendiri dan orang lain.

Cara mengoreksinya adalah dengan secara berkala membandingkan standar yang kita terapkan pada diri sendiri dan orang lain. Jika tidak menemukan inkonsistensi dalam pikiran atau perbuatan Anda, bertanyalah apakah Anda sudah menggali lebih dalam atau tidak.

⇒ ***Egocentric Oversimplification***

Kecenderungan alamiah untuk mengabaikan kompleksitas masalah dengan memilih pandangan yang sederhana bila kompleksitas itu akan mengubah pendapat.

Cara mengoreksinya adalah dengan secara rutin memfokuskan pikiran pada kompleksitas masalah dan secara eksplisit memformulasikannya dalam kata-kata. Jika Anda tidak menemukan bahwa Anda telah menyederhanakan banyak masalah penting, bertanyalah apakah Anda telah benar-benar mengonfrontasikan diri pada kompleksitas dalam masalah yang dihadapi.

⇒ ***Egocentric Blindness***

Kecenderungan alamiah untuk tidak memperhatikan fakta atau bukti yang berlawanan dengan kepercayaan dan nilai-nilai yang diyakini.

Cara mengoreksinya adalah dengan secara eksplisit mencari fakta dan bukti tersebut. Bila Anda tidak mendapati diri Anda mengalami keresahan dalam mencari fakta dan bukti ini, maka Anda perlu bertanya apakah Anda telah secara serius menanggapi fakta dan bukti ini. Bila Anda dapati bahwa semua kepercayaan-kepercayaan Anda benar sejak awalnya, maka mungkin Anda telah secara canggih “mengelabui diri sendiri”.

Lampiran Materi 4

Tiga Suara, Tiga Keterbukaan

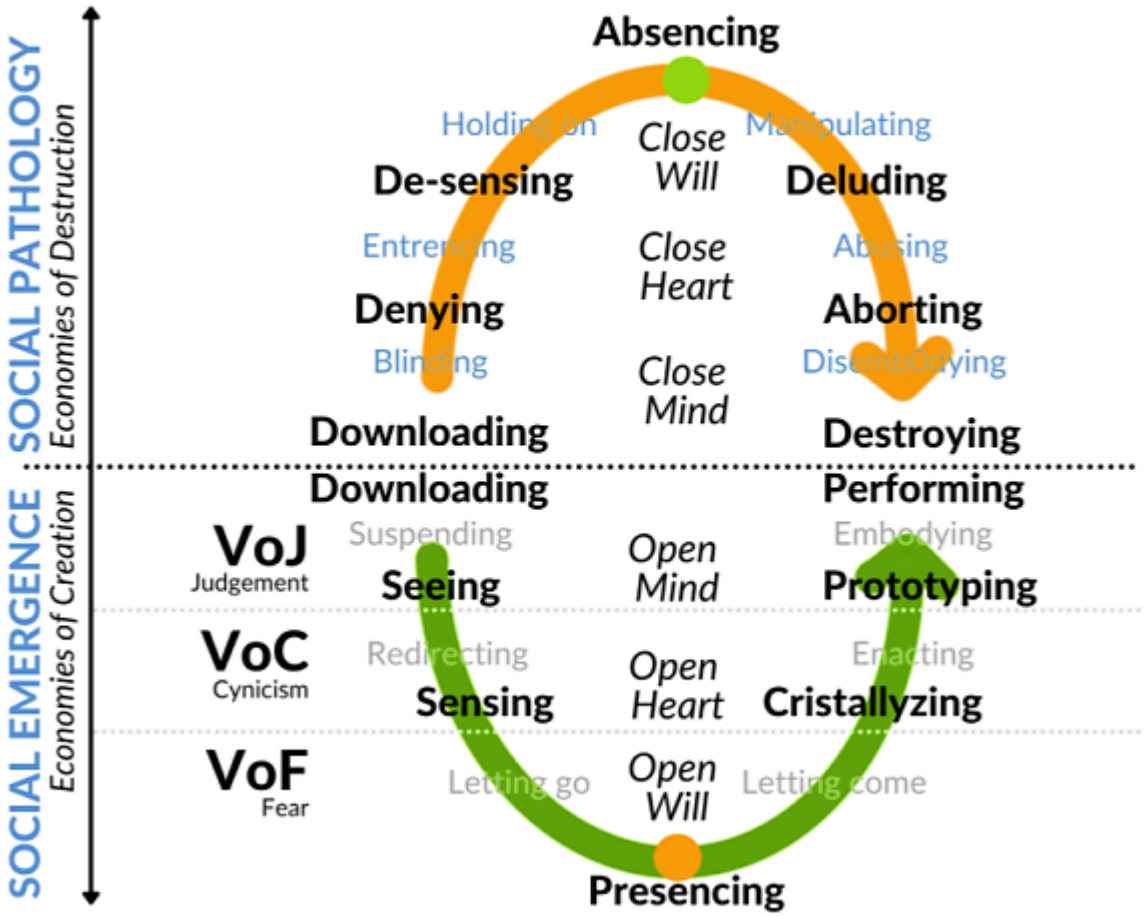

- Konsep Proses N dan Proses U diperkenalkan oleh profesor Otto Scharmer dari Presencing Institute – Massachusetts Institute of Technology, sebagai bagian dari U Theory dalam paradigma System Thinking. Konsep Proses U menggambarkan mekanisme optimal dalam mengelola pengalaman kehidupan kita, sedangkan Proses N menggambarkan mekanisme destruktif yang mempengaruhi kehidupan kita. Dalam sebuah sistem organisasi maupun sistem sosial politik yang lebih kompleks, Proses U dan proses N berdampak pada pengambilan keputusan dan tindakan dalam mengolah sebuah konteks persoalan, yang berujung pada kondisi sosial politik yang dihidupi.

- Scharmer meyakini bahwa sistem organisasi dan sistem sosial politik kita dibentuk oleh individu-individu yang ada di dalamnya. Karena itu, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa individu yang menjalankan sistem memiliki kemampuan untuk memahami dan mengarahkan dirinya.
- Scharmer menyatakan, seringkali kita terjebak dalam sikap reaktif menghadapi sebuah situasi atau persoalan. Dari titik mengunduh (*downloading*) informasi terkait sebuah konteks, kita langsung menggunakannya untuk mengambil keputusan, tanpa proses mengolah informasi dengan deliberatif dan mendalam. Proses ini tidaklah efektif karena proses pemaknaan kita atas informasi awal dapat terperangkap oleh bias kognitif dalam tangga penyimpulan (*ladder of inference*).
- Untuk melepaskan diri dari perangkap reaktif dan Proses N, kita memerlukan tiga instrumen yaitu *Open Mind* (membuka pikiran), *Open Heart* (membuka hati), dan *Open Will* (membuka tekad/ niatan). Namun ketiga hal ini tidaklah mudah karena ada 3 Suara (*3 Voices*) Resistensi yang menghambat, yaitu *Voice of Judgement*, *Voice of Cynicism*, dan *Voice of Fear*.
- Secara spontan, kita akan melakukan proses *downloading* (mengunduh) informasi pada saat menghadapi sebuah situasi atau persoalan. Seringkali, kita terjebak untuk langsung memaknainya sesuai dengan pengalaman yang membentuk Realita Internal kita. Kita mengunduh dan mendengar berdasarkan kebiasaan lama. Untuk mencegahnya, kita perlu *Open Mind* untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Dengan cara ini, kita dapat memperluas wawasan kita dan mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai konteks tersebut. Pada tahap ini, seseorang biasanya menghadapi penghambat berupa *Voice of Judgment* (VOJ) atau suara penghakiman, di mana pikiran kita dipenuhi oleh prasangka terhadap persoalan dan pihak-pihak yang terlibat. *Voice of Judgement* membuat

kita terjebak dalam wawasan yang sempit, memaksakan sudut pandang kita sendiri, dan lalu terjebak dalam sikap menilai bahkan merendahkan orang lain. Sebagai contoh, kita masih kerap menjumpai pandangan yang menganggap perempuan tidak bisa menjadi CEO perusahaan karena kejumudan proses berpikir, terjebak pada penghakiman seperti perempuan lebih emosional daripada laki-laki, perempuan tidak mampu memimpin, dan seterusnya. Tetapi bila kita berhasil membangun kebiasaan untuk membuka pikiran, maka kita akan mampu memetakan konteks dengan lebih jernih dan siap masuk ke tahap selanjutnya yaitu Membuka Hati (*Open Heart*).

- *Open Heart* adalah kapasitas kita untuk berempati dan menempatkan diri kita pada posisi pihak-pihak lain dalam konteks yang sedang kita garap. Kita mampu memandang dari sudut yang berbeda dengan ketulusan iktikad dan sikap welas asih untuk mencari titik temu. Untuk dapat mencapai titik ini, kita perlu melewati Hambatan Kedua yaitu *Voice of Cynicism*, yaitu suara-suara sinis dalam diri kita yang membuat kita terjebak dalam sentimen negatif terhadap pilihan dan pandangan kelompok atau orang yang berbeda. Kita merasa kita yang paling benar, dan kesulitan untuk berempati pada posisi orang lain yang membuat mereka membuat pilihan yang berbeda. Bila kita mampu mengabaikannya, kita akan mampu melakukan dialog yang reflektif antara berbagai pihak. Melanjutkan contoh di atas, *Open Heart* membuat kita melihat hubungan laki-laki dan perempuan sebagai hubungan yang idealnya saling memberdayakan, bukan saling mengalahkan.arena kita mampu memandang dari posisi yang berbeda. Kemampuan untuk bersikap tulus memberikan ruang kesadaran bahwa sistem sosial kita masih perlu memberikan afirmasi kepada para perempuan untuk dapat menjadi pemimpin pada level tinggi.
- Dari dialog reflektif yang empatik dan tulus, akan lebih mudah untuk menemukan beberapa titik temu dan dapat mulai menyusun langkah-langkah solusi bagi persoalan yang kita hadapi. Namun kita harus dapat

melawan suara resistensi terakhir yaitu *Voice of Fear*. Suara ini menghambat kita dengan keengganan melepas cara-cara lama atau mengambil cara-cara baru. Ia memerangkap kita untuk membangun hubungan dan berinteraksi secara terbuka kepada orang atau kelompok lain. Kita merasa takut untuk memulai, takut untuk mencoba, takut gagal dan terluka, dan seterusnya. Kita bisa melawannya dengan mengelola *holding space* (ruang jeda) yang membantu kita mengikhlaskan hal-hal usang yang menghambat dan menyongsong hal baru yang lebih baik. Kita bisa menemukan prinsip ini dalam tradisi masyarakat pesantren, yaitu *al-muhafadzah ala al-qadim wa akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (mempertahankan tradisi lama yang baik dan menyerap hal-hal baru yang lebih baik). Tahap ini disebut sebagai tahap dialog generatif dan membutuhkan sikap *Open Will* atau kapasitas membuka tekad/ niatan yang besar. Dalam contoh CEO perempuan, *Voice of Fear* memunculkan sentimen takut bila organisasi mengalami kemunduran, dan ini dilawan dengan Tekad Kuat untuk bekerjasama secara sinergis.

- Dengan membangun kebiasaan baru untuk *Open Mind*, *Open Heart*, dan *Open Will*, kita akan dapat menjalani proses mengolah konteks kerja dan hidup kita dengan lebih baik dan efektif. Kita juga dapat membangun kehidupan sosial politik kita dengan nilai-nilai luhur yang dibutuhkan sebagai fondasi kemaslahatan bersama.

SESI IV
SKETSA KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA

A. Pengantar

Apakah Moderasi Beragama perlu? Ini pertanyaan yang sering dilontarkan, bukan semata-mata karena ketidaktahuan, tapi tidak jarang juga karena kesalahpahaman.

Untuk memahami urgensi Moderasi Beragama, kita perlu melihat dinamika kehidupan keberagamaan di Indonesia saat ini. Dengan melihat dinamika kehidupan keberagamaan di Indonesia saat ini, kita akan menemukan menguatnya fenomena eksklusivisme beragama (*religious exclusivism*), intoleransi dan ekstremisme kekerasan keagamaan (*religious violent extremism*), serta merebaknya narasi keagamaan yang menghadap-hadapkan antara kesetiaan terhadap agama dan kesetiaan terhadap negara.

B. Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu:

1. Menjelaskan situasi umum kehidupan keberagaman masyarakat di Indonesia.
2. Menjelaskan tiga tantangan dasar yang mendasari kebijakan Penguatan Moderasi Beragama.
3. Mengenali fenomena umum intoleransi dan ekstresmisme keagamaan di Indonesia.
4. Mengenali perbedaan paradigma praktik keberagamaan yang subtanstif-inklusif dengan eklusif- legal formalistis.

C. Pokok Bahasan

1. Situasi umum kehidupan keberagamaan di Indonesia saat ini.
2. Tiga tantangan dasar yang mendasari kebijakan Penguatan Moderasi Beragama

3. Fenomena intoleransi dan ekstremisme keagamaan.
4. Dua arus paradigma praktik keberagamaan: substantif-inklusif versus eksklusif-legal formalistis.

D. Metode

- Ceramah
- Tanya-jawab
- *Scenario thinking* melalui Diskusi kelompok

E. Waktu

90 menit (2 jam pelatihan)

F. Pralatan dan Bahan

1. LCD
2. Laptop/Komputer
3. Kertas plano
4. Kertas metaplan
5. Gunting
6. Solatip
7. Spidol besar warna-warni
8. Spidol kecil warna-warni
9. Bolpoin
10. Kertas

G. Langkah-langkah Fasilitasi

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
1	5 menit	**Pengantar** 1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi, yakni setelah mengikuti sesi, peserta mampu: a. Menjelaskan situasi umum kehidupan keberagaman masyarakat di Indonesia. b. Menjelaskan tiga tantangan dasar yang mendasari kebijakan Penguatan Moderasi Beragama. c. Mengenali fenomena umum intoleransi dan ekstresmisme keagamaan di Indonesia.

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
2	80 menit	**Sketsa Kehidupan Keberagamaan:** 1. Fasilitator memperkenalkan biodata singkat *narasumber pakar.* 2. Fasilitator mempersilakan narasumber pakar mempresentasikan Sketsa Kehidupan Keberagamaan. **Catatan.** *Narasumber pakar* yang menyampaikan materi disyaratkan memenuhi kualifikasi berikut: b. Memiliki kepakaran terkait topik yang disampaikan c. Pernah terlibat dalam satu atau lebih pelatihan PMB d. Membaca modul Sketsa Kehidupan Keberagamaan. e. Menyiapkan materi dengan kisi-kisi berikut: 1. Menjelaskan situasi umum kehidupan keberagamaa di Indonesia saat ini. 2. Menjelaskan dan memberi contoh yang dekat denga kehidupan dan pengelaman peserta tentang fenomer eksklusivisme beragama, intoleransi dan ekstremisn keagamaan. 3. Menjelaskan da arus paradigma prak keberagamaan: substantif-inklusif versus eksklus legal formalistik. 4. Menjelaskan pentingnya Moderasi Beragama dala membangun Indonesia masa depan. f. Direkomendasikan dan/atau mendapat persetujuan da Pokja. 3. Narasumber memaparkan materi sketsa kehidupan keberagamaan di Indonesia saat ini. 4. Fasilitator membuka sesi tanya-jawab 5. Fasiliiator menutup sesi dengan menyampaikan kembali isu-isu penting dalam pemaparan narsumber pakar dan respons atau pertanyaan penting peserta. **Catatan.** Jika materi ini disampaikan *narasumber fasilitato* narasumber ini menggunakan bahan tayang Skets Kehidupan Keberagaman.
5	5 menit	**Penutup:** Fasilitator menutup sesi dengan menegaskan kembali sketsa kehidupan keberagamaan sebagai peta dan informasi untuk melakukan Penguatan Moderasi Beragama.
Total	**180 menit**	

B. Lampiran Materi

1. Hasanudin Ali, “Konteks Kehidupan Keberagamaan Umat Islam Indonesia” 2021
2. Daftar Istilah

C. Bahan Tayang

1. Sketsa Kehidupan Beragama di Indonesia

Lampiran 1

Konteks Kehidupan Keberagamaan
Umat Islam Indonesia
Hasanuddin Ali
Jakarta, April 2021

Indonesia saat ini adalah penduduk dengan populasi umat Islam terbesar di dunia

POPULASI MUSLIM DUNIA

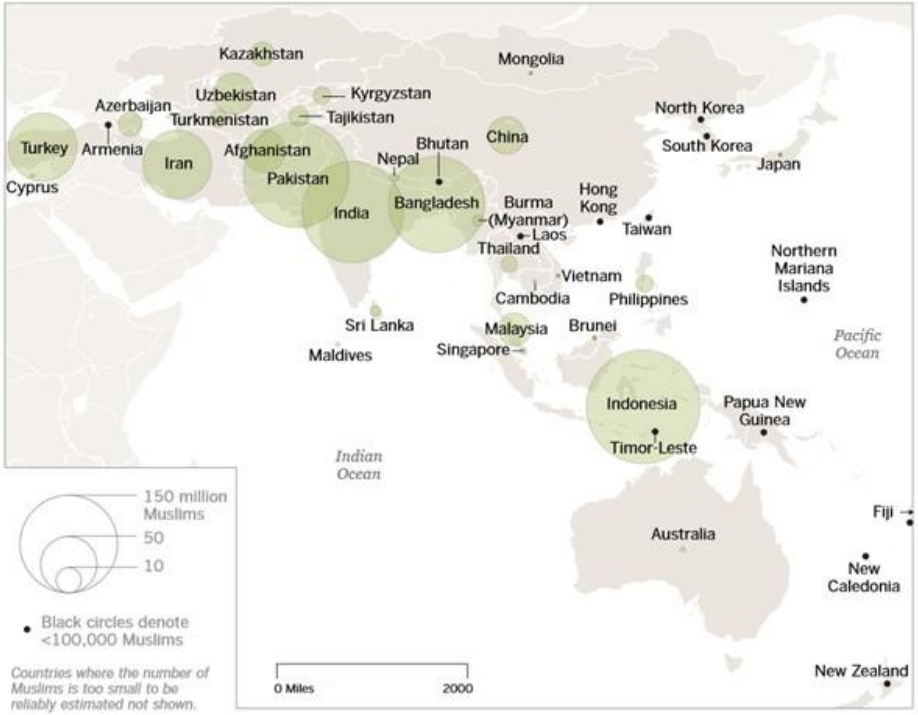

Sumber, Pew Research Center, 2015

- Populasi penduduk dunia menurut *Pew Research Center* pada tahun 2010 mencapai 6,8 milyar jiwa Prediksi tak jauh berbeda juga dikemukakan oleh *World Bank*, yang menyatakan bahwa populasi penduduk dunia pada 2010 mencapai 6,9 milyar jiwa
- Indonesia saat ini merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, pada tahun 2010 Indonesia menyumbang 13,07% penduduk Muslim dunia
- Populasi Muslim Indonesia saat ini, secara jumlah berada pada satu kluster dengan Pakistan, Bangladesh, dan India. Sedangkan negara dengan jumlah Muslim terbesar berikutnya ialah Turki dan Iran

87% penduduk Indonesia beragama Islam, sebagian besar terkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumantera

POPULASI MUSLIM INDONESIA

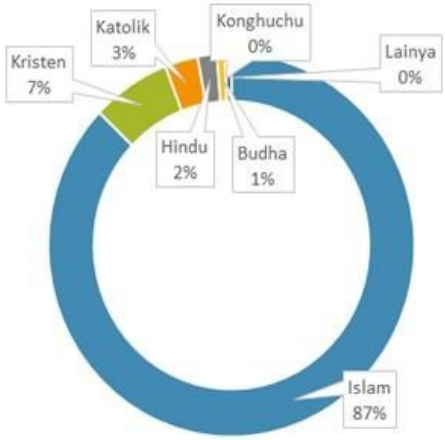

- Badan Pusat Statistik (BPS), dalam sebuah laporan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, menyatakan bahwa 87,18% penduduk Indonesia merupakan penganut agama Islam. Sisanya adalah penganut agama lain seperti Kristen 6,96%, Katolik 2,91%, Hindu 1,69%, dan Budha serta Konghuchu yang jumlahnya kurang dari 1%.
- Jika dihitung secara jumlah, maka populasi pemeluk Islam di Indonesia tahun 2010 mencapai 207,176 juta jiwa, kemudian pemeluk Kristen 16,528 juta jiwa, pemeluk Katolik 6,907 juta jiwa, pemeluk Hindu 4,012 juta jiwa, pemeluk Budha 1,703 juta jiwa, dan pemeluk Konghuchu 117.091 jiwa.

Sumber, BPS, Sensus Nasional, 20110

Penduduk muslim yang besar berasal dari provinsi-provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi

POPULASI MUSLIM INDONESIA TIAP PROVINSI

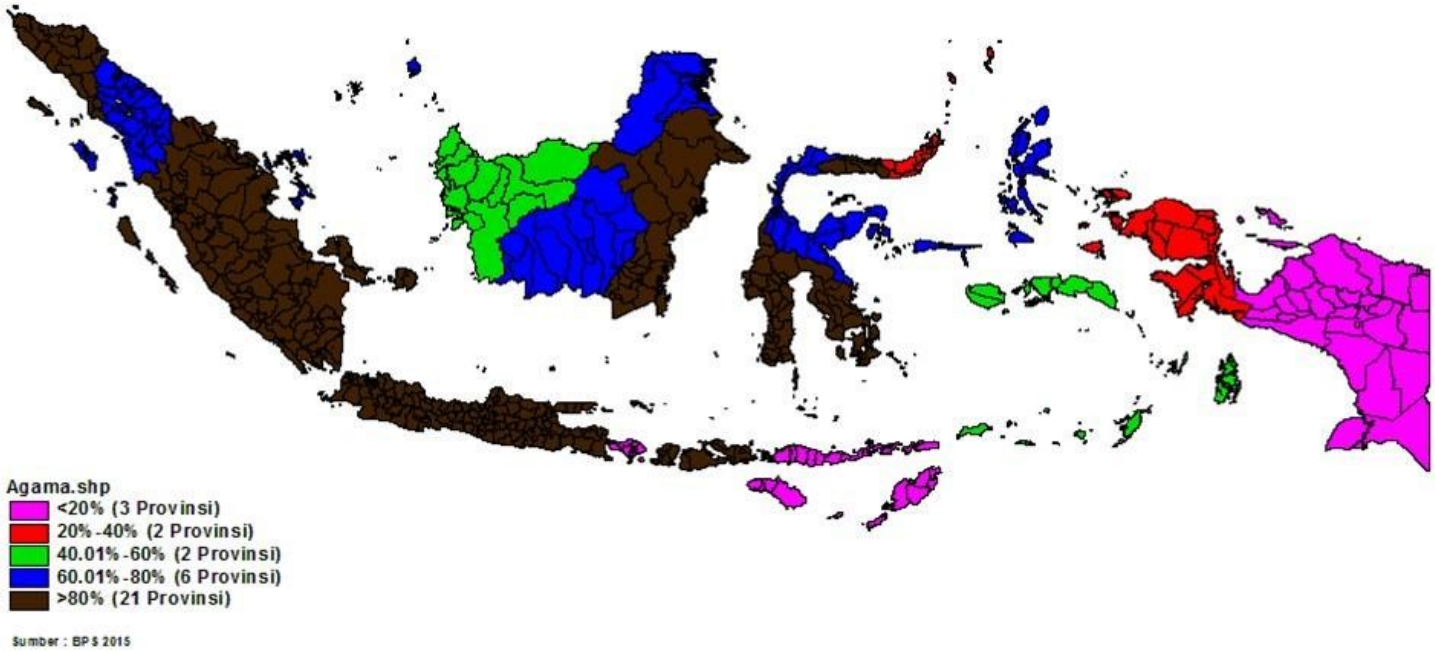

Sumber, BPS, Sensus Nasional, 2010

Indonesia masa depan akan didominasi oleh tiga entitas, masyarakat urban, kelas menengah, dan milenial

STRUKTUR DEMOGRAFI INDONESIA YANG BERUBAH

PERUBAHAN STRUKTUR DEMOGRAFI INDONESIA (3)

Dari berbagai gejala tersebut, dapat disimpulkan kondisi demografi penduduk Indonesia akan didominasi oleh

(1) kelompok urban, yakni mereka yang tinggal di daerah perkotaan.

(2) Kelompok middle-class, yakni mereka yang memiliki pengeluaran $5-$10 per hari.

(3) Kelompok millennials, yakni mereka yang saat ini berusia 17-34 tahun.

Oleh karena itu, pemimpin Indonesia ke depan harus memahami perubahan 3 karakter penduduk Indonesia tersebut.

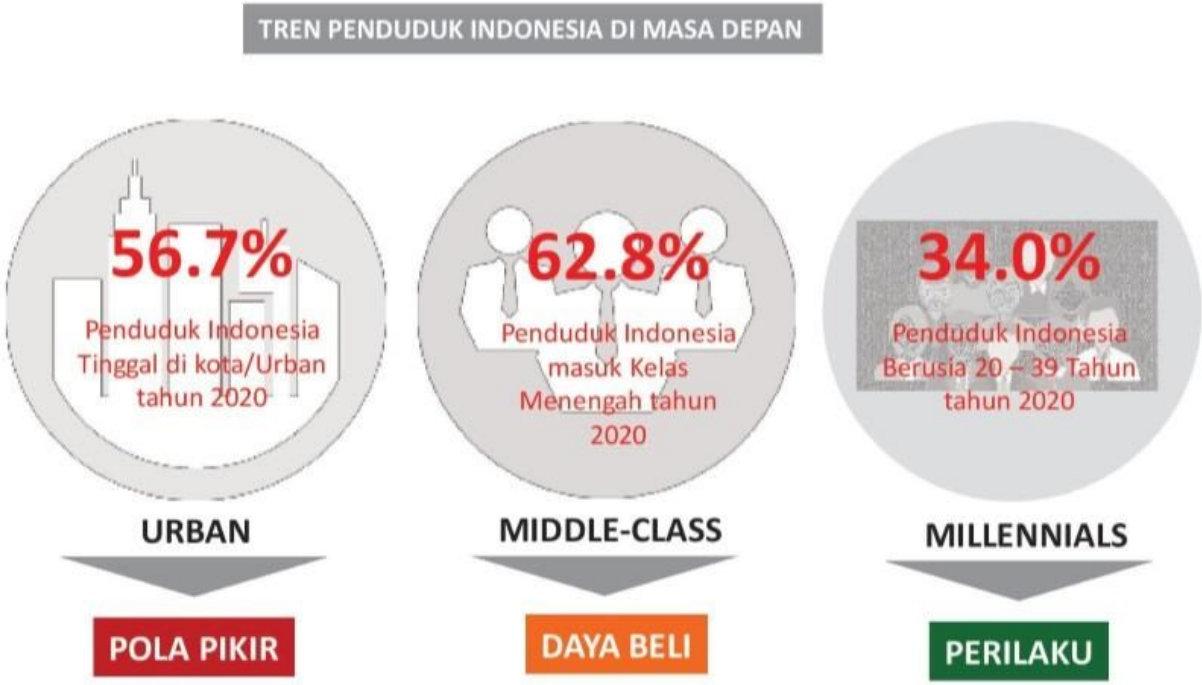

Muslim Indonesia juga akan menghadapi tumbuhnya generasi baru muslim yang jumlahnya mencapai 30 juta ditahun 2020

URBAN MIDDLE-CLASS MILLENNIAL MOSLEM

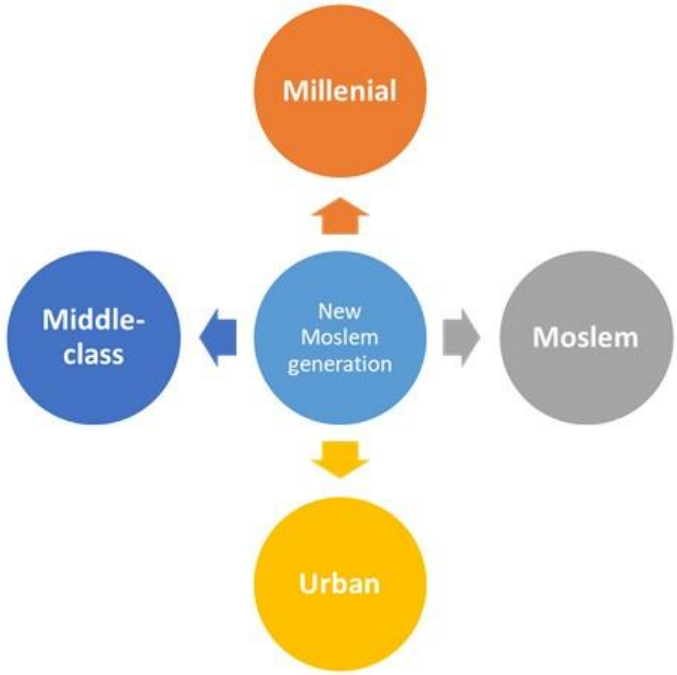

Estimasi populasi generasi muslim baru

30,59 jt

Jumlah generasi muslim baru di Indonesia pada tahun 2020 diprediksi mencapai 35 juta jiwa dengan asumsi penduduk muslim mencapai 87%.

6

Mereka memiliki karakterr tech savvy, religious, modern, dan memiliki daya beli yang tinggi

KARAKTER URBAN MIDDLE-CLASS MILLENNIAL MOSLEM

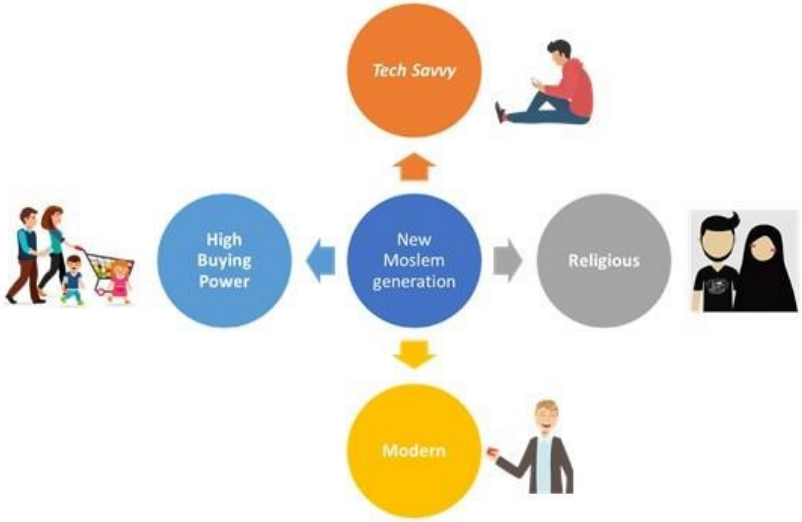

Merupakan generasi millenial muslim kelas menengah urban: Mereka berusia 18-35 tahun

Sumber: Gen M, Yuswohady, Iryan H, Hasanuddin Ali, 2017

RITUAL KEAGAMAAN DAN KEORMASAN

8

Secara umum, mayoritas umat Islam Indonesia berpendapat bahwa agama sangat penting bagi kehidupan mereka sehari-hari

TINGKAT KEPENTINGAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN [%]

	AREA						GENERASI				
	Sumatera	Jawa	Balinusra	Kalimantan	Malpapua	Sulawesi	Gen Z	Younger Milennial	Older Milennial	Younger Gen X	Older Gen X
Sangat Penting	**85.6**	78.0	54.5	**90.7**	80.0	**86.4**	77.4	80.9	**82.2**	**81.6**	**81.8**
Penting	13.7	21.6	38.6	9.3	15.0	12.6	21.8	18.2	17.4	17.5	17.7
Tidak Penting	0.7	0.4	.	.	.	.	0.4	0.3	0.4	0.9	.
Sangat Tidak Penting	.	.	6.8	.	5.0	1.0	0.4	0.6	.	.	0.5

9

Mayoritas responden melakukan tahlilan, qunut subuh, ziarah kubur, Maulid Nabi, Tarawih dengan 11 rakaat dan penentuan hari besar Islam dengan Rukyatul Hilal.

RITUAL KEAGAMAAN [%]

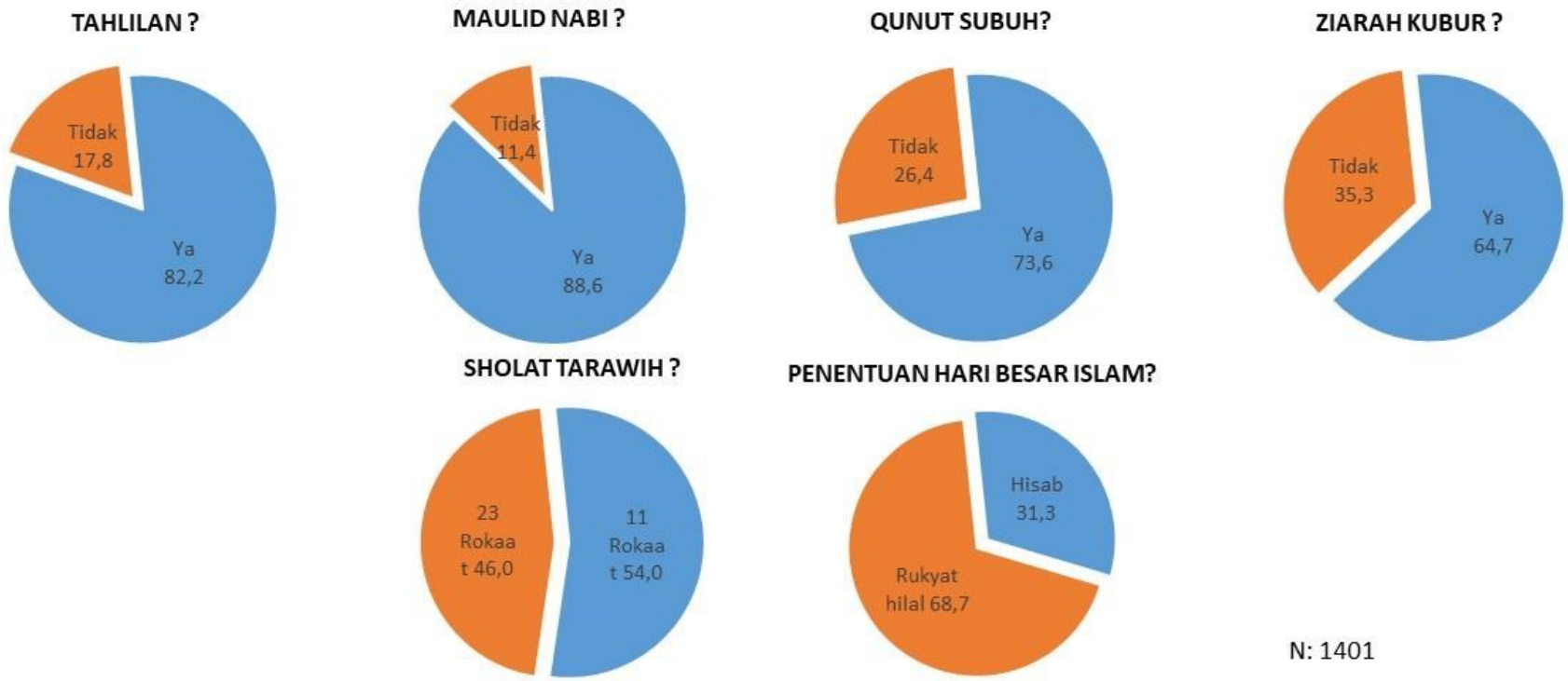

F5. Terkait ritual keagamaan, ritual keagamaan apa yang biasa anda lakukan? **(S)**

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua ormas yang paling dekat serta paling banyak menjadi anggotanya dibanding ormas yang lain.

KEDEKATAN DAN KEANGGOTAAN ORMAS [%]

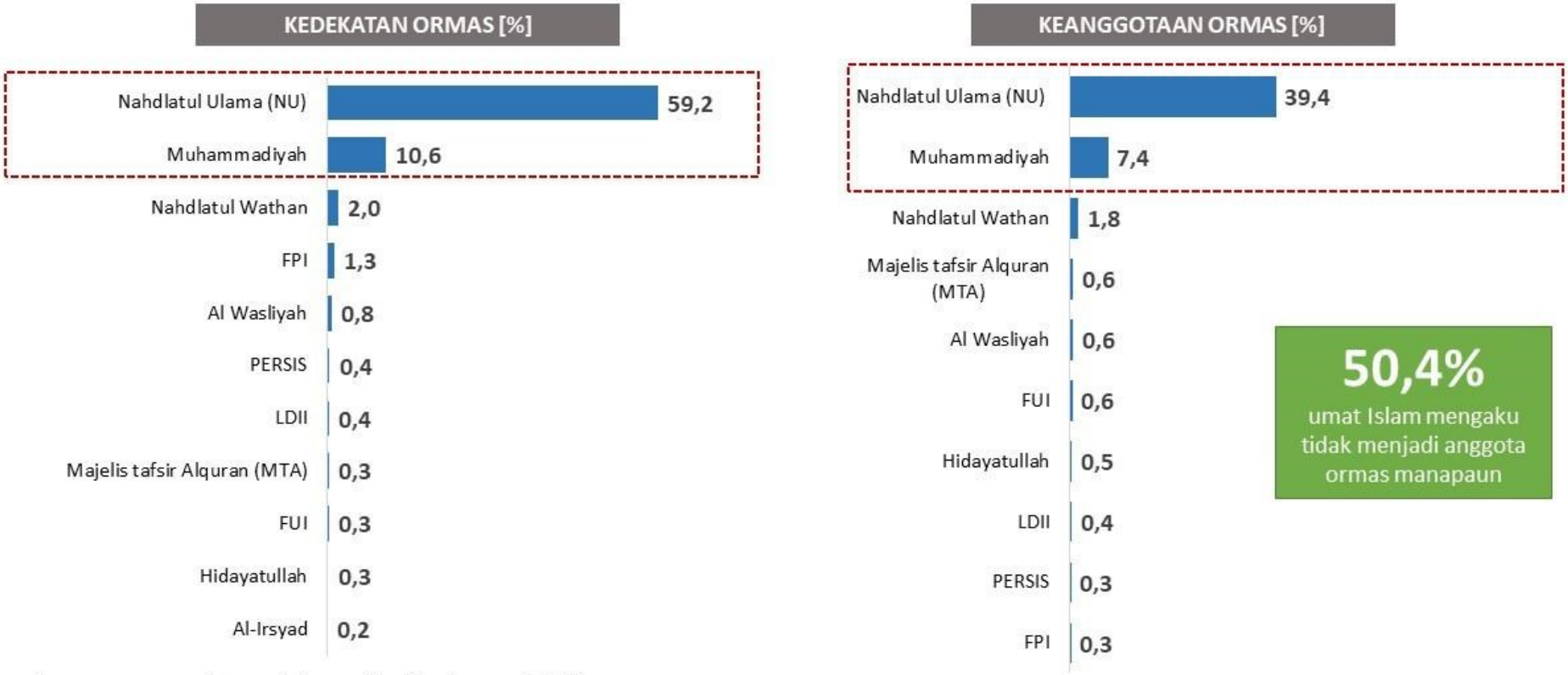

F1. d. Di antara ormas tersebut, manakah yang **paling dekat dengan Anda** ? **(S)**
e. . Manakah Ormas Islam yang Anda menjadi anggotanya? **(S/M)**

Sumber informasi keagamaan sebagian besar diperoleh dari ustadz dan keluarga, namun bagi generasi yang lebih muda sumber informasi yang berbasis internet juga tinggi

SUMBER INFORMASI KEAGAMAAN [%]

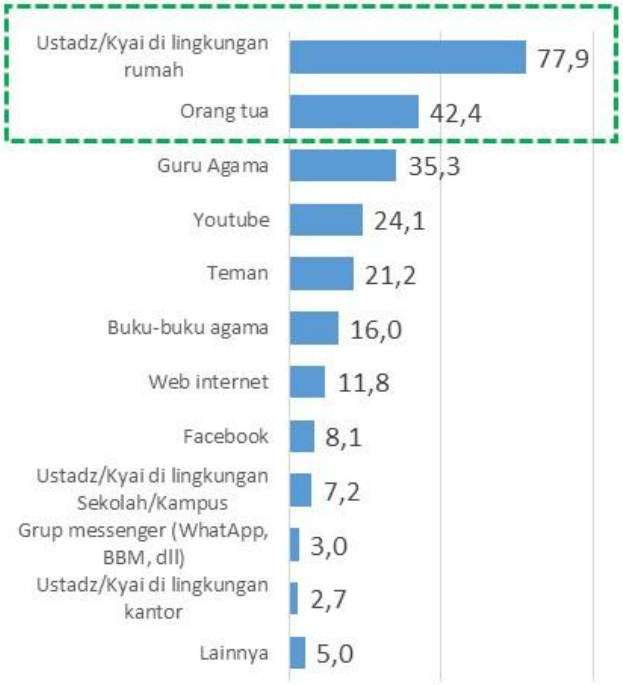

	Gen Z	Younger Milennial	Older Milennial	Younger Gen X	Older Gen X
Ustadz/Kyai di lingkungan rumah	**70.8**	**76.8**	**79.9**	**83.9**	**87.6**
Orang tua	56.4	46.9	37.5	27.2	24.4
Guru Agama	44.0	33.7	27.8	29.0	32.4
Youtube	**26.4**	**28.4**	**25.1**	18.8	16.0
Teman	18.5	19.6	18.9	22.8	30.7
Buku-buku agama	14.7	17.9	15.4	15.2	17.3
Web internet	**9.8**	**17.6**	**16.2**	8.0	6.2
Facebook	**7.9**	**9.7**	**10.4**	8.0	3.6
Ustadz/Kyai di lingkungan Sekolah/Kampus	**17.8**	3.2	1.2	1.8	*
Grup messenger (WhatApp, BBM, dll)	2.9	2.6	3.5	2.2	4.0
Ustadz/Kyai di lingkungan kantor	.	2.9	3.9	3.1	2.7
Lainnya	4.4	5.9	6.2	5.4	3.1

12

Ilmu Fiqih (58,2%) dan Muamalah (54,6%) banyak dibutuhkan oleh mayoritas responden, diikuti Ilmu Sejarah Islam (28,6%).

ILMU AGAMA YANG DIBUTUHKAN

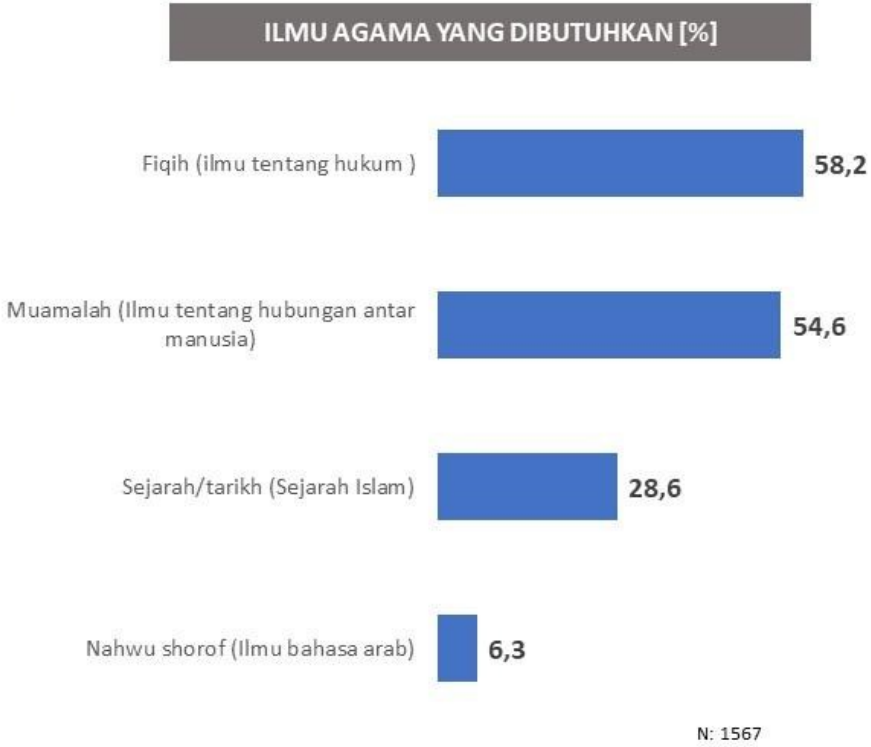

F10. Ilmu keagamaan apakah yang saat ini Anda butuhkan? **(S/M)**

13

Kompetensi penguasaan ilmu agama merupakan faktor terpenting dalam memilih ustadz rujukan

FAKTOR PERTIMBANGAN UTAMA MEMILIH USTADZ

14

SIKAP TOLERANSI BERAGAMA

15

Secara Generasi, Gen Milennial meskipun banyak yang menerima dengan terbuka, namun prosentase yang membatasi pergaulan dengan tetangga beda agama lebih besar dibandingkan dengan generasi yang lain .

TETANGGA BEDA AGAMA – by GENERASI

TETANGGA BEDA AGAMA	GENERASI				
	Gen Z	Younger Milennial	Older Milennial	Younger Gen X	Older Gen X
Total Responden	**475**	**336**	**260**	**213**	**231**
Menerima dengan terbuka, bahkan membantunya	82,3	80,4	81,5	85,4	87,0
Menerima tetapi membatasi pergaulan dengannya	16,8	18,8	17,7	13,1	13,0
Tidak mau menerima dan tidak mau membantu	0,2	0,9	0,4	0,9	.
Menerima tetapi tidak mau membantu jika ada kesulitan	0,6	.	0,4	0,5	.
Total	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

E7. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana menurut anda apabila bertetangga yang berbeda agama dengan anda? **(S)**

16

Mayoritas responden mendukung apabila ada pembangunan tempat ibadah agama lain, untuk yang tidak mendukung hanya 19,2%.

PERSEPSI TERHADAP PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH AGAMA LAIN [%]

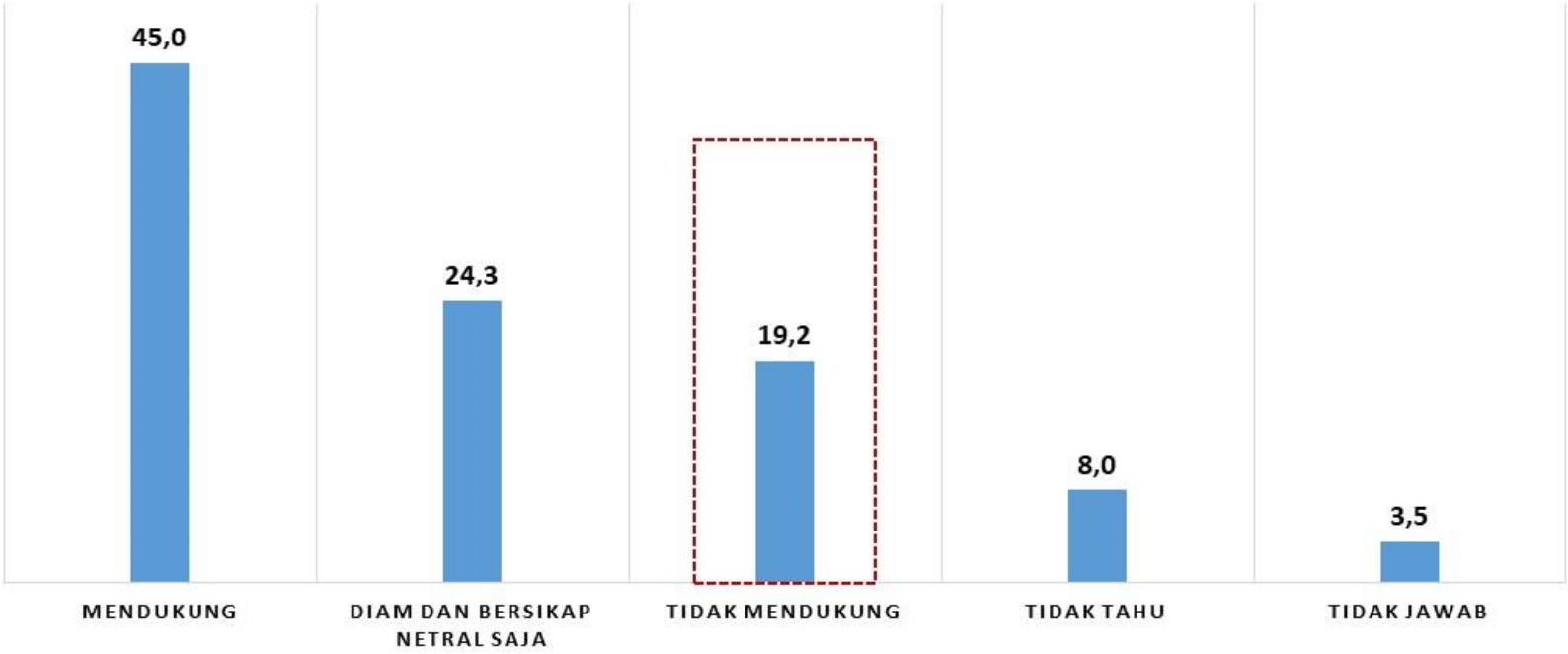

N: 1566

17

F17. Apakah Anda mendukung bila didaerah ini didirikan rumah ibadah agama lain, yang telah mendapatkan ijin dari pemerintah daerah ? **(S)**

Secara umum, respon 36,5% muslim Indonesia terhadap tetangga yang merayakan hari besar agamanya akan memilih diam saja, dan bahkan yang tidak mengucapkan selamat ada 11,8%.

PERSEPSI TERHADAP TETANGGA MERAYAKAN HARI BESAR AGAMANYA [%]

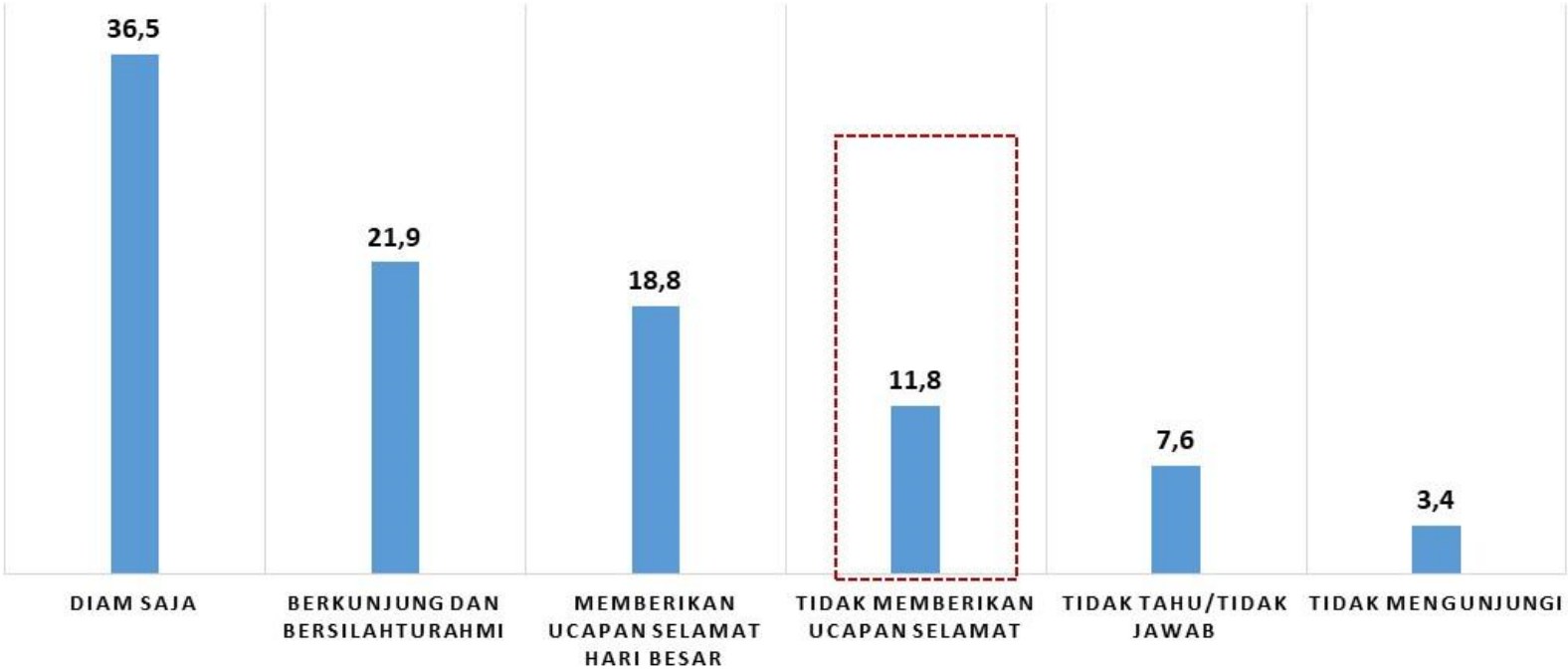

N: 1566

F18. Apa yang Anda lakukan bila ada tetangga yang berbeda agama merayakan hari besar agamanya? **(S)**

18

Jika muslim Indonesia diberi pilihan membantu bencana alam di Palestina atau di wilayah Indonesia Timur yang mayoritas non muslim, terdapat 28,4% lebih memilih membantu Palestina dan 16,5% yang tidak menjawab.

INDONESIA TIMUR VS PALESTINA [%]

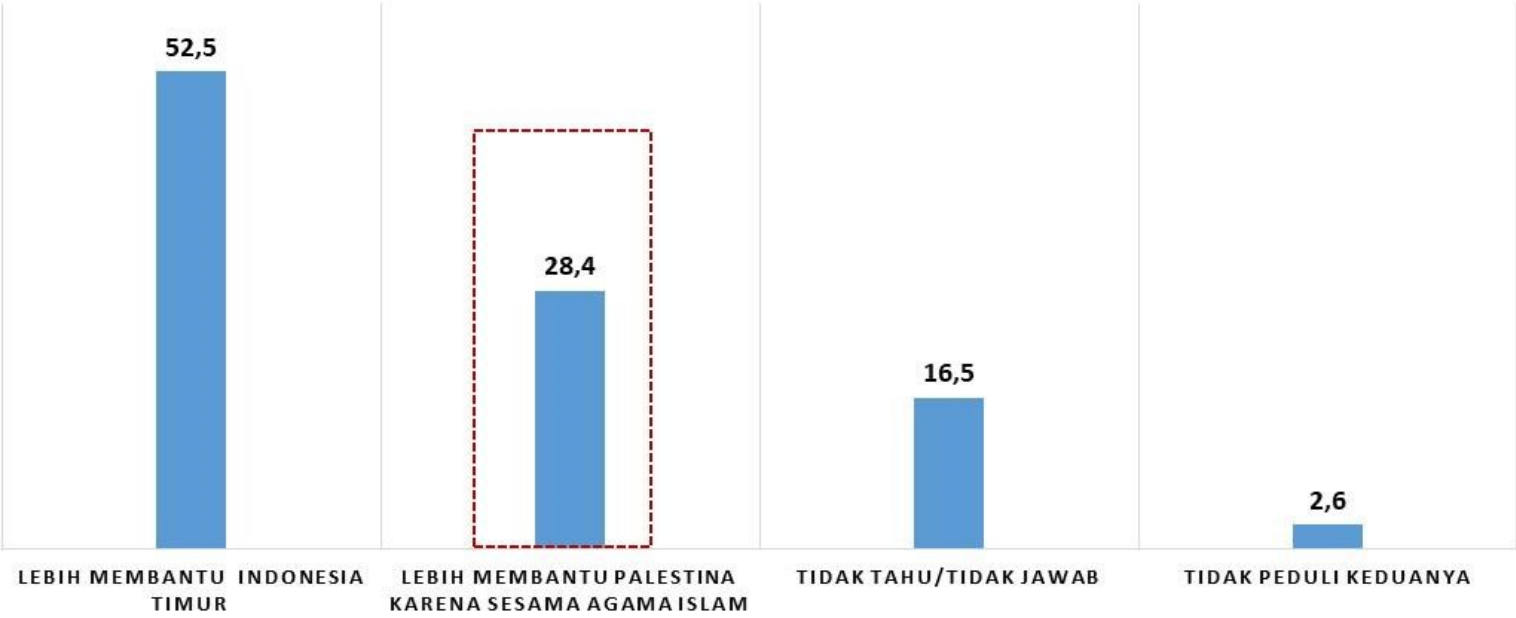

N: 1566

19

F15. Bila ada bencana alam di Palestina dan bencana alam di Indonesia Timur yang mayoritas bukan beragama Islam, siapa yang akan Anda dibantu ? **(S)**

Mayoritas responden melihat bahwa Ahmadiyah (36,7%), Syiah (31%) dan HTI (22,2%) adalah tiga aliran teratas yang dianggap menyimpang.

ALIRAN MENYIMPANG [%]

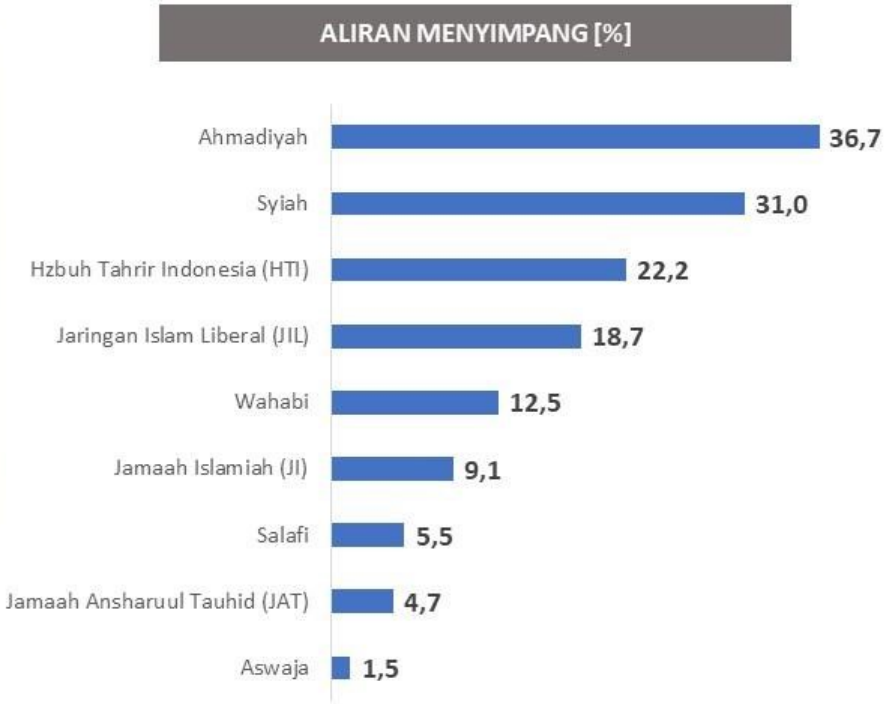

N: 1566

F24. **[SWOCARD]** Manakah yang menurut Bapak/Ibu/Saudara aliran yang menyimpang? **(S/M)**

20

Mayoritas umat Islam Indonesia masih Moderat (56,7%), namun perlu juga diwaspadai adanya 11,6% muslim yang berada pada kategori Ultra-konsertavif.

TIPOLOGI KEAGAMAAN(PANDANGAN & PERILAKU AGAMA)

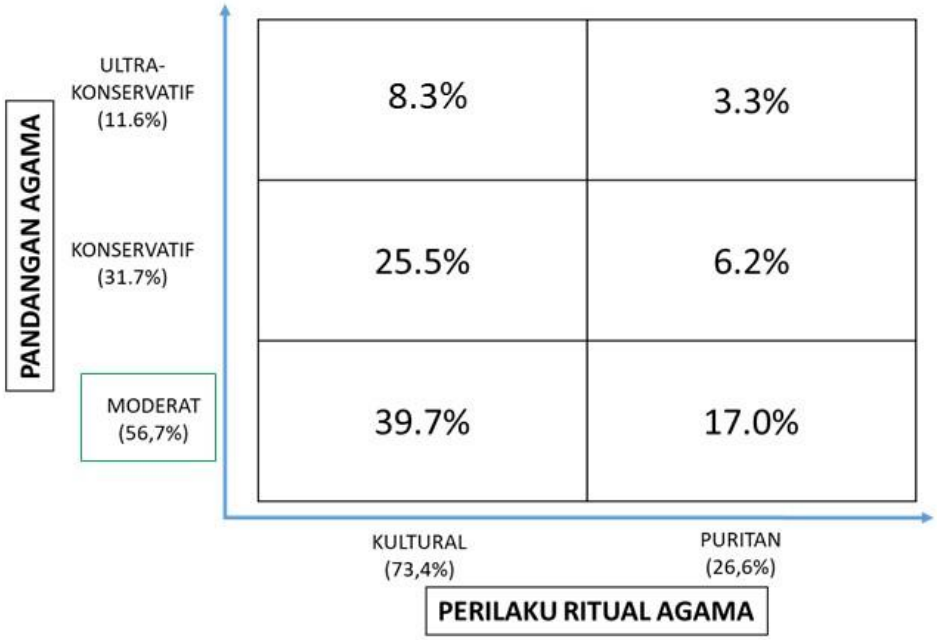

- Tipologi Kultural-Moderat, secara generasi 45,6% adalah Gen Older Milenial dan Gen X dan 64.3% berasal dari Jawa.
- Tipologi Puritan-Moderat, secara generasi 58.4% adalah GenZ dan Younger Milenial X dan 68.2% berasal dari Jawa.
- Tipologi Puritan-Ultra Konservetif, secara generasi 57.7% adalah GenZ dan Younger Milenial dan 40.0% berasal dari Sumatera.

21

Pada kategori Ultra Konservatif yang perlu diwaspadai ini, Tipologi Puritan – Ultra Konservatif paling besar berasal dari generasi milenial muda

PROFIL TIPOLOGI KEAGAMAAN BERDASARKAN GENERASI

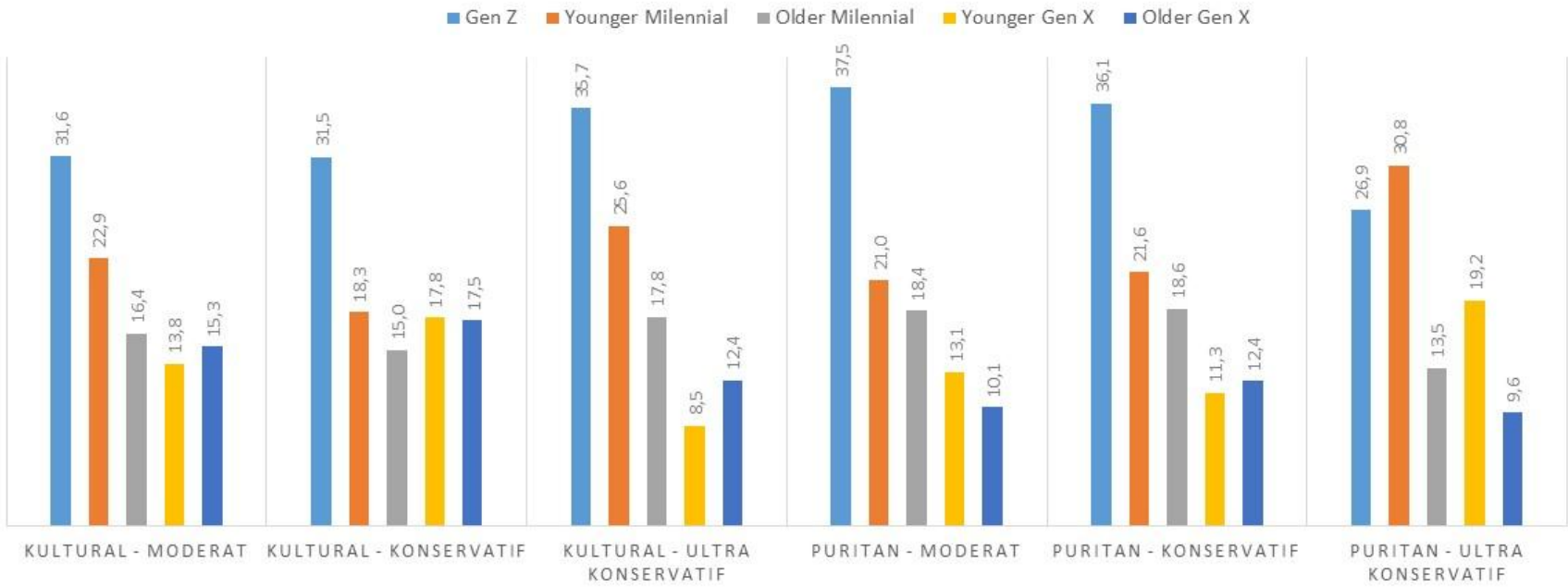

22

KEY-INSIGHT

- Agama menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat muslim Indonesia, baik kehidupan yang bersifat *duniawi mapun ukhrowi*. Semangat keagamaan yang tinggi ini tidak hanya terjadi kalangan muslim dewasa dan tua tapi juga dikalangan muslim muda. Ini kemudian melandasi semangat "hijrah" yang sedang menjadi trend saat ini.
- Semangat keagamaan yang tinggi ini pula tercermin juga dari semangat mereka dalam menjalankan perintah agama baik ibadah yang bersifat wajib maupun sunnah. Ritual keagamaan yang dijalankan umat Islam Indonesia mayoritas adalah ritual keagamaan tradisi yang sudah dijalankan turun temurun yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu.
- Islam Moderat masih menjadi *mainstream* ormas-ormas Islam di Indonesia. Hal ini tercermin dari NU dan Muhammadiyah yang merupakan dua ormas yang paling banyak dikenal oleh mayoritas responden baik secara area maupun generasi. Secara kedekatan dan keanggotaan, mayoritas responden lebih dekat dan mengaku sebagai anggota dari NU serta Muhammadiyah, begitu juga dilihat secara area, keanggotaan NU banyak terdapat di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Malpapu, sedangkan Muhammadiyah banyak terdapat di Sulawesi.
- Tingkat toleransi umat Islam Indonesia terbilang masih cukup baik, meskipun terdapat resistensi yang cukup tinggi terhadap penerimaan terhadap pemimpin non-muslim di kepemimpinan publik di berbagai tingkatan.
- Secara tipologi keagamaan di Indonesia masih banyak umat Islam Indonesia yang masuk kategori kultural-moderat namun kita perlu mewaspadai mereka yang masuk kategori Puritan-Ultra Konservatif, hal ini banyak terdapat di wilayah Sumatera dan Sulawesi serta banyak terdapat di Gen Z dan Milennial muda.

23

Lampiran 2

Daftar Istilah

Eksklusivisme beragama:

Pandangan dan sikap keagamaan yang menonjolkan superioritas kelompok, menutup diri, dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain yang berbeda keyakinan.

Intoleransi:

Pandangan dan sikap yang tidak menyukai, memusuhi, dan secara sengaja mengganggu kelompok lain yang berbeda suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, jenis kelamin, dan disabilitas.

Ekstremisme beragama:

keyakinan dan/atau praktik beragama ultra-konservatif yang bertujuan meniadakan kehadiran pandangan dan keyakinan kelompok lain yang berbeda keyakinan dengan atau tanpa kekerasan.

Ekstremisme kekerasan:

Keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan politik, agama, sosial, maupun ekonomi.

Terorisme:

Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan

Radikalisme:

pandangan dan/atau tindakan yang berupaya membongkar sistem yang sudah mapan dan ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan dan/atau melawan hukum.

Radikalisme Beragama:

Keyakinan dan/atau praktik beragama yang berupaya membongkar sistem yang sudah mapan dan ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan dan/atau melawan hukum.

Lampiran

SUBSTANTIF-INKLUSIF VERSUS LEGAL EKSKLUSIF

Dalam paradigma pemikiran politik Islam yang substantif-inklusif, secara umum ditandai dengan keyakinan bahwa Islam sebagai agama tidak merumuskan konsep-konsep teoritis yang berhubungan dengan politik. Adapun ciri-ciri yang menonjol pada pemikiran substantif-inklusif ada empat. *Pertama*, adanya kepercayaan yang tinggi bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci berisikan aspek-aspek etik dan pedoman moral untuk kehidupan manusia, tetapi tidak menyediakan detail pembahasan terhadap setiap obyek permasalahan kehidupan. Argumen utama dari pendukung paradigma ini adalah, bahwa tak ada satu pun dari ayat Al-Qur'an yang menekankan bahwa umat Islam harus mendirikan negara Islam. Mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an memang memuat kandungan etika dan panduan moral untuk memimpin masyarakat politik, termasuk bagaimana menegakkan keadilan, kebebasan, kesetaraan, demokrasi, dan lain-lain.

Kedua, pendukung paradigma substantif-inklusif meyakini bahwa misi utama Nabi Muhammad bukanlah untuk membangun kerajaan atau negara. Tetapi seperti halnya para nabi lainnya, yakni mendakwahkan nilai-nilai Islam dan kebajikan dengan demikian misi Nabi Muhammad tidak perlu diartikan sebagai langkah untuk membangun negara atau sistem pemerintahan tertentu. Meminjam ungkapan pemikir Mesir Husain Fawzi al-Najjar, *concern* utama Nabi Muhammad ketika menyebarkan Islam adalah lebih tertuju pada upaya untuk mempersatukan para pemeluk Islam (*al-wihda al-ijtimai*) daripada membangun sebuah negara atau sistem pemerintahan. Kenyataan kemudian terbukti bahwa sesudah Nabi Muhammad wafat, diperlukan waktu beberapa hari untuk melakukan musyawarah dan memutuskan siapa penggantinya, yang kemudian terpilih Abu Bakar. Sementara pergantian kepemimpinan para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali semuanya melalui sistem dan mekanisme yang berbeda.

Ketiga, para proponen paradigma substantif-inklusif berpendapat bahwa syari'at tidak dibatasi atau terikat oleh negara. Demikian pula syari'at tidak berkaitan dengan gagasan-gagasan spesifik yang berkaitan dengan pemerintahan atau sistem politik. Karena Islam dipandang semata-mata sebagai agama dan bukannya sebuah sistem yang berkaitan dengan tertib negara, syari'at seharusnya tidak diletakkan ke dalam domain negara, tetapi tetap diletakkan dalam kerangka sistem keimanan Islam. Menurut Al-Ashmawi, mantan hakim agung Mesir yang juga dikenal sebagai pemikir progresif Islam terkemuka, bahkan Al-Qur'an sendiri menetapkan bahwa syari'at adalah sumber dari orientasi etika Islam dan tidak berhubungan dengan ajaran yang berkaitan dengan bentuk-bentuk negara. Syari'at adalah sebuah jalan dan gerak langkah yang selalu dinamis dan membawa manusia pada tujuan-tujuan yang benar dan orientasi-orientasi etis yang mulia.

Keempat, refleksi para pendukung paradigma substantif-inklusif dalam bidang politik pada dasarnya adalah melakukan upaya yang signifikan terhadap pemikiran dan orientasi politik yang menekankan manifestasi substansial dari nilai–nilai Islam *(Islamic injuctions*) dalam aktivitas politik. Bukan saja dalam penampilan, tetapi juga dalam format pemikiran dan kelembagaan politik mereka. Dalam konteks Indonesia, paradigma ini cenderung untuk mengetengahkan eksistensi dan artikulasi nilai–nilai Islam yang intrinsik, dalam rangka mengembangkan wajah kultural Islam dalam masyarakat Indonesia modern. Proses kulturalisasi telah melahirkan kompetisi di antara berbagai kekuatan kultural, dan Islam hanyalah satu di antara kekuatan kultural yang bersaing itu. Agar supaya Islam dapat memenangkan persaingan itu, proses Islamisasi haruslah mengambil bentuk kulturalisasi dan bukannya politisasi.

Sementara itu, paradigma legal-eksklusif mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut. *Pertama*, paradigma legal-eksklusif dalam pemikiran politik Islam meyakini bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebuah sistem hukum yang lengkap, sebuah ideologi universal dan sistem yang paling

sempurna yang mampu memecahkan seluruh permasalahan kehidupan umat manusia. Para pendukung paradigma legal-eksklusif sepenuhnya yakin bahwa Islam adalah totalitas integratif dari "tiga d": *din* (agama), *daulah* (negara), dan *dunya* (dunia). Konsekuensinya, seperti dikemukakan oleh Nazih Ayubi, paradigma ini didisain untuk mengaplikasikan semua aspek kehidupan, mulai dari soal remeh temeh masalah keluarga hingga menjangkau semua permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya.

Kedua, dalam realitas politik, pendukung paradigma legal-eksklusif mewajibkan kepada kaum Muslimin untuk mendirikan negara Islam. Paradigma ini menghendaki agar umat Islam selalu menjadikan kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabatnya (*khulafa ar-rasyidun*) dalam mengatur tatanan kemasyarakatan, dijadikan sebagai referensi utama dan modal untuk mewujudkan "negara Islam yang ideal", dan menganjurkan penolakan sistemik terhadap konsep-konsep politik Barat. Akibatnya, paradigma ini mendorong umat Islam untuk memperkuat identitas dan ideologi mereka sebagai "alternatif" terhadap sistem-sistem yang dipandang sebagai bertentangan dengan Islam.

Ketiga, para pendukung paradigma ini meyakini bahwa syari'at harus menjadi fundamen dan jiwa dari agama, negara, dan dunia tersebut. Syari'at dengan demikian diinterpretasikan sebagai Hukum Tuhan *(Divine Law*), dan harus dijadikan sebagai dasar dari negara dan konstitusinya, serta diformalisasikan ke dalam seluruh proses pemerintahan, dan menjadi pedoman bagi perilaku politik penguasa. Selanjutnya, paradigma ini juga menegasikan adanya kedaulatan rakyat, tetapi lebih yakin terhadap kedaulatan Tuhan, yang implementasinya harus didukung oleh syari'at. Konsekuensinya, paradigma ini menerapkan visi dan missi yang menegaskan dan mewajibkan setiap Muslim untuk menegakkan syari'at, apa pun yang akan terjadi, sebagai alternatif terhadap sistem-sistem dunia yang berlaku.

Keempat, dalam konteks politik paradigma legal-eksklusif menunjukkan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung

menopang bentuk-bentuk masyarakat politik Islam yang dibayangkan (*imagined Islam polity*); seperti mewujudkan suatu "sistem politik Islam," munculnya partai Islam, ekspresi simbolis dan idiom-idiom politik, kemasyarakatan, budaya Islam, serta eksperimentasi ketatanegaraan Islam. Dalam konteks Indonesia, pendukung paradigma legal-eksklusif sangat menekankan ideologis atau politisasi yang mengarah pada simbolisme keagamaan secara formal.

Sumber: M. Syafi'i Anwar, "Islamku, Islam Anda, Islam Kita Membingkai Potret Pemikiran Politik KH Abdurrahman Wahid," dalam *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: Wahid Institute, 2006), xix-xxii.

SESI V
ANALISIS SOSIAL DENGAN *SCENARIO THINKING*

A. Pengantar

Apa yang terjadi hari ini memiliki pengaruh di masa depan. Ini berlaku dalam kehidupan keberagamaan. Sayangnya hal ini tidak selalu disadari sehingga abai terhadap fenomena dan tren keberagamaan yang berkembang. Pengabaian ini sering menyebabkan banyak pihak tidak peka dan tidak mau bertindak untuk merespons dengan tepat tren dan fenomena keberagamaan ini.

Indonesia yang dikenal hari ini sebagai bangsa yang moderar dan toleran tidak lahir bergitu saja. Indonesia yang moderat itu terbentuk karena kerja keras para pendiri bangsa, kerja pemerintah, dan kontribusi masyarakat yang selalu mempraktikkan nilai-nilai moderasi beragama. Sebaliknya, Indonesia yang tidak moderat juga karena praktik atau perilaku tidak moderat yang dilakukan dan abai direspons. Sesi ini mengajak peserta untuk membayangkan Indonesia masa depan berangkat dari kehidupan saat ini. Dengan cara ini setiap peserta dapat membayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia di masa depan.

B. Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu:

1. Mempraktikkan analisis sosial tentang masa depan Indonesia dengan scenario thinking.
2. Menilai praktik-praktik beragama yang inklusif dan eksklusif dalam kehidupan bangsa dan NKRI.
3. Menjelaskan pentingnya Moderasi Beragama dalam membangun Indonesia masa depan.

C. Pokok Bahasan

1. Skenario masa depan Indonesia berdasarkan situasi kehidupan keberagamaan saat ini.
2. Refleksi praktik beragama inklusif dan eksklusif dalam kehidupan bangsa dan NKRI
3. Pentingnya Moderasi Beragama dalam membangun Indonesia masa depan.

D. Metode

- Ceramah
- Tanya-jawab
- *Scenario thinking* melalui Diskusi kelompok

E. Waktu

90 menit (2 jam pelatihan)

F. Pralatan dan Bahan

1. LCD
2. Laptop/Komputer
3. Kertas plano
4. Kertas metaplan
5. Gunting
6. Solatip
7. Spidol besar warna-warni
8. Spidol kecil warna-warni
9. Bolpoin
10. Kertas

G. Langkah-langkah Fasilitasi

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
1	5 menit	**Pengantar** 1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi, yakni setelah mengikuti sesi ini peserta mampu: a. Mempraktikkan analisis sosial tentang masa depan Indonesia dengan *scenario thinking*. b. Menilai praktik-praktik beragama yang inklusif dan eksklusif dalam kehidupan bangsa dan NKRI. c. Menjelaskan pentingnya Moderasi Beragama dalam membangun Indonesia masa depan. 2. Fasilitator menegaskan bahwa untuk menyadari pentingnya Penguatan Moderasi Beragama peserta perlu memiliki mimpi tentang Indonesia masa depan. Untuk melakukannya peserta dapat menggunakan perangkat *scenario thinking*.
3	60 menit	***Scenario (If What) Thinking:*** 1. Fasilitator membagi forum menjadi empat kelompok dengan aktivitas *scenario (what if) thinking* dengan cara berhitung 1-4. Peserta dibagi sesuai angka yang disebutkan **Tips.** Selain dengan berhitung, fasilitator bisa membagi peserta dengan permainan menemukan teman dan kelompok dengan ketentuan berikut. 1. Ketika fasilitator berteriak "motor!" (bisa juga skuter), peserta mencari seorang peserta lain sebagai pasangannya atau satu kelompok berisi dua orang. 2. Ketika fasilitator berteriak "becak!", peserta berkelompok masing-masing tiga orang. 3. Ketika fasilitator berteriak minibus, peserta berkelompok masing-masing sepuluh orang, jika total peserta 40 orang (jumlah menyesuaikan total peserta untuk dibagi empat kelompok). Formasi terakhir adalah pembagian kelompok 2. Fasilitator memberi dua kasus: intoleran-eksklusif dan toleran-inklusif. 3. Fasilitator meminta setiap peserta mendiskusikan hal-hal berikut: a. Bila fenomena tersebut dibiarkan tumbuh apa yang terjadi di masa depan (10 tahun ke depan)?

		b. Jika tidak ada intervensi, apakah ada kemungkinan kondisi berubah? Tapi, bukan karena ada intervensi. Memikirkan gelembung (misalnya pemilihan presiden). 4. Fasilitator menegaskan bahwa apa yang akan dijawab masing-masing kelompok didasarkan berdasarkan pandangan umum (*common sense*) semata. Tidak perlu menyusun kondisi ideal dan Solusi-solusi atas tantangan tersebut. **Catatan.** Fasilitator menampilkan bahan tayang berisi gambar dan instruksi diskusi kelompok. 5. Fasilitator meminta perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 6. Fasilitator memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi paparan hasil diskusi kelompok yang sedang dipaparkan.
4	20 menit	**Refleksi: Urgensi Moderasi Beragama.** 1. Fasilitator menegaskan bahwa sesi ini tidak akan membahas lebih dalam tentang substansi materi (kasus yang didiskusikan dalam kelompok), melainkan lebih kepada praktik berpikir. 2. Fasilitator menjelaskan empat hal yang membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara: ○ Kebijakan publik dan perilaku penyelenggara negara ○ Perilaku warga masyarakat ○ Kekuatan kelompok-kelompok masyarakat sipil. ○ Paham keagamaan 3. Fasilitator menjelaskan urgensi Moderasi Beragama sebagai salah satu faktor (paham keagamaan) penting yang berkontribusi dalam membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara. **Tips.** Untuk memudahkan peemahaman peserta, fasilitator dapat menampilkan bahan tayang
5	5 menit	**Penutup:** Fasilitator menutup sesi dengan membuat ringkasan atas pokok-pokok bahasan dan menyambungkannya dengan materi-materi selanjutnya.
Total		

H. Lampiran Materi

1. Lembar Studi Kasus
2. Substantif-Inklusif versus Eksklusif-Legal Formalistik.

I. Bahan Tayang

1. Latihan *Scenario Thinking*

Lembar Studi Kasus
Perumahan Eksklusif

Saat ini banyak ditemukan perumahan yang dikembangkan sebagai hunian khusus bagi kelompok agama tertentu. Perumahan ini dikembangkan dengan aturan-aturan tertentu yang diyakini sebagai wujud dari implementasi hukum agama.

Dalam konteks perumahan eksklusif Mulim, Sosiolog Imam B. Prasojo menemukan fenomena perumahan yang hanya khusus bagi Muslim. Pemilik rumah di perumahan ini dilarang menjual rumah kecuali kepada orang yang beragama Islam. Di perumahan ini juga ada beberapa peraturan, di antaranya: tak ada musik; shalat harus berjemaah; mengaji harus di masjid perumahan; perempuan tidak boleh keluar malam; dsb.

Lembar Studi Kasus
Persahabatan Gereja-Masjid Magelang

Di beberapa daerah, ada beberapa bangunan rumah ibadah yang berdiri secara berdekatan, bahkan di atas lokasi yang sama dan berbagi halaman. Dalam situasi kehidupan keagamaan yang harmonis antar-kelompok agama, perhelatan di satu rumah ibadah dilaksanakan dalam situasi damai dan saling dukung.

Misalnya, Gereja Katolik Keuskupan Semarang menyelenggarakan kegiatan Pentakosta di Sawangan Muntilan. Kegiatan ini seperti panggung budaya dengan mengundang tokoh-tokoh agama lain. Karena dilakukan saat Bulan Ramadhan dan lokasi gereja berdampingan dengan masjid, pihak gereja “meminta ijin” ke pihak masjid, dan pihak masjid mempersilahkannya.

Panitia gereja menyediakan takjil berbuka puasa bagi kaum Muslim di masjid. Tapi takjil terlambat diantarkan karena pihak masjid sengaja tidak menggunakan pengeras suara saat azan Maghrib. Mereka mengajak Jaringan Gusdurian terlibat. Semula panitia ragu untuk menyelenggarakan. Panitia Pentakosta mendatangi masjid dan menanyakan mengapa azan tak berkumandang. Pengelola masjid mengatakan mereka sengaja tidak menyalakan pelantang suara luar, tapi hanya untuk dalam masjid. Alasan mereka karena gereja sedang ada acara.

SESI VI
ANALISIS SOSIAL DENGAN PERANGKAT ANALISIS GUNUNG ES

A. Pengantar

Ketika memahami fenomena sosial, sebagian besar kita cenderung terjebak pada apa yang tampak di permukaan. Kecenderungan seperti ini membuat kita gagal memahami struktur dan model mental yang menjadi sumber lahirnya fenomena tersebut. Analisis Gunung Es (*Iceberg Analysis*) merupakan sebuah perangkat yang berguna memahami sesuatu di balik fenomena. Dengan perangkat ini, peserta dapat menyelami lebih dalam ketimbang fenomena permukaan untuk memahami pola-pola di balik sebuah peristiwa untuk menemukan apa saja polanya, struktur sosial-budaya-politik yang melahirkannya, dan mental model yang menjadi sumbernya.

B. Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu:

1. Menganalisis praktik-praktik beragama intoleran dan ekstrem kekerasan di Indonesia.
2. Menejelaskan langkah-langkah dan konsep-konsep kunci dalam melakukan Analisis Gunung Es (*Iceberg Analysis*)
3. Mempraktikkan analisis Gunung Es terhadap fenomena intoleransi di Indonesia (fenomena, pola dan tren, sistem-struktur, dan cara paradigma/cara pandang/model mental).

C. Pokok Bahasan

1. Analisis sosial terhadap praktik beragama intoleran di Indonesia
2. Perangkat Analisis Gunung Es (*Iceberg Analysis*)

3. Analisis sosial atas kompleksitas intoleransi di Indonesia (fenomena, pola dan tren, sistem-struktur dan paradigma/cara pandang [mental model] aktor)

D. Metode

- Ceramah
- Tanya jawab dengan mentimeter
- Diskusi kelompok
- Presentasi
- Curah pendapat (*brainstorming*)
- Praktik Analisis Gunung Es (*Iceberg Analysis*)

E. Waktu

185 menit (4 jam pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

- LCD
- Komputer/Laptop
- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting
- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoin
- Kertas

G. Langkah-langkah Fasilitasi

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
1	5 menit	**Pengantar** 1. Fasilitator menjelaskan kembali urgensi Moderasi Beragama disertai dengan contoh-contoh kasus. 2. Fasilitator menekankan bahwa Moderasi Agama tidak merujuk pada agama, kelompok atau aliran tertentu, tetapi pada watak dan sikap. 3. Fasilitator mengajak peserta untuk tidak melakukan pengadilan pada kelompok tertentu berdasarkan asumsi, tapi atas praktik keberagamaan yang tidak sesuai dengan indikator Moderasi Beragama. 4. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi, yakni setelag mengikuti sesi peserta: a. Menganalisis praktik-praktik beragama intoleran dan ekstrem kekerasan di Indonesia. b. Menejelaskan langkah-langkah dan konsep-konsep kunci dalam melakukan Analisis Gunung Es (*Iceberg Analysis*) c. Mempraktikkan analisis Gunung Es terhadap fenomena intoleransi di Indonesia (fenomena, pola dan tren, sistem-struktur, dan cara paradigma/cara pandang/model mental). 5. Fasilitator mengajak peserta mempelajari cara menganalisis fenomena keberagamaan dengan menggunakan instrumen Analisis Gunung Es (*Iceberg Analysis*).
2	20 menit	**Analisis Gunung Es** 1. Fasilitator menjelaskan Analisis Gunung Es disertai dengan contoh. Fasilitator menayangkan bahan tayang Analisis Gunung Es dan Proses U 2. Fasilitator membuka sesi tanya-jawab.
3	60 menit	**Latihan Analisis Sosial dengan Perangkat Analisis Gunung Es** 1. Fasilitator mengajak peserta membuka google chrome dan mengetik *www.menti.com*.

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
		2. Fasilitator meminta peserta menyebutkan peristiwa yang menunjukkan eksklusivisme dan ekstremisme beragama di daerah peserta atau di daerah lain jika di daerah peserta tidak ada. 3. Fasilitator membaca jawaban-jawaban yang masuk. 4. Fasilitator memilih satu contoh kasus dari yang sudah disampaikan dalam *menti.com*. 5. Fasilitator mengajak peserta membuka *menti.com* dan menjawab pertanyaan: **"Apa tren/perkembangan dalam masyarakat yang menyebabkan peristiwa eksklusivisme dan ekstremisme (kasus yang dipilih)?"** 6. Fasilitator membaca dan membahas jawaban yang muncul. Di sini, fasilitator juga membenahi jawaban-jawaban peserta yang tidak sesuai berdasarkan Analisis Gunung Es. 7. Fasilitator mengajak peserta membuka *menti.com* dan menjawab pertanyaan: **"Apa saja tradisi/budaya, sistem sosial, dan kebijakan yang menyebabkan berbagai tren tersebut?**" 8. Fasilitator membaca dan membahas jawaban-jawaban yang muncul. Di sini, fasilitator juga membenahi jawaban-jawaban peserta yang tidak sesuai berdasarkan Analisis Gunung Es. 9. Fasilitator mengajak peserta membuka *menti.com* dan menjawab pertanyaan: **"Apa saja cara pandang/keyakinan yang dipegang oleh masing-masing aspek struktur/sistem?**" 10. Fasilitator membaca dan membahas jawaban-jawaban yang muncul. Di sini, fasilitator juga membenahi jawaban-jawaban peserta yang tidak sesuai berdasarkan Analisis Gunung Es.
4	60 menit	**Praktik Analisis Sosial Menggunakan Analisis Gunung Es:** 1. Fasilitator membagi peserta ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri antara 3-5 orang. 2. Fasilitator meminta setiap kelompok: a. Membaca lembar kasus kasus intoleransi dan/atau ekstremisme dan/atau eksklusivisme keagamaan yang disiapkan b. Menemukan pola, struktur penyebab, dan mental model yang melahirkan kasus tersebut. 3. Setelah selesai, fasilitator/trainer meminta perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi.

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
		4. Fasilitator memberi kesempatan kelompok lain untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi. 5. Fasilitator membaca dan membahas jawaban-jawaban yang muncul. Di sini, fasilitator juga membenahi jawaban-jawaban peserta yang tidak sesuai berdasarkan analisis Gunung Es.
6	15	**Refleksi** 1. Fasilitator melontarkan pertanyaan: Hal baru apa yang Anda dapat dengan melakukan analisis keberagamaan dengan menggunakan Analisis Gunung Es? 2. Fasilitator meminta peserta menulis jawabannya di kertas metaplan dan kemudian ditempel pada kertas plano yang tersedia. 3. Fasilitator mengulas secara singkat jawaban peserta.
7	5 menit	**Penutup** 1. Fasilitator menutup sesi dengan membuat ringkasan atas pokok-pokok bahasan, merefleksikannya dan menyambungkannya dengan materi-materi selanjutnya.
	185 menit	

H. Lampiran Materi

1. Model Analisis Gunung Es (*The Iceberg Analysis Model*)
2. Lembar Studi Kasus
   a. Penolakan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal Bogor
   b. Persekutuan Gereja-Gereja Jayapura Tolak Renovasi Masjid
   c. Siswa Tolak Hormat Bendera
   d. Pancasila Adalah *Thoghut*
   e. Penyerangan Terhadap Pengikut Syiah Sampang Madura

I. Bahan Tayang

1. Analisis Gunung Es dan Proses U

Lampiran Materi 1

Model Analisis Gunung Es (*The Iceberg Analysis Model*)

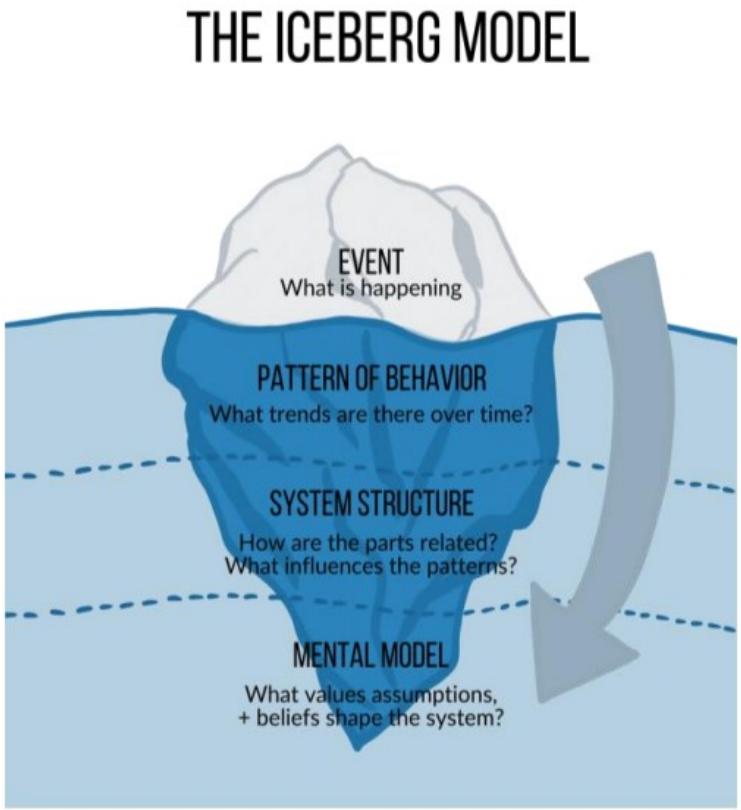

- Model analisis terhadap fenomena yang bersifat kompleks (dalam organisasi atau masyarakat), dikembangkan oleh Senge dan Hamilton.
- **Permasalahan yang tampak** adalah fenomena yang tampak terkait konteks yang dianalisis. Fenomena dalam *system thinking* diyakini disokong oleh 3 lapisan yang tidak tampak: pola/kecenderungan perilaku, struktur & sistem sosial, dan model mental (paradigma/cara pandang) dengan sumber yang biasanya bersifat sakral seperti ideologi, agama, tradisi.
- **Pola dan tren** adalah kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dan terkait langsung dengan fenomena yang tampak. Misalnya, fenomena perilaku intoleran dalam masyarakat didukung oleh pola menanaman nilai-nilai melalui pengajian dan dai-dai yang intoleran.

- **Struktur penyebab** adalah struktur dan sistem sosial yang memungkinkan pola/kecenderungan masyarakat tersebut berkembang.
- **Mental model/paradigma** adalah cara pandang, perspektif, dan paradigma pelaku/elemen sistem yang menyebabkan struktur dan sistem sosial bertahan dalam kondisi/situasi sedemikian.
- Semakin dalam lapisan yang kita analisis dan kemudian kita intervensi, semakin besar daya ungkit *(leverage*) terhadap perubahan struktural dan sistemis, yang berujung pada perubahan fenomena yang berkelanjutan.

Lampiran Materi Lembar Studi Kasus 2 a

Penolakan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal Bogor

Spanduk penolakan itu terpampang di tembok pinggir Jalan Kolonel Ahmad Syam, Kompleks IPB Baranangsiang IV. Isinya, pernyataan warga plus tokoh masyarakat di Kelurahan Tanah Baru Bogor Utara yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di wilayah mereka. Alasannya, pihak masjid tidak melakukan sosialisasi atas rencana renovasi masjid itu. Setidaknya ada empat spanduk penolakan di dekat pembangunan masjid.

Di balik penolakan, ada sentimen keyakinan yang menyinggung warga ketika masjid itu menyiarkan dakwah. Warga kerap dinyatakan bid'ah karena melakukan kegiatan maulid Nabi, salawat, dan tawasul. "Menolak dengan tegas pembangunan dan keberadaan masjid Imam Ahmad bin Hanbal" tulis warga. "Sampai Kapan pun". Muara penolakan bermula dari Warga yang kebanyakan kaum Nahdliyin merasa tersinggung dengan isi dakwah yang kerap menyerempet akidah yang selama ini dijalani warga. Apalagi kebanyakan warga Bogor Utara sering melakukan tradisi maulidan termasuk ziarah kubur dan tawasulan.

Alasan kebanyakan warga menolak masjid karena tidak menerima akidah mereka dinyatakan bid'ah. Dakwah salafi dari masjid tersebut bikin warga tersinggung lantaran tradisi keagamaan warga kerap dianggap tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Menyimpan masalah sejak awal, Masjid Imam Ahmad bin Hanbal sudah 16 tahun berdiri di wilayah lingkungan RT 05/ RW 10 itu.

Ketika pertama berdiri, warga juga sempat menyuarakan penolakan. Namun, belakangan sikap warga menjadi cair. Warga dan tokoh masyarakat memberikan izin berdirinya masjid tersebut atas dasar kesepakatan. Salah satu poin kesepakatan itu: dakwah masjid tidak menyenggol akidah yang selama ini dijalani warga, yakni tahlilan, ziarah

kubur termasuk juga maulid nabi—tradisi keagamaan yang melekat pada kalangan Nahdlatul Ulama.

Masalah menjadi sensitif ketika ada rencana renovasi masjid pada Maret 2016. Masjid lama, yang dibangun pada 2001, dirobohkan untuk dibangun empat lantai. Momentum ini menjadi pengungkit warga yang sudah gelisah dengan isi ajaran dakwah dari masjid tersebut, mendorong warga melakukan penolakan dan akhirnya memasang sejumlah spanduk di lokasi pembangunan masjid.

Warga yang tinggal di lingkungan paling dekat masjid sama sekali tak dimintai persetujuan. Penolakan warga sampai ke meja Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, politikus dari Partai Amanat Nasional. Pada Desember lalu warga beserta tokoh masyarakat Bogor Utara melakukan pertemuan di kantor Wali Kota bersama jemaah masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Hasilnya adalah pembangunan masjid "dihentikan sambil melengkapi aspek teknis dan non-teknis."

Lampiran Materi Lembar Studi Kasus 2b

Persekutuan Gereja-Gereja Jayapura Tolak Renovasi Masjid

Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) menolak renovasi Masjid Agung Al-Aqsha di Sentani, Papua. Di antara alasannya, menara masjid itu lebih tinggi dari gereja di sekitar lokasi di Jalan Raya Abepura. Penolakan itu termuat dalam sebuah surat pernyataan mengatasnamakan PGGJ dan merinci delapan poin keberatan. Selain soal menara masjid, tujuh poin lain: pelantang suara harus diarahkan ke masjid; membatasi dakwah Islam di Jayapura; melarang anak sekolah memakai seragam "bernuansa agama tertentu"; melarang "ruang khusus seperti mushalla" pada fasilitas umum; melarang pembangunan masjid dan musala di area perumahan KPR BTN; pembangunan rumah ibadah wajib mendapatkan rekomendasi bersama PGGJ, pemerintah daerah, dan pemilik hak ulayat sesuai peraturan pemerintah; serta mendesak pemerintah provinsi dan DPR Jayapura menyusun Raperda tentang "kerukunan umat beragama" di Jayapura.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua tahun 2017, pemeluk Kristen Protestan maupun Katolik berjumlah 85 %. Sementara umat Islam berjumlah 15,12 % dari total penduduk. Di Kabupaten Jayapura, umat Kristen berjumlah 59 % dari total penduduk, baik Protestan maupun Katolik. Sementara umat Islam mencapai 41 %.

Lampiran Materi Lembar Studi Kasus 2c

Siswa Tolak Hormat Bendera

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Aluran menyebut, dua siswa SMP 21 Negeri yang tidak mau memberi hormat kepada bendera merah putih diduga terpapar aliran ajaran Yehuwa.

“Kami tak permasalahkan keyakinan, persoalan pada mereka tertanam kurangnya sikap nasionalisme, kalau dibiarkan menular ke siswa lainya,” kata Hendri di Kantor DPRD Batam, Rabu (27/11/2019).

Atas dasar itu Hendri memberikan skorsing selama satu tahun, bahkan dirinya menyarankan kepada orang tua wali murid untuk memindahkan anaknya ke sekolah nonformal.

Menurut Hendri, kedua siswa tersebut terpengaruh paham menyimpang di lingkungan keluarga, sehingga terbawa ke lingkungan sekolah, dengan bersikap tidak mau menyanyikan Indonesia Raya dan memberi hormat pada merah putih.

Orang tua mengakui anaknya tidak mau memberi hormat ke bendera merah putih lantaran bersikukuh dengan keyakinan yang dipegangnya.

Lampiran Materi Lembar Studi Kasus 2d

Pancasila Adalah *Thoghut*

Narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir menolak membuat pernyataan tertulis setia pada ideologi Pancasila. Penolakan itu dikatakan penasihat hukum Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Yusril Ihza Mahendra.

Ba'asyir hanya mau setia kepada Tuhan, Allah SWT, dan tidak akan mematuhi aturan ataupun ideologi lain.

"Saya hanya setia kepada Allah, saya hanya patuh pada Allah, dan saya tidak akan patuh pada selain itu," ucap Yusril menirukan ucapan Ba'asyir saat ditemuinya di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (18/1) silam.

Ba'asyir, yang dalam catatan sejumlah sumber pernah menjadi aktivis pemuda Islam di masa mudanya, kali pertama ditangkap dan divonis penjara pada 1983.

Ba'asyir bersama Abdullah Sungkar--rekannya dalam mendirikan Ponpes di Ngruki--ditangkap dengan tuduhan menghasut dan menolak Pancasila, serta menolak hormat pada Merah Putih. Mereka lalu divonis 9 tahun penjara, namun melarikan diri ke Malaysia.

Bagi Ba'asyir Pancasila adalah *thaghut*. Umat Islam dalam pandangannya hanya boleh patuh pada Alquran dan hadis.

"Islam harus sebagai dasar negara, bukan Pancasila. Penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Islam dinilainya sebagai penguasa thaghut yang harus diingkari," kata Zaki kepada *CNNIndonesia.com*, Senin (21/1).

Ba'asyir memegang teguh konsep *hakimiyyah* hingga saat ini. Itu artinya, Allah lah sebagai pemegang kuasa, bukannya manusia lewat produk undang-undangnya.

"Jadi bahwa Ba'asyir sampai hari ini tidak mau tanda tangan kesetiaan pada Pancasila memang ideologinya semacam itu. Dia memegang teguh konsep *hakimiyyah*," ucapnya.

Ba'asyir pun memandang bahwa ideologi yang dipatuhi harus bersifat Islam yang *kaffah* atau total, tidak setengah-setengah atau sekadar model penerapan syariat Islam terbatas.

Ba'asyir pernah menyatakan bahwa model pemerintahan yang ideal adalah kekuasaan Islam ala kelompok Taliban di Afghanistan.

Sebelumnya, Ba'asyir divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2011 silam. Pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jateng itu, terbukti secara sah dan meyakinkan menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Lampiran Materi Lembar Studi Kasus 2e

Penyerangan terhadap Pengikut Syiah Sampang Madura

Perayaan lebaran ketupat warga Syiah di Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, berubah menjadi horor. Peristiwa berdarah di Pulau Madura yang menewaskan satu penganut Syiah itu terjadi pada 26 Agustus 2012.

Kepolisian menyebut, insiden itu terjadi ketika 20 anak warga Syiah di Desa Karang Gayam dan Bluuran, kecamatan Omben hendak kembali mondok di luar Sampang dengan mencarter minibus. Namun di tengah jalan, sekira pukul 10.00 WIB, rombongan santri itu dihadang puluhan orang mengaku warga Sunni dengan menaiki sekitar 30 sepeda motor.

Rombongan anak-anak warga Syiah yang baru saja menghabiskan libur lebaran Idul Fitri di kampung halamannya itu dipaksa kembali ke rumahnya. Mereka dilarang kembali belajar ke pesantren berhaluan Syiah yang ada di luar sampang.

Keributan dan perkelahian pecah hingga menimbulkan satu korban meninggal bernama Hamama. Pertikaian meluas hingga menyebabkan puluhan orang terluka dari kedua kelompok. Sekitar 45 rumah warga Syiah Desa Karang Gayam dirusak dan dibakar.

Pelaku melakukan *sweeping* terhadap warga Syiah yang akan keluar kampung, termasuk anak-anak yang hendak kembali ke pondok pesantren di luar Kota Sampang. Kejadian ini telah dilaporkan kepada aparat kepolisian, namun tidak ada tindak lanjut.

Sekitar 500 orang membawa senjata tajam berupa celurit, pedang, dan pentungan serta bom molotov berkumpul di Dusun Nangkernang, Karang Gayam. Untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan, Iklil Almilal kakak pertama Tajul Muluk (pemimpin Syiah Sampang) menelepon polisi.Kepolisian menanggapi laporan Iklil dengan mengirim lima orang personil ke lokasi.

Pelaku yang telah berkumpul mulai mengadang anak-anak warga Syiah yang mau kembali ke pesantren. Para laki-laki dewasa kelompok Syiah berusaha melindungi anak-anak dan istri mereka. Namun pelaku terus menyerang dengan lemparan batu, bom molotov, dan menikam dengan senjata tajam. Akibat penyerangan tersebut, satu orang bernama Muhammad Khosyim alias Hamama tewas, tujuh orang kritis, serta puluhan orang mengalami luka-luka.

Anak-anak Syiah dan keluarganya yang hendak mengantar ke pesantren sempat berusaha menyelamatkan diri dengan berlarian masuk ke rumahnya masing-masing. Namun massa tetap menyerang dengan merusak dan membakar rumah mereka.

Jamaah Syiah kemudian dievakuasi ke gelanggang olah raga (GOR) Sampang. Namun tidak semua warga Syiah berhasil dievakuasi karena tidak sedikit yang bersembunyi dan keberadaannya tidak diketahui.

SESI VII
NILAI-NILAI UNIVERSAL DALAM AGAMA

A. Pengantar

Ada pandangan yang tak berdasar bahwa Moderasi Beragama adalah sebuah proyek untuk mendangkalkan agama/keyakinan. Sebagai contoh, di kalangan Islam tertentu, Islam moderat dituduh sebagai proyek untuk melemahkan Islam yang lahir dari mental ketakutan terhadap Islam (*Islamophobic)*. Di kalangan ini juga berkembang narasi yang mempertentangkan antara Islam moderat dengan Islam *kaffah* yang mengusung khilafah. Narasi-narasi ini perlu direspons dengan tepat dengan cara menggali akar-akar teologi moderasi dalam ajaran agama. Pandangan tersebut juga muncul di sebagian kalangan pemeluk agama-agama lain. Sesi ini mendalami nilai-nilai universal agama yang sesungguhnya sejalan dengan nilai-nilai dasar Moderasi Beragama. Dengan cara ini, Moderasi Beragama mendapatkan pijakan teologis yang kokoh dalam ajaran agama, sekaligus merespons berbagai pandangan negatif, tuduhan, dan kesalahpahaman tentang Moderasi Beragama.

B. Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu:

1. Membedakan nilai-nilai ajaran agama universal dan partikular
2. Mengidentifikasi nilai dan ajaran universal agama-agama di Indonesia.

C. Pokok Bahasan

1. Nilai-nilai ajaran agama universal dan partikular
2. Nilai-nilai universal agama: menemukan titik temu nilai ajaran agama-agama di Indonesia

D. Metode

- Tanya-jawab
- Diskusi kelompok
- Presentasi

E. Waktu

90 menit (2 Jam Pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

- LCD
- Laptop/Komputer
- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting
- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoin
- Kertas

G. Langkah-langkah Fasilitasi

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
1	5 menit	**Pengantar:** 1. Fasilitator /trainer membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi, yakni setelah mengikuti sesi peserta mampu: ● Membedakan nilai-nilai ajaran agama universal dan partikular. ● Mengidentifikasi nilai dan ajaran universal agama-agama di Indonesia.
2	80 menit	**Nilai-Nilai Universal Agama (Antaragama)** 1. Fasilitator membagi peserta membagi peserta ke dalam beberapa kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut dan mempresentasikannya: a. Apa nilai-nilai universal yang ada dalam setiap agama terkait Moderasi Beragama? b. Apa landasan teologis di masing-masing agama terkait nilai-nilai universal tersebut? c. Apa saja penafsiran dan pandangan keagamaan yang bertentangan dengan nilai-nilai universal tersebut?

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
		Catatan. Fasilitator membagi peserta sesuai dengan agama/keyakinan mereka. Jika seluruh peserta memiliki agama/keyakinan sama, setiap kelompok membahasnya nilai dan ajaran dalam agama/keyakinan tersebut. 2. Fasilitator meminta setiap kelompok menuliskan hasil diskusi kelompok pada kertas plano yang disediakan. 3. Setelah masing-masing kelompok selesai berdiskusi kelompok, fasilitator meminta perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. 4. Setiap kali perwakilan kelompok selesai mempresentasikan, fasilitator memberi kesempatan kepada anggota kelompok tersebut menambahkan informasi dan kepada peserta dari kelompok lain untuk merespons, bertanya, atau mengklarifikasi. 5. Fasilitator mencatat poin-poin utama diskusi pada kertas plano. **Tips.** Fasilitator mencatat pertanyaan dan perdebatan penting dalam sesi presentasi dan menyampaikan kepada peserta jika isu tersebut dapat peserta tanyakan kepada narasumber pada sesi Pendalaman Landasan Teologi Agama. 6. Fasilitator menutup tahapan ini dengan membacakan ulang poin-poin utama diskusi kelompok tersebut sembari menekankan bahwa setiap agama/keyakinan memiliki ajaran universal tentang Moderasi Beragama. **Metode Alternatif** 1. Fasilitator membagi peserta menjadi 4-5 kelompok. 2. Fasilitator meminta masing-masing kelompok membaca buku Moderasi Beragama halaman 23-41 dan menuliskan intisari hasil bacaan: a. Apa nilai-nilai universal dari setiap agama yang bisa memperkuat Moderasi Beragama? b. Apa saja praktik baik masing-masing agama terkait Moderasi Beragama? c. Bagaimana pandangan agama terhadap negara Pancasila dan orang lain yang berbeda keyakinan?

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
		3. Fasilitator meminta masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 4. Fasilitator meminta peserta di luar kelompok untuk menanggapi. 5. Fasilitator merangkum hasil diskusi.
4	5 menit	**Penutup** 1. Fasilitator menutup sesi dengan menegaskan bahwa esensi dan nilai-nilai Moderasi Beragama sesungguhnya merupakan nilai-nilai universal yang ada pada setiap agama. Keduanya tidak saling bertentangan. Moderasi Beragama justru berusaha mengejawantahkan nilai-nilai universal tersebut. Dengan kata lain, nilai Moderasi Beragama memiliki landasan dalam ajaran-ajaran agama.
Total	**90 menit**	

H. Lampiran Materi

1. "Landasan Moderasi Berbagai Agama", dalam Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2019)

Lampiran Materi

Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama

Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang Maha Pencipta. Penghambaan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam kesiapan mengikuti petunjuk-Nya dalam kehidupan. Manusia menjadi hamba hanya bagi Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain, dan juga tidak diperhambakan oleh yang lain. Di sinilah esensi nilai keadilan antarmanusia sebagai sesama makhluk Tuhan.

Manusia juga menjadi hamba Tuhan yang diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi, sebagai makhluk yang diciptakan dengan keunggulan budi pikir. Bumi perlu dikelola agar tercipta kemaslahatan bersama. Inilah salah satu visi kehidupan terpenting dan terkuat yang diajarkan agama.

Karena keterbatasan manusia, maka bangsa dan negara menjadi konteks ruang lingkup tugas ini: bagaimana manusia mengelola bumi di mana ia tinggal, agar tercapai kemaslahatan bersama yaitu bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sentosa. Kerangka pikir ini dapat ditemukan di setiap agama dalam bentuk keyakinan bahwa mencintai negeri adalah sebagian dari keimanan. Keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan justru menjadi modal besar bagi kemaslahatan bangsa.

Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman kita. Dalam berkhidmat membangun bangsa dan negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tenteram dan menentramkan. Bila ini dapat kita wujudkan, maka setiap warga negara dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya, sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya.

Seperti telah dikemukakan, ajaran untuk menjadi moderat bukanlah semata milik satu agama tertentu saja, melainkan ada dalam tradisi berbagai agama dan bahkan dalam peradaban dunia. Adil dan berimbang, yang telah dijelaskan sebelumnya, juga sangat dijunjung tinggi oleh semua ajaran agama. Tidak ada satu pun ajaran agama yang menganjurkan berbuat aniaya/zalim, atau mengajarkan sikap berlebihan.

Ajaran *wasathiyah*, seperti telah dijelaskan pengertiannya, adalah salah satu ciri dan esensi ajaran agama. Kata itu memiliki, setidaknya, tiga makna, yakni: pertama bermakna tengah-tengah; kedua bermakna adil; dan ketiga bermakna yang terbaik. Ketiga makna ini tidak berarti berdiri sendiri atau tidak saling berkaitan satu sama lain, karena sikap berada di tengah-tengah itu seringkali mencerminkan sikap adil dan pilihan terbaik.

Contoh yang mudah dicerna dalam kehidupan sehari-hari adalah kata "wasit". Ia merupakan profesi seseorang yang menengahi sebuah permainan, yang dituntut untuk selalu berbuat adil dan memutuskan yang terbaik bagi para pihak. Contoh lain, kedermawanan itu baik, karena ia berada di tengah-tengah di antara keborosan dan kekikiran. Keberanian juga baik karena ia berada di tengah-tengah di antara rasa takut dan sikap nekad. Demikian seterusnya.

Dari sejumlah tafsiran, istilah "*wasatha*" berarti yang dipilih, yang terbaik, bersikap adil, rendah hati, moderat, *istiqamah*, mengikuti ajaran, tidak ekstrem, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan duniawi atau akhirat, juga tidak ekstrem dalam urusan spiritual atau jasmani, melainkan tetap seimbang di antara keduanya. Secara lebih terperinci, *wasathiyah* berarti sesuatu yang baik dan berada dalam posisi di antara dua kutub ekstrem. Oleh karena itu, ketika konsep *wasathiyah* dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak akan memiliki sikap ekstrem.

Dalam berbagai kajian, '*wasathiyat Islam'*, sering diterjemahkan sebagai '*justly - balanced Islam'*, *'the middle path'* atau '*the middle way*' *Islam*, di mana Islam berfungsi memediasi dan sebagai penyeimbang. Istilah-istilah ini menunjukkan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta

jalan tengah untuk tidak terjebak pada ekstremitas dalam beragama. Selama ini konsep *wasathiyat* juga dipahami dengan merefleksikan prinsip moderat (*tawassuth*), toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), dan adil (*i`tidal*). Dengan demikian, istilah *ummatan wasathan* sering juga disebut sebagai *'a just people'* atau '*a just community*', yaitu masyarakat atau komunitas yang adil.

Kata *wasath* juga biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan arti *khiyar* (pilihan atau terpilih). Jika dikatakan, "ia adalah orang yang *wasath*", berarti ia adalah orang yang terpilih di antara kaumnya. Jadi, sebutan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* itu adalah sebuah harapan agar mereka bisa tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Baik dalam beribadah sebagai individu maupun dalam berinteraksi sosial sebagai anggota masyarakat, Islam mengajarkan untuk selalu bersikap moderat. Ajaran ini begitu sentral dalam dua sumber utama ajaran Islam, Alquran dan hadis Nabi. Salah satu ayat misalnya mengatakan:

> *"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu". (al-Baqarah, 2: 143)*

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa atribut *wasathiyah* yang dilekatkan kepada komunitas muslim harus ditempatkan dalam konteks hubungan kemasyarakatan dengan komunitas lain. Seseorang, atau sebuah komunitas muslim, baru dapat disebut sebagai saksi (*syahidan*) manakala ia memiliki komitmen terhadap moderasi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Karenanya, jika kata *wasath* dipahami dalam konteks moderasi, ia menuntut umat Islam menjadi saksi dan sekaligus disaksikan, guna menjadi teladan bagi umat lain, dan pada saat yang sama mereka menjadikan Nabi

Muhammad saw. sebagai panutan yang diteladani sebagai saksi pembenaran dari seluruh aktivitasnya.

Dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya komitmen seseorang terhadap moderasi sesungguhnya juga menandai sejauh mana komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan. Semakin seseorang moderat dan berimbang, semakin terbuka peluang ia berbuat adil. Sebaliknya, semakin ia tidak moderat dan ekstrem berat sebelah, semakin besar kemungkinan ia berbuat tidak adil. Hal inilah yang menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad saw. sangat mendorong agar umatnya selalu mengambil jalan tengah, yang diyakini sebagai jalan terbaik. Dalam sebuah hadisnya, Nabi mengatakan:

"Sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya"

Di Indonesia, diskursus *wasathiyah* atau moderasi sering dijabarkan melalui tiga pilar, yakni: moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan.

Terkait pilar yang pertama, pemikiran keagamaan yang moderat, antara lain, ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks, yaitu pemikiran keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada teks-teks keagamaan dan memaksakan penundukan realitas dan konteks baru pada teks, tetapi mampu mendialogkan keduanya secara dinamis, sehingga pemikiran keagamaan seorang yang moderat tidak semata tekstual, akan tetapi pada saat yang sama juga tidak akan terlalu bebas dan mengabaikan teks.

Pilar kedua adalah moderasi dalam bentuk gerakan. Dalam hal ini, gerakan penyebaran agama, yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran, harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi dengan prinsip melakukan perbaikan, dan dengan cara yang baik pula, bukan sebaliknya, mencegah kemungkaran dengan cara melakukan kemungkaran baru berupa kekerasan.

Pilar ketiga adalah moderasi dalam tradisi dan praktik keagamaan, yakni penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapkan secara diametral dengan budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog menghasilkan kebudayaan baru.

Diskursus moderasi tentu saja tidak hanya milik tradisi Islam, melainkan juga agama lain, seperti Kristen. Apalagi dalam konteks Indonesia, karakter keagamaan Kristen juga mengalami 'penyesuaian' dengan atmosfer kebangsaan keIndonesiaan. Dengan berbagai tantangan dan dinamikanya, tafsir ideologis kekristenan pun kemudian menemukan konteksnya di Indonesia dan mengakar menjadi bagian dari masyarakat multikultural Indonesia.

Umat Kristiani yakin bahwa Pancasila adalah yang terbaik, yang dapat menempatkan umat Kristiani sejajar di mata hukum dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, menghindarkan dari diskriminasi, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Umat Kristiani meyakini bahwa Pancasila dan UUD 1945 menjadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara yang telah memberikan jaminan bahwa masing-masing pemeluk agama diberikan keleluasaan untuk meyakini dan menjalankan keyakinannya masing-masing.

Sesungguhnya moderasi beragama menjadi signifikan tidak hanya bagi penciptaan relasi-relasi konstruktif di antara agama-agama secara eksternal, tetapi juga penting secara internal untuk menciptakan harmoni di antara berbagai aliran di dalam satu agama. Konflik internal agama tidak lebih ringan dari konflik eksternal. Karena itu, moderasi beragama secara internal juga penting untuk dikembangkan melalui langkah-langkah strategis dengan melibatkan dan memaksimalkan peran semua pihak.

Dalam tradisi Kristen, moderasi beragama menjadi cara pandang untuk menengahi ekstremitas tafsir ajaran Kristen yang dipahami sebagian umatnya. Salah satu kiat untuk memperkuat moderasi beragama adalah melakukan interaksi semaksimal mungkin antara agama yang satu dengan

agama yang lain, antara aliran yang satu dengan aliran yang lain dalam internal umat beragama.

Dalam Alkitab sebagaimana menjadi keyakinan bagi umat Kristiani telah banyak diceritakan betapa Yesus adalah sang juru damai. Bahkan dalam Alkitab bisa dilihat bahwa tidak satu pun ayat yang mengindikasikan bahwa Yesus pernah mengajak orang untuk membuat kerusakan, kekerasan apalagi peperangan. Dalam Alkitab tidak sedikit ayat yang mengajarkan cita-cita untuk mewujudkan kedamaian di muka bumi ini. Kata kunci yang digunakan dalam Alkitab ketika berbicara tentang konteks kedamaian di antaranya menggunakan kata kebebasan, hak, hukum, kedamaian, memaafkan/mengampuni, kejujuran, keadilan, dan kebenaran.

Moderasi beragama juga dapat dilihat dalam perspektif Gereja Katolik. Gereja menyebut diri “persekutuan iman, harapan dan cinta kasih”. Ketiga keutamaan ini, yang pada dasarnya satu, merupakan sikap dasar orang beriman. Iman yang menggerakkan hidup, memberi dasar kepada harapan dan dinyatakan dalam kasih. Ketiganya bersatu, tetapi tidak seluruhnya sama.

Gereja universal telah merancang perspektif baru dalam membangun relasi dengan agama-agama lain melalui momentum Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II menjadi salah satu momen penting kebangkitan semangat beragama inklusif dalam membangun persaudaraan universal dalam abad modern. Dekrit penting dalam Konsili Vatikan II yang menandai sikap Gereja terhadap agama-agama lain di dunia adalah *Nostrae Aetate*. Dekrit ini secara khusus berbicara tentang hubungan Gereja dengan agama-agama bukan Kristen. Gereja dalam dekrit *Nostra Aetate* menandaskan bahwa “Gereja Katolik tidak menolak apa pun, yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci".

Dengan sikap hormat yang tulus Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran, yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkan sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran, yang menerangi semua

orang. Melalui dekrit *Nostra Aetate* (NA) Gereja telah menggagas babak baru sejarah pengakuan realitas pluralisme religius dan ingin membuka diri terhadap kebenaran yang terdapat dalam agama-agama nonkristen. Dalam konteks Gereja Indonesia, hal yang paling mendesak adalah bagaimana kita membangun jembatan yang kokoh untuk menghubungkan "perbedaan" antaragama menuju persaudaraan nasional yang kokoh. Salah satu gagasan paling relevan adalah melalui dialog antarumat beragama. Melalui dialog ini kiranya dapat bermanfaat bagi pemulihan dan perwujudan hubungan antaragama yang kerap kali dilanda oleh berbagai konflik.

Peta agama-agama di Indonesia menunjukkan adanya perjumpaan antara aneka bentuk keagamaan. Semua hidup bersama dalam harmoni toleransi dan dialog dan semua dalam bentuk bagaimana pun mengalami pengaruh satu dari yang lain. Agama-agama di Indonesia hidup dan berkembang dalam hubungan (kadang-kadang dalam konfrontasi) satu dengan yang lain. Pengaruh itu biasanya tidak langsung, melainkan berjalan melalui bahasa dan kebudayaan yang sama. Dengan demikian, banyak istilah dan rumusan dari agama yang satu juga dipakai dalam agama yang lain, tetapi sering dengan arti yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu mengenal dan mengetahui agama-agama yang lain itu, bukan hanya demi dialog dan hubungan baik antaragama, tetapi juga supaya dengan lebih tepat mengetahui dan menyadari kekhasan dan jati diri agamanya sendiri.

Oleh Konsili Vatikan II, dialog antara Gereja Katolik dan agama-agama lain sangat didorong dan dimajukan. Umat Katolik dinasihati "supaya dengan bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerja sama dengan para penganut agama-agama lain, mengakui, memelihara dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya, yang terdapat pada mereka" (NA.2). Konsili mengharapkan supaya "dialog yang terbuka mengajak semua untuk dengan setia menyambut dorongan-dorongan Roh serta mematuhinya dengan gembira" (GS.92).

Oleh karena itu, sesudah Konsili Vatikan II dialog antaragama diadakan di mana-mana.

Dalam sebuah dokumen resmi tahun 1991, dialog dan pewartaan, malah ditegaskan bahwa “Konsili Vatikan II dengan jelas mengakui nilai-nilai positif, tidak hanya dalam hidup religius orang beriman pribadi, yang menganut tradisi keagamaan yang lain, tetapi juga dalam tradisi religius itu sendiri”. Dengan tegas Konsili Vatikan II mengatakan bahwa “di luar Persekutuan Gereja pun terdapat banyak unsur pengudusan dan kebenaran” (LG.8). Maka dialog tidak hanya berarti hubungan baik antaragama. Dalam dialog semua orang, baik yang Kristiani maupun yang lain, diajak agar memperdalam sikap iman di hadapan Allah. Dalam pertemuan dengan agama lain, justru karena berbeda, orang digugah dari kelesuan rutin supaya menemukan arah yang sesungguhnya dari iman dan kepercayaan.

Dalam Gereja Katolik istilah "moderat" tidak biasa. Yang dipakai adalah "terbuka" terhadap "fundamentalis" dan "tradisionalis" (yang menolak pembaruan dalam pengertian Gereja Katolik). Hal yang paling penting dalam Gereja Katolik adalah Konsili Vatikan II (1962-65; pertemuan semua – hampir 3.000 – uskup di Vatikan). Konsili itu mengesahkan perjalanan panjang Gereja Katolik ke pengertian diri dan kekristenan yang lebih terbuka, atau yang lebih "moderat".

Adapun dalam tradisi Hindu, akar ruh moderasi beragama, atau jalan tengah, dapat ditelusuri hingga ribuan tahun ke belakang. Periode itu terdiri dari gabungan empat *yuga* yang dimulai dari *Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga* dan *Kali Yuga*. Dalam setiap Yuga umat Hindu mengadaptasikan ajaran-ajarannya sebagai bentuk moderasi. Untuk mengatasi kemelut zaman dan menyesuaikan irama ajaran agama dengan watak zaman, moderasi tidak bisa dihindari dan menjadi keharusan sejarah.

Praktik agama yang dilaksanakan umat Hindu Indonesia pada zaman modern seperti sekarang ini adalah *Puja Tri Sandhya* dan *Panca Sembah*. Keduanya menjadi poros utama pembangunan peradaban Hindu Indonesia

sejak terbentuknya Parisadha di tahun 1960-an. Praktik kedua teologi ini berkelindan dengan banyak praktik agama Hindu lain. Seni dan ritual menjadi penunjang yang menyemarakkan *Puja Tri Sandhya* dan *Panca Sembah*.

Dalam Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah, Tuhan menjadi objek tertinggi pemujaan. Demikian juga, pemujaan kepada leluhur tetap dipertahankan sejak zaman prasejarah. Dewa-dewa utama dan spirit alam tidak bisa dikesampingkan dalam tradisi pemujaan umat Hindu Indonesia. Sebelum era Parisadha, yang menonjol dalam pemujaan Hindu adalah leluhur, setelah era parisdha, rupanya pencarian kebenaran menemukan kembali Tuhan sebagai objek pemujaan. Tetapi pemujaan kepada leluhur pengamalan ajaran agama di kalangan umat Hindu, terutama dalam mengatasi zaman modern. Pada waktu itu digagas model pembinaan Sa Dharma atau enam Dharma yang meliputi: Dharma Tula, Dharma Sadhana, Dharma Yatra, Dharma Gita, dan Dharma Shanti. Bahkan, Dharma Gita menjadi salah satu model pembinaan umat Hindu Indonesia.

Moderasi beragama di kalangan umat Hindu diarahkan untuk memperkuat kesadaran individu dalam mempraktikkan ajaran agama. Selama ini, umat Hindu lebih banyak melaksanakan ajaran agama secara komunal (kebersamaan). Baik individual maupun komunal keduanya diperlukan dalam praktik keagamaan. Manusia pada zaman modern menghadapi masalah yang kompleks. Agama harus memberi solusi terhadap masalah sosial yang dihadapi manusia. Harus ada penguatan praktik agama secara individual karena manusia mengalami kesepian dan keterasingan sosial di tengah-tengah masyarakat modern. Bertapa dengan mengucapkan nama suci Tuhan merupakan praktik keagamaan yang patut diperluas karena berbanding lurus dengan kebutuhan individu.

Praktik-praktik agama secara individu biasanya mengarusutamakan pelaksanaan ajaran agama yang lebih kontemplatif. Pada zaman Kali, yang identik dengan zaman modern, segala sifat yang tidak baik telah bercokol dalam diri manusia secara individual. Karena itu, pada zaman ini, orang

pada umumnya tidak tertarik pada agama, melainkan lebih tertarik pada kekayaan, kekuasaan, dan wanita. Sesuai dengan watak (sifat) zaman Kali, mereka yang *introvert* (tertutup) akan memilih praktik keagamaan yang kontemplatif. Sedangkan bagi umat yang *extrovert* (terbuka) sudah disediakan praktik keagamaan yang komunal. Semua jalan ini sama-sama memberi kepuasan batin yang maha luas.

Praktik agama sudah berkali-kali mengalami moderasi sejak zaman *Satya Yuga*. Parisadha nampaknya belum puas dengan pelaksanaan ajaran agama yang dilaksanakan di akar rumput, atau belum puas dengan pelaksanaan ajaran agama yang terakumulasi sejak pelaksanaan Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah. Dibuatlah program baru: *grand design* sebagai usaha untuk mempersiapkan umat Hindu menghadapi dinamika sosial masyarakat di masa depan. Di dalamnya terdapat program moderasi.

Tentu saja, moderasi yang digagas dalam *grand design* lebih kompleks dibanding waktu sebelumnya. Moderasi itu mengikuti kerangka pembangunan peradaban Hindu dengan aspek pembangunan politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Moderasi ini lebih kompleks karena mengaplikasikan pelaksanaan ajaran agama dengan modernitas. Sayang sekali, tidak ada agenda politik Hindu ke depan, sebab moderasi menuntut keterlibatan politik. Seperti Mahatma Ghandi menyebut politik dan agama merupakan satu kesatuan.

Berkaitan dengan moderasi beragama, ajaran agama Hindu yang terpenting adalah susila, yaitu bagaimana menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, yang menjadi salah satu dari tiga penyebab kesejahteraan. Kasih sayang adalah hal yang utama dalam moderasi di semua agama. Kasih sayang bisa kita wujudkan dalam segala hal/aspek. Pada intinya, umat Hindu mendukung penuh Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945) yang telah menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Kita juga dapat menjumpai esensi ajaran moderasi beragama dalam tradisi agama Buddha. Pencerahan Sang Buddha berasal dari Sidharta Gautama. Ia adalah seorang guru dan pendiri agama Buddha. Ia merupakan anak seorang raja. Sidharta Gautama mengikrarkan empat *prasetya*, yaitu berusaha menolong semua makhluk, menolak semua keinginan nafsu keduniawian, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan Dharma, serta berusaha mencapai Pencerahan Sempurna.

Tuhan dalam agama Buddha dipanggil dengan sejumlah nama, yaitu *Tathagatagarba* versi aliran Mahayana, *Thian* versi aliran Tridarma, *Nam-myoho-renge-kyo* versi aliran Nichiren, dan *Sang Hyang Adi Buddha* versi Mahayana aliran Aisvarika nama yang biasa dipanggil para penganut Buddha di Indonesia. Tuhan dalam agama Buddha adalah sebuah kekosongan yang sempurna. Adapun yang memberikan rezeki, mengatur alam, dan tugas lainnya dilakukan para dewa dan Bodhisattava. Para dewa ini adalah manusia biasa yang juga mengalami kesengsaraan tapi mereka memiliki kesaktian, dan berumur panjang meskipun tetap tidak abadi (Tim Penyusun *Ensiklopedia Mengenal Lebih Dekat Ragam Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, 2018: 40).

Kemajuan teknologi yang tidak terhentikan ini harus dimaknai sebagai hikmah yang hadir untuk menunjang peningkatan kebahagiaan seluruh umat manusia, seperti cita-cita agama Buddha yang menyatakan, "*Isyo Jobutsu dan kosenrufu*, yakni kebahagiaan seluruh makhluk dan membahagiakan seluruh makhluk. Maka berbagai kemajuan ini bukanlah suatu tujuan, melainkan hanya alat atau media yang harus dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kebahagiaan umat manusia bahkan alam semesta.

Risalah Buddha juga mengajarkan bahwa spirit agama adalah *Metta*, sebuah ajaran yang berpegang teguh pada cinta kasih tanpa pilih kasih yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan: toleransi, solidaritas, kesetaraan dan tanpa kekerasan. Kehidupan para Buddhis berjalan di atas nilai kemanusiaan yang dijabarkan pada kasih sayang, toleran dan

kesetaraan. *Buddhadharma* merupakan 'jalan tengah' yang merupakan aspek penting dari spiritualitas umat Buddha yang sangat menghindari dari dua kutub ekstrem: penyiksaan diri (*attakilamathanuyoga*) dan pemanjaan (*kamalusukhalikanuyoga*). *Buddhadharma* adalah jalan spiritualitas untuk menuju kesucian yang bermuara pada kebahagiaan sejati dan kebijaksanaan.

Jalan tengah *Buddhadharma* merupakan sebuah cara untuk melenyapkan *dukkha* yang bertumpu pada hawa nafsu dan egoisme untuk mencapai tujuan hidup akhir kebahagiaan sejati *Nirvana*. Konsep *ahimsa* yang merupakan spirit keagamaan Hindu yang mengajarkan pada—seperti yang terus dijadikan pijakan perjuangan Mahatma Gandhi (1869-1948)—prinsip tanpa menggunakan kekerasan. Pada titik inilah, semua risalah ajaran agama bermuara pada satu titik: jalan tengah atau moderat.

Moderasi beragama juga mengakar dalam tradisi agama Khonghucu. Umat Khonghucu yang *junzi* (beriman dan luhur budi) memandang kehidupan ini dalam kaca mata *yin yang*, karena *yin* yang adalah filosofi, pemikiran dan spiritualitas seorang umat Khonghucu yang ingin hidup dalam dao (Sendana 2018: 129-132). *Yin* yang adalah Sikap Tengah, bukan sikap ekstrem. Sesuatu yang kurang sama buruknya dengan suatu yang berlebihan.

Tengah di sini bukanlah sikap tanpa prinsip, tapi sikap tengah adalah ajeg dalam prinsipnya. Prinsip yang berpihak pada cinta kasih – kemanusiaan (*ren*) dan keadilan – kebenaran (*yi*) bukan yang lainnya. Dalam keberpihakan pada prinsip tersebut, manusia beriman dan luhur budi senantiasa bertindak susila (*li*) dan bijaksana (*zhi*) sehingga menjadi manusia yang dapat dipercaya (*xin*) dan berani (*yong*).

Mengzi berkata, "Seorang yang dapat bersikap Tengah, hendaklah membimbing orang yang tidak dapat bersikap tengah. Yang pandai hendaklah membimbing orang yang tidak pandai. Demikianlah orang akan merasa bahagia mempunyai ayah atau kakak yang bijaksana. Kalau yang dapat bersikap tengah menyia-nyiakan yang tidak dapat bersikap tengah,

yang pandai menyia-nyiakan yang tidak pandai, maka antara yang bijaksana dan yang tidak bijaksana sesungguhnya tiada bedanya walau satu inci pun." (Mengzi IVB: 7).

Sikap tengah dalam agama Khonghucu merupakan sikap tengah yang telah diajarkan dan diteladankan oleh para raja suci, nabi purba dan tokoh-tokoh suci lain, yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Kongzi. Sikap tengah bukan sikap hanya memegang satu haluan saja, namun perlu kemampuan mempertimbangkan keadaan.

Dialog dan kerja sama terbangun karena orang-orang yang terlibat di dalamnya mau bersikap tengah, tidak ekstrem. Dalam dialog dan kerja sama senantiasa dibutuhkan jalan tengah. Jalan tengah itu bukan berarti selalu terjadi kesepakatan, sepakat untuk tidak sepakat pun adalah jalan tengah. Jalan tengah dibangun dengan sikap tengah. Sikap tengah dibangun karena kemampuan kita untuk terus berusaha menerima perbedaan, mengedepankan kebajikan, mengendalikan nafsu, ego, sikap kukuh dan keinginan mengalahkan atau menguasai yang lain.

> *"Gembira, marah, sedih, senang/suka, sebelum timbul, dinamai Tengah; setelah timbul tetapi masih tetap di dalam batas Tengah, dinamai Harmonis; Tengah itulah pokok besar dunia dan keharmonisan itulah cara menempuh Dao (Jalan Suci) di dunia." (Zhong Yong Bab Utama: 4).*

Sebagai manusia, kita bukanlah sekadar makhluk individu, tapi juga sebagai makhluk sosial. Manusia bukanlah sekadar makhluk biologis, tapi juga makhluk spiritual. Manusia mempunyai batasan waktu untuk berbuat sesuatu karena manusia bukanlah makhluk yang abadi. Dia dibatasi oleh umur. Manusia juga dibatasi oleh tempat dan lingkungannya. Manusia bukanlah sekadar makhluk rasional, tapi juga makhluk emosional. Manusia tak dapat terlepas dari hukum *yin* yang, karena *yin* yang adalah hukum Tuhan.

Sebagai manusia kita perlu tahu batas karena manusia mempunyai batas-batas, kesadaran akan keterbatasan yang akan mengantarkan pada kerja sama yang saling membangun. Maka kehendak untuk menguasai manusia yang lain bukanlah satu sikap yang mencerminkan kemanusiaan kita, itu melebihi batas-batas kemanusiaan kita. Selaras dengan hukum Tuhan, sebagai manusia, kita wajib menjaga agar terus berada dalam batas Tengah, karena dengan tetap ada dalam batas Tengah, kita bisa Harmonis. Keharmonisan itulah cara manusia menempuh *Dao* (Jalan Suci) di dunia. Dengan demikian pada akhirnya kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi, segenap makhluk dan benda akan terpelihara. *"Bila dapat terselenggara Tengah dan Harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi, segenap makhluk dan benda akan terpelihara." (Zhong Yong Bab Utama: 5).*

Peperangan, penjajahan, *climate change*, ekstremisme, bom bunuh diri, perang dagang, keserakahan, keinginan meguasai orang dan bangsa lain, banjir, tertutupnya dialog, menghujat, *hate speech*, menegasikan dan membenci orang lain, merasa diri benar dan orang lain tidak benar, hoaks, tak tahu kebaikan pada apa yang kita benci dan tak tahu keburukan dari apa yang kita sukai serta banyak lagi adalah dampak kegagalan kita untuk bersikap tengah dan harmonis serta mengambil jalan tengah yang menjauhkan kita dari keadilan sosial (kesejahteraan), keharmonisan dan perdamaian dunia.

Mengetahui pangkal dan ujung, awal dan akhir serta mana hal yang dahulu dan mana hal yang kemudian adalah satu sikap yang menunjukkan telah dekat dengan dao. *"Tiap benda mempunyai pangkal dan ujung, tiap perkara mempunyai awal dan akhir. Orang yang mengetahui mana hal yang dahulu dan mana hal yang kemudian, ia sudah dekat dengan dao (Jalan Suci)." (Zhong Yong Bab Utama: 3)*. Sikap tengah adalah wujud sikap tersebut.

Berusaha mengerti dan memahami keinginan orang lain tentu saja memerlukan pengorbanan yang terkadang tidak kecil, tetapi pengorbanan

memang sesuatu yang harus dilakukan demi terjalinnya hubungan yang harmonis. Nabi Kongzi bersabda: *"Yang dapat diajak belajar bersama belum tentu dapat diajak bersama menempuh* dao *(Jalan Suci), yang dapat diajak bersama menempuh jalan suci belum tentu dapat diajak bersama berteguh, dan yang dapat diajak bersama berteguh belum tentu dapat bersesuaian paham." (Lunyu. IX: 30)*

Dalam tradisi Khonghucu, harmoni dapat dihasilkan karena adanya perbedaan-perbedaan. Tetapi untuk bisa harmonis, masing-masing hal yang berbeda itu harus hadir persis dalam proporsinya yang tepat/pas (proporsional). *Zhong* atau Tengah itu adalah segala sesuatu yang pas/ tepat, baik jumlah, waktu, suhu, jarak, kecepatan dan sebagainya. Zhong juga dapat diartikan sesuatu yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar (waktu), tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit (jumlah), tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah (posisi), tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat (jarak), tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis (bentuk), tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin (suhu) dan seterusnya.

Jadi *Zhong* diartikan sebagai segala sesuatu yang pas/ tepat atau, segala sesuatu yang berada pada waktu, tempat, dan ukuran yang pas/tepat. Oleh karena itu Zhong sangat terkait dengan faktor waktu, tempat, dan ukuran, atau dalam suatu istilah disebutkan "di tengah waktu yang tepat." Maka *Zhong* berfungsi untuk mencapai harmoni, atau *Zhong* berfungsi mengharmonikan apa yang bertentangan karena perbedaan-perbedaan.

Demikianlah landasan moderasi dalam tradisi agama-agama yang ada di Indonesia. Pada titik ini, Indonesia yang secara kodrati majemuk memiliki akar kultural yang cukup kuat dan juga memiliki modal sosial sebagai landasan moderasi beragama.[]

Sumber: "Landasan Moderasi Berbagai Agama", dalam Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2019)

SESI VIII
KONSEP MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF TEOLOGI

A. Pengantar

Selain nilai-nilai universal, agama/keyakinan umumnya memiliki nilai-nilai partikular. Nilai-nilai itu biasa berbeda-beda antara satu agama/keyakinan lainnya dan terbentuk melalui penafsiran yang dibakukan. Penafsiran terhadap ajaran keagamaan sendiri dapat berbeda-beda sesuai dengan konteks dan latarbelakang penafsir. Di antara penafsiran tersebut, terdapat penafsiran yang justru bertentangan dengan nilai-nilai universal seperti tafsir tentang siapa yang sesat. Perbedaan penafsiran semacam ini jarang menciptakan pertentangan bahkan konflik antaragama/keyakinan. Tantangannya bertambah rumit ketika perbedaan yang mengacu pada nilai partikular tersebut bertemu dengan praktik-praktik politisasi agama/keyakinan.

Berbeda dengan nilai-nilai universal yang justru menjadi titik temu seperti nilai keadilan, kasih sayang, kemanusiaan, anti kekerasan, dan toleransi. Selain mendalami doktrin-doktrin universal agama/keyakinan, sesi ini mendalami doktrin-doktrin partikular utama yang ada pada agama/keyakinan sekaligus cara memahaminya.

B. Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu:

1. Menjelaskan konsep Moderasi Beragama dalam pandangan agama-agama.
2. Menjelaskan ajaran agama yang mendasari konsep Moderasi Beragama.
3. Mengidentifikasi nilai dan ajaran agama-agama yang sejalan dengan indikator Moderasi Beragama.
4. Mengenali nilai-nilai Moderasi Beragama yang sejalan dengan nilai Universal agama-agama.

C. Pokok Bahasan

1. Konsep Moderasi Beragama dalam pandangan agama-agama
2. Dasar ajaran agama yang mendasari konsep Moderasi Beragama
3. Indikator Moderasi Beragama dari perspektif agama-agama
4. Nilai universal agama dalam konsep moderasi beragama: titik temu lintas agama

D. Metode

- Ceramah
- Tanya-jawab
- Diskusi kelompok
- Presentasi

E. Waktu

135 menit (3 Jam Pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

- LCD
- Laptop/Komputer
- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting
- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoin
- Kertas

G. Langkah-langkah Fasilitasi

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
1	5 menit	**Pengantar:** 1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi, yakni setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu: a. Menjelaskan konsep Moderasi Beragama dalam pandangan agama-agama. b. Menjelaskan ajaran agama yang mendasari konsep Moderasi Beragama. c. Mengidentifikasi nilai dan ajaran agama-agama yang sejalan dengan indikator Moderasi Beragama. d. Mengenali nilai-nilai Moderasi Beragama yang sejalan dengan nilai universal agama-agama. 2. Fasilitator menjelaskan sesi ini merupakan sesi pendalaman untuk mendiskusikan argumen-argumen teologis Moderasi Beragama yang belum cukup terjawab dalam materi "Nilai-Nilai Universal Agama (Antaragama)". Sesi ini juga bertujuan agar peserta mendapat pengayaan dari narasumber bagaimana memahami landasan teologis yang digunakan untuk menentang nilai-nilai moderasi beragama.
3	90 menit	**Pendalaman Landasan Teologis Moderasi Beragama** 1. Fasilitator menjelaskan bahwa peserta akan dibagi sesuai agama/keyakinan yang sudah dibagi pada sesi berikutnya. 2. Fasilitator menjelaskan materi pokok yang akan disampaikan narasumber dan metode yang akan dijalankan berikut ini: **Narasumber dan Materi** Narasumber akan menyampaikan materi dengan kisi-kisi berikut: a. Mempresentasikan landasan teologis Moderasi Beragama berupa ayat-ayat dalam kitab suci, pendapat orang-orang suci, atau sejarah dalam tradisi agama/keyakinan (sesuai kelompok). b. Menyampaikan penafsiran terhadap landasan teologis tersebut yang sejalan dengan nilai-nilai Moderasi Beragama.

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
		c. Menyampaikan penafsiran terhadap landasan teologis yang digunakan secara bertentangan dengan nilai-nilai Moderasi Beragama. d. Menyampaikan metode praktis untuk memahami dan merespons landasan teologis yang digunakan secara bertentangan dengan nilai-nilai Moderasi Beragama **Catatan.** Jika *narasumber* merupakan *narasumber pakar,* panitia dan fasilitator perlu memastikan kesesuaian dengan kualifikasi berikut: 1. Memiliki kepakaran terkait topik yang disampaikan 2. Pernah terlibat dalam satu atau lebih pelatihan PMB 3. Membaca modul Sketsa Kehidupan Keberagamaan. 4. Menyiapkan materi dengan kisi-kisi yang diberikan. 5. Direkomendasikan dan/atau mendapat persetujuan dari Pokja. Jika *narasumber* merupakan *narasumber fasilitator,* panitia dan tim fasilitator perlu memastikan bahwa narasumber memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dan bersedia mengikuti kisi-kisi yang diberikan. **Metode** Metode yang dijalankan seperti berikut: a. Diskusi dilakukan secara luring. Jika berhalangan, diskusi oleh narasumber dapat dilakukan luring. b. Fasilitator menunjuk seorang dalam kelompok untuk menjadi moderator diskusi dan menyampaikan peran yang akan dilakukan. **Catatan.** Fasilitator menunjuk moderator berdasarkan kriteria bahwa calon moderator dinilai cakap dalam komunikasi dan memiliki pemahaman dasar pada topik tersebut. Informasi ini diperoleh melalui amatan fasilitator selama sesi-sesi pelatihan atau biodata calon moderator. Setelah seorang moderator ditunjuk, fasilitator menginformasikan kepada moderator tersebut tentang kisi-

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
		kisi materi dalam diskusi kelompok dan peran yang akan dilakukan seperti mencatat hasil-hasil diskusi. Usai diskusi, moderator menyampaikan kepada fasilitator **Tips.** Agar dapat merekam dinamika yang terjadi dalam diskusi pendalaman, fasilitator berkeliling ke masing-masing lokasi diskusi kelompok dan mencatat apa yang berlangsung. Berikut ini pertanyaan panduan: 1. Apakah narasumber menyampaikan materi dengan jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan? 2. Bagaimana antusiasme dan keaktifan peserta? 3. Apakah terdapat peserta yang menolak keras pandangan narasumber? 4. Apa saja isu-isu utama yang muncul dalam sesi tanya-jawab dan bagaimana narasumber meresponsnya?
4	30 menit	**Refleksi dan Penutup** 1. Setelah diskusi kelompok, fasilitator meminta setiap peserta kembali dalam forum bersama untuk menjalankan refleksi diskusi pendalaman teologis. 2. Fasilitator melempar pertanyaan kepada peserta apa yang mereka dapatkan dari diskusi pendalaman? Apa saja isu-isu penting yang muncul? 3. Fasilitator merespons jawaban dan tanggapan peserta secukupnya. 4. Fasilitator menjelaskan, mengklarifikasi, atau memperkuat isu-isu penting dengan tujuan: a. Peserta memahami dan menyadari bahwa terdapat landasan teologis yang digunakan dengan cara yang tidak sejalan nilai-nilai Moderasi Beragama. b. Peserta memiliki metode praktis dalam memahami landasan teologis yang tidak sejalan nilai-nilai Moderasi Beragama. 5. Fasilitator menutup sesi dengan menghubungkan sesi materi ini dengan materi berikutnya.
Total	**135 menit**	

SESI IX
KONSEP MODERASI BERAGAMA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

A. Pengantar

Sesi ini membicarakan konsep Moderasi Beragama, indikator, dan posisinya dalam rencana pembangunan nasional, hingga peta jalan (*road map*) yang telah ditetapkan. Materi ini diberikan setelah peserta diajak untuk membedah spirit moderasi yang terkandung dalam ajaran-ajaran universal setiap agama. Konsep Moderasi Beragama yang dikembangkan Pemerintah Republik Indonesia melalui Pepres Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama Agama RI pada dasarnya adalah sebuah rumusan yang, di satu sisi berpijak pada inti ajaran setiap agama, dan di sisi lain memberi perspektif yang lebih operasional dalam melihat dan merespons dinamika kehidupan keberagamaan di Indonesia saat ini.

B. Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu:

1. Menjelaskan konsep Moderasi Beragama
2. Menyebutkan Indikator Moderasi Beragama beserta contoh.
3. Menjelaskan gambaran umum Peta Jalan Pengarusutamaan Moderasi Beragama

Menjelaskan posisi Moderasi Beragama dalam RPJMN

C. Pokok Bahasan

1. Konsep Moderasi Beragama
2. Indikator Moderasi Beragama
3. Peta Jalan Pengarusutamaan Moderasi Beragama
4. Posisi Moderasi Beragama dalam RPJMN

D. Metode

- Ceramah
- Tanya-jawab
- Tanya-jawab dengan *menti.com*

E. Waktu

135 menit (3 jam pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

- LCD
- Laptop
- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting
- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoin

G. Langkah-langkah Fasilitasi

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
1	5 menit	**Pengantar:** 1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi, yakni setelah mengikuti sesi peserta mampu: a. Menjelaskan konsep Moderasi Beragama b. Menyebutkan Indikator Moderasi Beragama beserta contoh. c. Menjelaskan gambaran umum Peta Jalan Pengarusutamaan Moderasi Beragama Menjelaskan posisi Moderasi Beragama dalam RPJMN

		2. Fasilitator mengaitkan sesi ini dengan sesi sebelumnya, yakni bahwa Moderasi Beragama beragama tidak bicara mengenai isu-isu partikularitas agama, tidak hendak menjauhkan warga dari nilai-nilai agama Moderasi Beragama justru dirumuskan untuk membangun kemaslahatan bersama.
2	125 menit	**Presentasi Konsep Moderasi Beragama Pemerintah Indonesia** 1. Fasilitator memperkenalkan biodata singkat narasumber. 2. Fasilitator menyampaikan kisi-kisi materi yang akan disampaikan narasumber dan menjelaskan singkat tentang isu-isu penting yang didiskusikan peserta terkait kebijakan Moderasi Beragama pada sesi-sesi sebelumnya. **Tips.** Fasilitator sebaiknya sudah menyiapkan catatan tentang miskonsepsi dan kecurigaan peserta terhadap Kebijakan Moderasi Beragama pada sesi-sesi sebelumnya. 3. Fasilitator mempersilakan materi yang menjelaskan empat pertanyaan kunci berikut: a. Apa saja miskonsepsi tentang Moderasi Beragama yang Anda dengar? b. Apa itu Moderasi Beragama? c. Apa saja indikator Moderasi Beragama? d. Bagaimana Peta Jalan Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kemenag RI? e. Bagaimana posisi Moderasi Beragama dalam RPJMN dan Perpres Nomor 58 Tahun 2023? 4. Fasilitator mempersilakan peserta bertanya, merespons, atau mengklarifikasi pemaparan narasumber dalam sesi tanya-jawab. 5. Fasilitator meminta narasumber merespons pertanyaan atau klarifakasi yang dilontarkan peserta. 6. Fasilitator menutup sesi dengan menyampaikan isu penting dalam pemaparan narasumber dan sesi tanya-jawab serta menghubungkannya dengan sesi berikutnya. **Langkah Alternatif #1** 1. Fasilitator menawarkan ke narasumber untuk meminta peserta menuliskan hal-hal yang perlu dikonfirmasi terkait Moderasi Beragama. Permasalahan tidak harus berasal

		dari pengalaman diri sendiri, tetapi juga pihak lain terkait Moderasi Beragama. 2. Setelah pertanyaan terkumpul, fasilitator atau narasumber membacakannya dan narasumber meresponsnya satu per satu. Narasumber dapat memaparkan materi terkait tema-tema yang sesuai dengan pertanyaan peserta. **Langkah Alternatif #2** 1. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 atau 5 kelompok, dengan jumlah anggota per kelompok maksimal 8 orang. 2. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk membaca buku Moderasi Beragama terbitan Balitbang dan Diklat Kemenag RI. 3. Fasilitator meminta setiap kelompok menemukan jawaban dari pertanyaan berikut: a. Apa saja miskonsepsi tentang Moderasi Beragama yang Anda dengar? b. Apa yang dimaksud dengan Moderasi Beragama? c. Apa indikator-indikator perwujudan Moderasi Beragama? d. Mengapa Moderasi Beragama penting dewasa ini? e. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan Moderasi Beragama? f. Apa strategi yang harus dilakukan untuk penguatan Moderasi Beragama di lingkungan masing-masing? 4. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. 5. Setiap perwakilan kelompok selesai mempresentasikan hasil diskusi, fasilitator memberi kesempatan kepada anggota kelompok tersebut menambahkan dan kepada peserta dari kelompok lain menanggapi. 6. Fasilitator mempersilakan kelompok yang tengah presentasi merespons tanggapan peserta dari kelompok lainnya. 7. Fasilitator menyampaikan presentasi tentang Konsep Moderasi Beragama Pemerintah Indonesia. **Catatan.** Fasilitator menampilan bahan presentasi Moderasi Beragama Pemerintah Indonesia. 8. Fasilitator mempersilakan peserta bertanya atau mengklarifikasi atas presentasi tersebut lalu ditanggapi Fasilitator.

		9. Fasilitor menutup sesi dengan menjelaskan hubungan sesi ini dengan sesi berikutnya
4	5 menit	**Penutup** 1. Fasilitator menyampaikan catatan-catatan yang dianggap penting selama sesi berlangsung. Fasilitator menegaskan Moderasi Beragama memiliki ukuran yang jelas dan semata-mata ditujukan sebagai strategi membangun kemaslahatan publik.
Total	**225 menit**	

3. **Lampiran Materi**
   a. Moderasi Beragama

4. **Bahan Tayang**
   a. Moderasi Beragama

Lampiran Materi

Moderasi Beragama

Materi ini perlu ditambahkan dan disesuikan dengan Penjelasan pada Perpres 58 Tahun 2023

Dalam buku *Moderasi Beragama* dinyatakan, moderasi diperlukan karena tingginya konflik dan kekerasan dengan sentimen agama. Moderasi Beragama merupakan strategi kebudayaan merawat keindonesiaan di tengah keragaman agama di mana sikap radikal akan berakibat pada kehancuran.

Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku, yang mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, seimbang, dan tidak ekstrem dalam beragama. Posisi moderat juga merujuk pada keseimbangan antara komitmen terhadap agama yang diyakininya dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain.

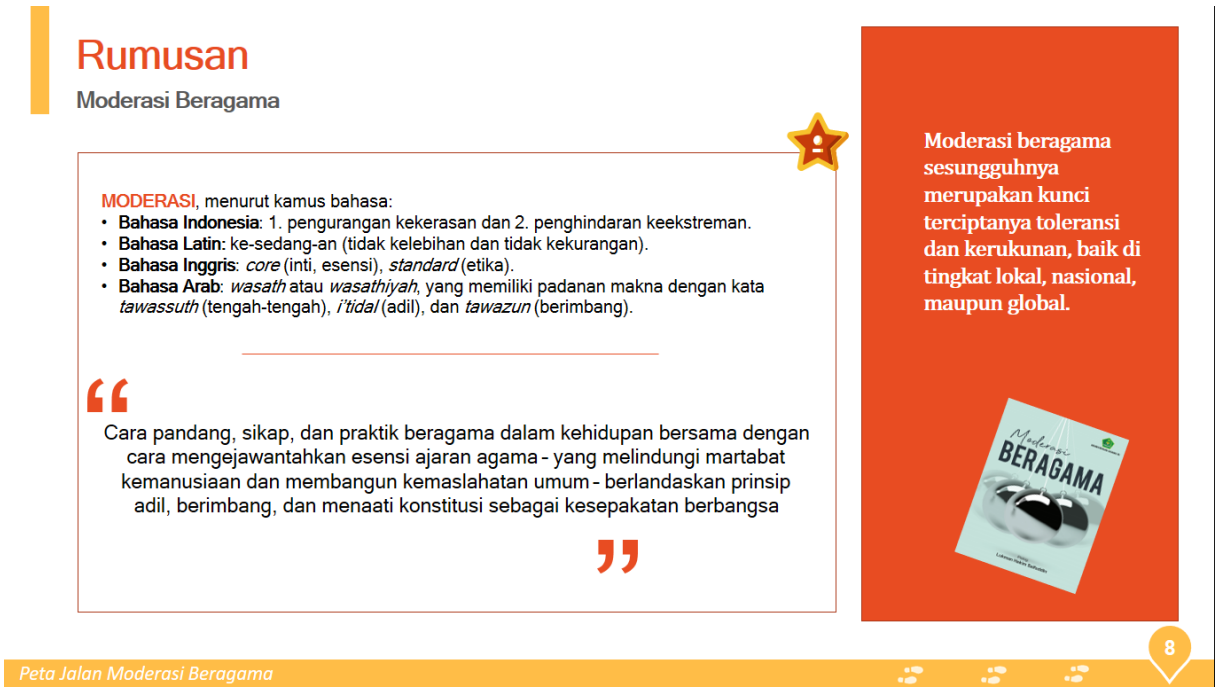

Moderasi Beragama memiliki empat indikator: komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

Indikator

Moderasi Beragama

Moderasi Beragama bukan hal absurd yang tak bisa diukur. Keberhasilan Moderasi Beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya empat indikator utama berikut ini serta beberapa indikator lain yang selaras dan saling bertautan:

1 **Komitmen kebangsaan**
Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi: UUD 1945 dan regulasi di bawahnya

2 **Toleransi**
Menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kesetaraan dan sedia bekerjasama.

3 **Anti kekerasan**
Menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan

4 **Penerimaan terhadap tradisi**
Ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama

Peta Jalan Moderasi Beragama 9

Moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024

RPJMN 2020-2024
PRIORITAS NASIONAL 4
REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

GERAKAN NASIONAL Revolusi Mental

Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila — PP 1

- **KP 1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan**
- **KP 2. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan**
- **KP 3. Revolusi mental dalam sistem sosial**
- **KP 4. Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental**
- **KP 5. Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila**
- **KP 6. Pembinaan ideologi pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara**

Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan — PP 2

- KP 1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal
- KP 2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya
- KP 3. Perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan ekspresi budaya
- KP 4. Pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim
- KP 5. Pengembangan diplomasi budaya

Memperkuat Moderasi Beragama — PP 3

- KP 1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah
- KP 2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama
- KP 3. Penyelarasan relasi agama dan budaya
- KP 4. peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama
- KP 5. Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan

Meningkatkan Literasi, Inovasi dan Kreativitas — PP 4

- KP 1. Peningkatan Budaya Literasi
- KP 2. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan sastra
- KP 3. Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta
- KP 4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi

Arah Kebijakan

Penguatan Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024

Kebijakan memperkuat Moderasi Beragama didasarkan pada paradigma:

- Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara, bukan pula negara yang diatur berdasarkan agama tertentu. Indonesia adalah negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karenanya, negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan warganya sesuai amanah konstitusi.
- Negara memposisikan diri "*in between*": tidak boleh terlalu jauh campur tangan, tapi juga tidak boleh terlalu jauh lepas tangan.
- Negara berlandaskan dan berorientasi pada nilai-nilai agama, yaitu terwujudnya kemaslahatan bersama menuju kedamaian dan kebahagiaan.

Peta Jalan Moderasi Beragama 18

PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DALAM RPJMN 2020-2024

Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, melalui:

a. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama, mencakup:

(a) pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat;

(b) penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru;

(c) penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan;

(d) pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran;

(e) pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.

Strategi Penguatan dan Peta Jalan

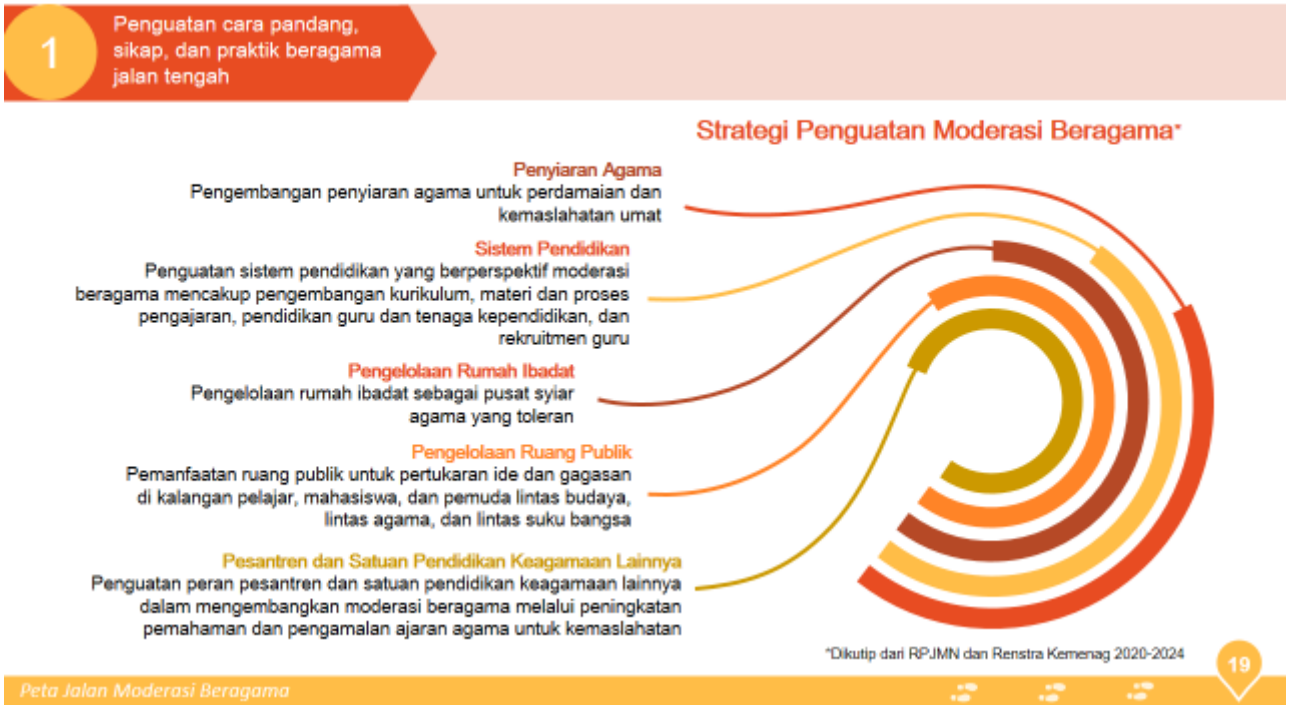

Dalam Peta Jalan Moderasi Beragama dinyatakan, Penguatan Moderasi Beragama dalam lingkup Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

a. **Tahun 2021**: Penguatan perspektif Moderasi Beragama dalam institusi. Tahap ini ditempuh melalui beberapa agenda sebagai berikut:
   1) Pengembangan kerangka kerja tingkat Direktorat;
   2) Penyiapan instrumen implementasi penguatan Moderasi Beragama;
   3) Pemenuhan anggaran;
   4) Program penguatan Moderasi Beragama berbasis tugas dan fungsi; dan
   5) Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama.

b. **Tahun 2022**: Penyelenggaraan layanan dan program keagamaan berperspektif Moderasi Beragama. Tahap ini ditempuh melalui agenda sebagai berikut:
   1) Pengembangan dan penguatan pelayanan publik berperspektif Moderasi Beragama; dan
   2) Pelibatan pemangku kepentingan dalam implementasi Moderasi Beragama.
c. **Tahun 2023**: Penguatan peran masyarakat dalam penguatan Moderasi Beragama. Tahap ini ditempuh melalui agenda sebagai berikut:
   1) Penguatan pelibatan pemangku kepentingan dengan fasilitasi program masyarakat untuk implementasi Moderasi Beragama; dan
   2) Peningkatan fasilitasi program masyarakat sesuai tugas dan fungsi.
d. **Tahun 2024**: Peneguhan dan apresiasi negara dan bangsa perspektif Moderasi Beragama. Capaian tahap ini ditandai dengan parameter sebagai berikut:
   1) Tercapainya indeks-indeks sesuai target;
   2) Pemenuhan regulasi akan hak sipil berbasis Moderasi Beragama;
   3) Penurunan jumlah kasus konflik atas nama agama; dan
   4) Apresiasi implementasi Moderasi Beragama.

Adapun Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama tahun 2020-2024 untuk lingkup nasional, adalah sebagai berikut :

a. **Tahun 2021**: Pengembangan infrastruktur penguatan perspektif Moderasi Beragama. Tahap ini ditempuh melalui agenda sebagai berikut:
   1) Sosialisasi dan penyelarasan konsep dan kerangka kerja Moderasi Beragama;
   2) Penguatan regulasi perspektif Moderasi Beragama; dan
   3) Penguatan dukungan kebijakan dan anggaran Kementerian/Lembaga di tingkat pusat sampai pemerintah daerah.

b. **Tahun 2022**: Penguatan perspektif dan kapasitas penyelenggara negara dan lembaga keagamaan dalam penguatan perspektif Moderasi Beragama. Tahap ini ditempuh melalui agenda sebagai berikut:
   1) Peningkatan perspektif dan kapasitas penyelenggara negara;
   2) Pelibatan kelompok-kelompok kunci dalam penguatan Moderasi Beragama;
   3) Implementasi awal program penguatan Moderasi Beragama pada target utama RPJMN.
c. **Tahun 2023**: Penguatan perspektif Moderasi Beragama dalam kehidupan keberagamaan Indonesia di semua lini. Tahap ini ditempuh melalui agenda sebagai berikut:
   1) Implementasi penguatan Moderasi Beragama oleh penyelenggara negara;
   2) Peningkatan pelibatan tokoh publik dan organisasi berpengaruh dalam penguatan Moderasi Beragama; dan
   3) Kebijakan afirmasi penguatan Moderasi Beragama.
d. **Tahun 2024**: Peneguhan kerukunan umat beragama dan kehidupan keberagamaan berperspektif Moderasi Beragama. Capaian tahap ini ditandai dengan parameter sebagai berikut:
   1) Tercapainya indeks kerukunan umat beragama, indeks kesalehan umat beragama, dan indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya;
   2) Rekognisi dan afirmasi kepada pelaku Moderasi Beragama;
   3) Tercapainya target rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran;
   4) Moderasi Beragama menjadi perspektif utama dalam dunia pendidikan; dan
   5) Menguatnya peran media massa dalam program penguatan Moderasi Beragama.

SESI X
ESENSI DAN NILAI MODERASI BERAGAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

A. Pengantar

Substansi Moderasi Beragama terletak pada esensi dan nilai-nilai yang diperjuangkan. Tanpanya, Moderasi Beragama ibarat wadah tanpa isi. Esensi dan nilai-nilai Moderasi bergama dapat diperas ke dalam sembilan kata kunci yang termuat dalam definisi Moderasi Beragama Pemerintah Indonesia: kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan kepada tradisi.

Upaya mendorong nilai-nilai yang termaktub pada sembilan kata kunci tenu saja memerlukan pengetahuan dan strategi tentang nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Alasannya jelas. Cara pikir dan tindakan masyarakat digerakkan nilai-nilai yang dianut. Sesi ini memahami nilai-nilai yang bekembang di samayarakat, mendalami sembilan kata kunci, dan cara mempromosikannya.

B. Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu:

1. Menyebutkan 9 Kata Kunci Moderasi Beragama berikut contohnya;
2. Menjelaskan cara sistem otak bekerja;
3. Menyebut bentuk-bentuk *moral foundation*;
4. Menjelaskan strategi dalam mempromosikan esensi dan nilai Moderasi Beragama.

C. Pokok Bahasan

1. Sembilan Kata Kunci Moderasi Beragama Pemerintah Otak

2. Sistem Otak
3. Moral Foundation
4. Promosi Esensi dan Nilai Moderasi Beragama

D. Metode

- Curah Pendapat
- Presentasi
- Diskusi Kelompok

E. Waktu

90 menit (2 jam pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

- LCD
- Laptop
- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting
- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoin

G. Langkah-langkah Fasilitasi

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
1	5 menit	**Pengantar:** 1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi, yakni setelah mengikuti sesi peserta mampu: a. Menyebutkan 9 Kata Kunci Moderasi Beragama berikut contohnya. b. Menjelaskan cara sistem otak bekerja. c. Menyebut bentuk-bentuk landasan *moral foundation*. d. Menjelaskan strategi dalam mempromosikan esensi dan nilai Moderasi Beragama.

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
		2. Fasilitator menjelaskan kembali definisi Moderasi Beragama yang telah didiskusikan pada sesi-sesi sebelumnya. Pada definisi tersebut terdapat kata-kata kunci yang perlu diingat untuk memudahkan dalam memami konsep tersebut. Untuk memahamkan masyarakat tentang Moderasi Beragama, mereka dapat diperkenalkan kata-kata kunci tersebut.
3	60	**Membedah Kata Kunci Moderasi Beragama** 1. Fasilitator menjelaskan pentingnya memahami sembilan kata kunci dalam mempromosikan nilai-nilai Moderasi Beragama. Kata-kata kunci itu memuat nilai-nilai yang dapat mempersatukan orang atau kelompok orang yang akan menjadi sasaran Penguatan Moderasi Beragama. 2. Fasilitator menjelaskan bahwa nilai-nilai yang dianut dalam sebuah kelompok atau masyarakat memiliki pengaruh dalam membentuk cara pandang dan perilaku, termasuk perilaku keagamaan. Asumsi ini tergambar dalam konsep Landasan Moral (*Moral Foundation*). 3. Fasilitator mengajak peserta mendiskusikan Landasan Moral. **Catatan.** Fasilitator menampilan bahan presentasi Landasan Moral. Lihat Lampiran Materi 4. Fasilitator mengajak peserta merumuskan sembilan kata kunci Moderasi Beragama dengan mencatat pada kertas plano yang tersedia. **Catatan.** Fasilitator memastikan kata kunci tersebut merujuk pada Rumusan Definisi Moderasi Beragama dan Indikator Moderasi Beragama dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2023. Berikut Sembilan Kata Kunci: 1. Kemanusiaan 2. Kemaslahatan Umum 3. Adil 4. Berimbang

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
		5. Taat Konstitusi 6. Komitmen Kebangsaan 7. Toleransi 8. Anti Kekerasan 9. Penghormatan kepada Tradisi 5. Fasilitator membagi peserta menjadi tiga kelompok sesuai pembagian sembilan kata kunci. **Contoh.** **Kelompok 1** ● Kemanusiaan ● Kemaslahatan Umum ● Adil **Kelompok 2** ● Berimbang ● Taat Konstitusi ● Komitmen Kebangsaan **Kelompok 3** ● Toleransi ● Anti Kekerasan ● Penghormatan kepada Tradisi 6. Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk: ● menemukan dalil-dalil agama yang mendukung tiga kata kunci Moderasi Beragama ● membuat narasi "gaul" atau merakyat untuk dipromosikan kepada masyarakat. **Catatan.** alil-dalil agama dalam teks agama disesuaikan dengan latar belakang agama peserta. Teks-teks tersebut misalnya merujuk al-Qur'an bagi komunitas muslim, Alkitab bagi Katolik dan Protestan, Weda bagi komunitas Hindu, Tripitaka bagi komunitas Buddha dan Si Shu atau Su Si bagi komunitas Khonghucu, dan teks utama pada agama/keyakinan lainnya. 7. Fasilitator meminta setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok.

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
		8. Fasilitator memberi kesempatan kepada anggota kelompok menambahkan informasi jika dibutuhkan. 9. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta di luar kelompok merespons atau menanggapi hasil presentasi. 10. Fasilitator mencatat poin-poin penting yang berkembang dalam sesi.
4	10 menit	**Penutup** 2. Fasilitator/trainer menyampaikan catatan-catatan penting dalam sesi Konsep Moderasi Beragama Kemenag dan menutup sesi
Total	**90 menit**	

H. Lampiran Materi

1. Sembilan Kata Kunci Moderasi Beragam

I. Bahan Tayang

1. Sembilan Kata Kunci Moderasi Beragam

Lampiran Materi 3

Sistem Berpikir

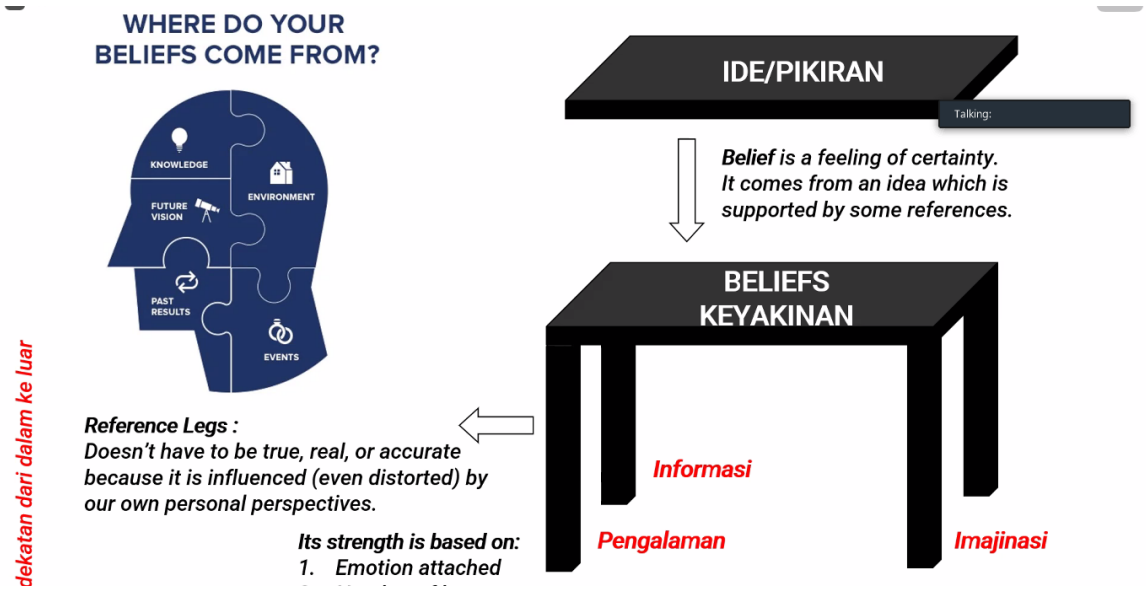

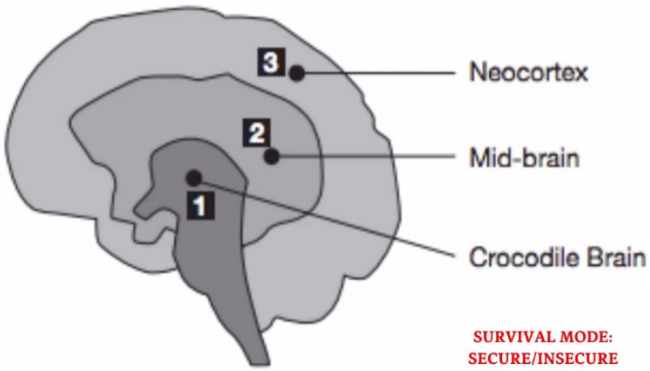

SURVIVAL MODE:
SECURE/INSECURE
FIGHT OR FLIGHT

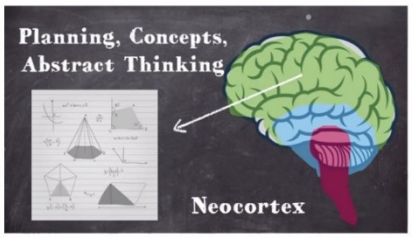

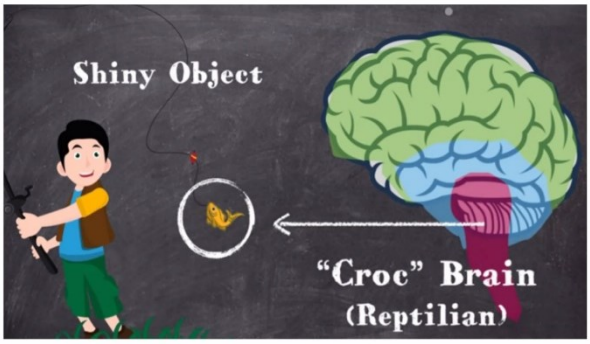

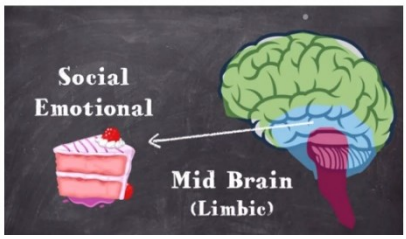

Lampiran Materi 3

Moral Foundation

Jonathan Haidt dalam bukunya, *The Righteous Mind: Mengapa Orang-orang Baik Terpecah Karena Politik dan Agama*, menyatakan ada beberapa landasan moral sebagai berikut:

- Landasan mengayomi/membahayakan. Landasan ini membuat kita cenderung lebih suka mengurusi orang-orang yang menderita dibandingkan mengurusi orang yang penuh kebencian atau kekejaman. Landasan ini membuat orang lebih peka terhadap tanda-tanda penderitaan dan kebutuhan karena semangatnya adalah mengayomi kelompok-kelompok yang rentan.
- Landasan ketidakcurangan/kecurangan. Landasan ini memberikan semangat untuk berkolaborasi sehingga peka terhadap indikasi-indikasi orang yang berpotensi untuk menjadi mitra yang baik untuk bekerja sama tanpa dieksploitasi. Orang yang memegang landasan ini akan cenderung menjauhi atau menghukum pelaku kecurangan.
- Landasan kesetiaan/pengkhianatan. Landasan ini tidak menghendaki adanya pengkhianatan terhadap pribadi ataupun kelompok. Apabila terjadi pengkhianatan tindakan yang akan diambil adalah pengucilan hingga melukai. Orang yang memiliki landasan ini membuat peka mengetahui tanda-tanda tim yang baik atau tidak.
- Landasan kewenangan/pembangkangan. Landasan ini membuat orang lebih peka terhadap tanda-tanda sikap yang sepantasnya atau tidak. Orang yang memiliki landasan ini akan cenderung menggantungkan kita karena hierarki sosial.
- Landasan kesakralan/penodaan. Landasan ini menginginkan orang untuk memberi nilai terhadap objek-objek baik positif ataupun negatif untuk menjaga kesatuan kelompok. Sehingga ketika ada ancaman simbolik ataupun beraneka ragam objek sudah memiliki sistem kekebalan perilaku.

- Landasan kemerdekaan/penindasan. Landasan ini mendorong orang untuk bersatu guna melawan tiran. Sehinga egalitarianisme

dan antiotoritarianisme tercipta ketika memakai landasan ini karena kita cenderung jengkel terhadap upaya-upaya dominasi.

SESI XI
WAWASAN KEBANGSAAN

A. Pengantar

Munculnya tantangan Moderasi Beragama dan keberhasilan usaha-usaha mengatasinya sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan tindakan pemerintah, termasuk para Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun dalam praktiknya, masih dijumpai ASN yang belum bertindak tepat sebagai representasi negara dalam urusan keagamaan di Indonesia. Tidak sedikit dari ASN yang bersikap dan mengambil kebijakan atas masalah-masalah sosial keagamaan berdasarkan pada pandangan pribadi atau kelompok keagamaan yang dianut. Padahal posisi dan sikap sebagai "representasi negara" menuntut ASN bersikap dan bertindak adil dalam pelayanan keagamaan sebagaimana prinsip dan mandat dari Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

Sesi ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali suatu kesadaran bahwa Kementerian Agama sebagai bagian dari negara Indonesia yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 memiliki mandat untuk melindungi dan melayani agama-agama di Indonesia tanpa diskriminasi. Kesadaran ini tentu saja mensyaratkan kesadaran dan pemahaman yang utuh tentang kedudukan Kementerian Agama RI, baik dalam perspektif sejarah maupun dalam tata pemerintahan Indonesia hari ini.

B. Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengeruhi kerentanan kesatuan dan persatuan bangsa.
2. Menjelaskan urgensi Pancasila sebagai kesepakatan bangsa.
3. Menilai pentingnya kedudukan Kementerian Agama RI sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang agama.

C. Pokok Bahasan

1. Kerentanan Kesatuan dan Persatuan Bangsa
2. Pancasila Sebagai Kesepakatan Bangsa
3. Legalitas, legitimasi dan Mandat Kementerian Agama RI sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang agama.

D. Metode

- Curah pendapat
- Diskusi Kelompok
- Presentasi

E. Waktu

135 menit (3 jam pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

- LCD
- Laptop
- Spidol besar dan kecil
- Kertas plano
- Metaplan
- Kertas bekas
- Perekat kertas
- Gunting

G. Langkah-langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	10 menit	**Pengantar** 1. Fasilitator membuka dan menjelaskan tujuan sesi, yaitu setelah mengikuti sesi ini peserta mampu: a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengeruhi kerentanan kesatuan dan persatuan bangsa. b. Menjelaskan urgensi Pancasila sebagai kesepakatan bangsa. c. Menilai pentingnya kedudukan Kementerian Agama RI sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang agama.

		2. Fasilitator menjelaskan singkat hubungan sesi dengan pendekatan "Proses U" yang sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya, yaitu tahap "berpikir ulang" (*rethinking*).
2	60 menit	**Wawasan Kebangsaan** 1. Fasilitator mengajak peserta mengeksplorasi jawaban dan analisis mengapa sebuah bangsa bisa hancur atau bersatu dengan mempresentasikan materi Wawasan Kebangsaan. **Catatan.** Fasilitator menayangkan bahan tayang Wawasan Kebangsaan 2. Setelah selesai menyampaikan materi, fasiltator melemparkan pertanyaan berikut: a. Bagaimana dengan Indonesia? Apa tantangan Indonesia dalam mempertahankan kebersatuan dalam keberagaman Indonesia? Apa yang akan menghancurkan Indonesia? b. Bagaimana peran Kemenag dalam menjaga Negara Bangsa Indonesia 3. Fasilitator menjelaskan hubungan sesi ini dengan sesi sebelumnya, yaitu peran penting Kemenag menjaga Negara Bangsa Indonesia dan Sikap Diri ASN
2	60 menit	**Diskusi Kelompok** 1. Fasilitator membagi peserta dalam 4 kelompok. 2. Fasilitator meminta peserta menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: a. Persoalan sosial apa yang mengharuskan Kemenag ada? b. Kebijakan apa yang memperkuat keberadaan Kemenag? c. Apakah Kemenag masih relevan untuk situasi sekarang? d. Jika Kemenag tidak ada, apa yang akan terjadi? e. Bagaimana seharusnya ASN Kemenag bersikap dalam melayani masyarakat? f. Fasilitator/trainer mempersilakan masing-masing juru bicara mempresentasikan hasil diskusi mereka, masing-masing selama 7 menit.

		3. Fasilitator mempersilakan anggota kelompok menambahkan informasi jika dibutuhkan. 4. Fasilitator mempersilakan anggota kelompok lain bertanya atau mengklarifikasi materi presentasi. 5. Fasilitator mencatat poin-poin penting dan membuka diskusi dengan peserta. 6. Fasilitator mengakhiri diskusi dengan menegaskan bahwa sebagai representasi negara, ASN Kemenag harus berpandangan, berperilaku, dan bertindak dengan menggunakan paradigma dan regulasi negara. Sebagai representasi negara, ASN Kemenag harus profesional, adil, imparsial, dan tidak diskriminatif dalam melindungi dan melayani umat beragama.
3	5 menit	**Penutup** 1. Fasilitator menjelaskan poin-poin penting dari hasil diskusi kelompok dan menegaskan hal berikut: a. Bahwa Kementerian Agama RI sebagai bagian dari negara Indonesia yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 berkewajiban melindungi dan melayani seluruh umat beragama secara adil tanpa diskriminasi. b. Jati diri ASN Kemenag RI adalah profesional, adil, demokratis, dan berpandangan, bersikap, dan berperilaku moderat dalam beragama. c. Kedudukan Kementerian Agama RI sangat vital dalam penciptaan kerukunan umat beragama, persatuan Indonesia, dan perwujudan negara Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Fasilitator menutup sesi dengan tepuk tangan dan salam.
Total	**135 menit**	

H. Lampiran Materi

1. Sejarah Kemenag
2. Visi-Misi Kemenag
3. Tugas dan Fungsi Kemenag

I. Bahan Tayang

1. Wawasan Kebangsaan

Lampiran Materi 1

Sekilas tentang Kementerian Agama Republik Indonesia

Pendirian Kementerian Agama pertama kali disampaikan Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 11 Juli 1945. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama.

Aspirasi itu tidak langsung bisa terwujud. Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Ahad 19 Agustus 1945 yang salah satu agendanya membicarakan pembentukan kementerian/departemen, usulan dibentuk Kementerian Agama belum disepakati.

Diungkapkan oleh K.H.A. Wahid Hasjim sebagaimana dimuat dalam buku *Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar* (Kementerian Agama, 1957: 856), "Pada waktu itu orang berpegang pada teori bahwa agama harus dipisahkan dari negara. Pikiran orang pada waktu itu, di dalam susunan pemerintahan tidak usah diadakan kementerian tersendiri yang mengurusi soal-soal agama. Begitu di dalam teorinya. Tetapi di dalam praktiknya berlainan."

Lebih lanjut Wahid Hasjim menulis, "Setelah berjalan dari Agustus hingga November tahun itu juga, terasa sekali bahwa soal-soal agama yang di dalam praktiknya bercampur dengan soal-soal lain di dalam beberapa tangan (departemen) tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dan terasa perlu sekali berpusatnya soal-soal keagamaan itu di dalam satu tangan (departemen) agar soal-soal demikian itu dapat dipisahkan (dibedakan) dari soal-soal lainnya. Oleh karena itu, maka pada pembentukan Kabinet Parlementer yang pertama, diadakan Kementerian Agama. Model Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara."

Usulan pembentukan Kementerian Agama kembali muncul pada sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), 25-27 November 1945. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) merupakan Parlemen Indonesia periode 1945-1950, sidang pleno dihadiri 224 orang anggota, di antaranya 50 orang dari luar Jawa (utusan Komite Nasional Daerah). Sidang dipimpin oleh Ketua KNIP Sutan Sjahrir dengan agenda membicarakan laporan Badan Pekerja (BP) KNIP, pemilihan keanggotaan/Ketua/Wakil Ketua BP KNIP yang baru dan tentang jalannya pemerintahan.

Dalam sidang pleno KNIP tersebut usulan pembentukan Kementerian Agama disampaikan oleh utusan Komite Nasional Indonesia Daerah Keresidenan Banyumas yaitu K.H. Abu Dardiri, K.H.M Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro. Mereka adalah anggota KNI dari partai politik Masyumi. Melalui juru bicara K.H.M. Saleh Suaidy, utusan KNI Banyumas mengusulkan, "Supaya dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambilkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan saja, tetapi hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri".

Usulan anggota KNI Banyumas mendapat dukungan dari anggota KNIP khususnya dari partai Masyumi, di antaranya Mohammad Natsir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan M. Kartosudarmo. Secara aklamasi sidang KNIP menerima dan menyetujui usulan pembentukan Kementerian Agama. Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta akan hal itu. Bung Hatta langsung berdiri dan mengatakan, "Adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah." Pada mulanya terjadi diskusi apakah kementerian itu dinamakan Kementerian Agama Islam ataukah Kementerian Agama. Tetapi akhirnya diputuskan nama Kementerian Agama."

Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No. 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H) yang berbunyi; Presiden Republik Indonesia,

Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama.

Maksud dan tujuan membentuk Kementerian Agama, selain untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di tanah air, yang merasa urusan keagamaan di zaman penjajahan dahulu tidak mendapat layanan yang semestinya, juga agar soal-soal yang bertalian dengan urusan keagamaan diurus serta diselenggarakan oleh suatu instansi atau kementerian khusus, sehingga pertanggungan jawab, beleid, dan taktis berada di tangan seorang menteri.

Pembentukan Kementerian Agama, sebagaimana diungkapkan R. Moh. Kafrawi (mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama), "…. dihasilkan dari suatu kompromi antara teori sekuler dan Kristen tentang pemisahan gereja dengan negara, dan teori muslim tentang penyatuan antara keduanya. Jadi Kementerian Agama itu timbul dari formula Indonesia asli yang mengandung kompromi antara dua konsep yang berhadapan muka: sistem Islami dan sistem sekuler."

Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. H.M. Rasjidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern dan di kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah.

Rasjidi saat itu adalah menteri tanpa *portfolio* dalam Kabinet Sjahrir. Dalam jabatan selaku menteri negara (menggantikan K.H. A. Wahid Hasjim), Rasjidi sudah bertugas mengurus permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam.

Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji; Kementerian Kehakiman yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dan Kementerian

Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah.

Sehari setelah pembentukan Kementerian Agama, Menteri Agama H.M. Rasjidi dalam pidato yang disiarkan oleh RRI Yogyakarta menegaskan bahwa berdirinya Kementerian Agama adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya.

Kutipan transkripsi pidato Menteri Agama H.M. Rasjidi yang mempunyai nilai sejarah, tersebut diucapkan pada Jumat malam, 4 Januari 1946. Pidato pertama Menteri Agama tersebut dimuat oleh Harian Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta tanggal 5 Januari 1946.

Dalam Konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta tanggal 17-18 Maret 1946, H.M. Rasjidi menguraikan kembali sebab-sebab dan kepentingan Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Kementerian Agama yakni untuk memenuhi kewajiban Pemerintah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI pasal 29, yang menerangkan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (ayat 1 dan 2). Jadi, lapangan pekerjaan Kementerian Agama ialah mengurus segala hal yang bersangkut paut dengan agama dalam arti seluas-luasnya.

Perkembangan berikutnya

Tahun-tahun berikutnya merupakan masa konsolidasi dan pengembangan kementerian. Peralihan kekuasaan kepada Pemerintah RI menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi kementerian. Pada tanggal 23 April 1946, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat yang isinya

Pertama, *Shumuka* yang dalam zaman Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Jawatan Agama Daerah, yang selanjutnya ditempatkan di bawah Kementerian Agama.

Kedua, hak untuk mengangkat penghulu *Landraad* (sekarang bernama Pengadilan Negeri), ketua dan anggota *Raad* Agama yang dahulu ada di tangan pemerintah kolonial Hindia Belanda, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

Ketiga, hak untuk mengangkat penghulu masjid, yang dahulu ada tangan Bupati, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

Melalui perjuangan yang gigih dan tanpa pamrih para pendahulu kita, sejarah Kementerian Agama menyatu dengan sejarah NKRI. Bahkan dalam masa revolusi fisik dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan, Kantor Pusat Kementerian Agama turut hijrah ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Kementerian Agama di masa H.M. Rasjidi dapat disebut "kementerian revolusi", karena ketika awal dibentuk, Kementerian Agama sejak 12 Maret 1946 berkantor di ibukota revolusi, Yogyakarta.

Dalam Maklumat Kementerian Agama No. 1 tanggal 14 Maret 1946 diumumkan alamat sementara kantor pusat Kementerian Agama adalah di Jalan Bintaran No. 9 Yogyakarta. Kemudian bulan Mei 1946 alamat Kementerian Agama pindah ke Jalan Malioboro No. 10 Yogyakarta. Kantor ini tersedia berkat jasa baik tokoh Muhammadiyah K.H. Abu Dardiri dan K.H. Muchtar. Dalam waktu tersebut tugas-tugas Menteri Agama secara fakultatif tetap memiliki akses dengan Jakarta.

Setelah berdirinya Kementerian Agama, urusan keagamaan dan peradilan agama bagi umat Islam yang telah berjalan sejak prakemerdekaan menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.

Semula hal itu berlaku di Jawa dan Madura, tetapi setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didorong oleh mosi integral Mohammad Natsir (periode berlakunya UUDS 1950) dan penyerahan urusan keagamaan dari bekas negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) kepada Menteri Agama, maka secara *de jure* dan *de facto*, tugas dan wewenang dalam urusan agama bagi seluruh wilayah RI menjadi tanggung jawab Menteri Agama

Dalam perkembangan selanjutnya, diterbitkan lah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1951 antara lain menetapkan kewajiban dan lapangan tugas Kementerian Agama yaitu:

1. Melaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya;
2. Menjaga bahwa tiap- tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya;
3. Membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan aliran-aliran agama yang sehat;
4. Menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri;
5. Memimpin, menyokong serta mengamat-amati pendidikan dan pengajaran di madrasah madrasah dan perguruan-perguruan agama lain-lain;
6. Mengadakan pendidikan guru-guru dan hakim agama;
7. Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pengajaran rohani kepada anggota-anggota tentara, asrama-asrama, rumah-rumah penjara dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu;
8. Mengatur, mengerjakan dan mengamat-amati segala hal yang bersangkutan dengan pencatatan pernikahan, rujuk dan talak orang Islam;
9. Memberikan bantuan materiil untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat beribadat (masjid-masjid, gereja-gereja, dll);
10. Menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkut paut dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi;

11. Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf;
12. Mempertinggi kecerdasan umum dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama.

Pada waktu memperingati 10 tahun berdirinya Kementerian Agama, tahun 1956, Menteri Agama K.H. Muchammad Iljas menegaskan kembali politik keagamaan dalam Negara Republik Indonesia. Ditegaskannya, bahwa fungsi Kementerian Agama adalah merupakan pendukung dan pelaksana utama asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kondisi saat ini

Pada perkembangan selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, saat ini Kementerian Agama terdiri dari 11 unit eselon I yaitu : Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan, dan 7 Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Islam, Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bimbingan Masyarakat Islam, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Katolik, Bimbingan Masyarakat Hindu, Bimbingan Masyarakat Buddha, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Selain 11 unit kerja tersebut, Menteri Agama juga dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli dan 2 (dua) pusat yaitu : Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan, Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pusat Kerukunan Umat Beragama, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan unit kerja baru dan baru efektif melaksanakan tugasnya pada tahun 2017. BPJPH dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 dan pada tanggal tersebut juga diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsuddin.

Dalam Undang-Undang JPH, disebutkan bahwa BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang JPH diundangkan.

BPJPH merupakan unit eselon I di bawah Menteri Agama yang dipimpin oleh Kepala Badan, hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama yang mengatur ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Keberadaan BPJPH juga tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. PMA Nomor 42 Tahun 2016 mengatur mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing struktur BPJPH mulai dari eselon IV sampai dengan eselon I. Keputusan Menteri Agama RI No. 270 tahun 2016 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama yang di dalamnya ada Subprocess Map Penjaminan Produk Halal juga merupakan peraturan pelaksanaan UU JPH yang terkait dengan BPJPH.

Menurut UU JPH, dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal BPJPH berwenang antara lain: merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal pada produk luar negeri; dan melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri.

Pembahasan draf Rancangan Peraturan Pemerintan (RPP) secara internal Kementerian Agama dilakukan semenjak tahun 2014 sampai dengan Juli 2016, sedangkan pembahasan panitia antar Kementerian dilakukan pada bulan Agustus s.d. Desember 2016 atau sebanyak 12 x pertemuan.

Selain menyusun RPP, Kementerian Agama juga membuat Peraturan Menteri Agama, yang materi muatannya meliputi: jenis-jenis produk halal, sanksi, penyelia halal, tata cara permohonan sertifikat halal, lembaga pemeriksa halal, peran serta masyarakat, jenis hewan yang

diharamkan, kerja sama luar negeri, label halal, dan pengelolaan keuangan BPJPH.

Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penetapan kehalalan dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Ke depannya apabila diperlukan, maka BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Saat ini, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
7. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
9. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Sumber: Disarikan dari https://kemenag.go.id/artikel/sejarah

Lampiran Materi 2

Tugas dan Fungsi Kementerian Agama

VISI

"Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong".

(Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020)

MISI

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

(Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020)

Sumber: https://kemenag.go.id/artikel/visi-dan-misi-kementerian-agama

Lampiran Materi 3

Tugas dan Fungsi Kementerian Agama

Tugas :

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi :

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
7. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
9. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

SESI XII
KAPASITAS DAN CITRA DIRI PENGGERAK MODERASI BERAGAMA

A. Pengantar

Penguatan Moderasi Beragama hanya berhasil manakala para aktor penggerak, seperti ASN Kemenag, meyakini dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam perilaku dan tindakan kesehariannya. Nilai-nilai itu bersumber dari citra diri ASN Kemenag yang bersumber dan didasarkan pada Konstitusi dan UUD 1945 dan diturunkan dalam visi-misi serta tugas dan fungsi Kemenag RI.

Sesi ini bertujuan untuk membangun citra diri ASN Kemenag RI yang kuat dalam pengarusutamaan Moderasi Beragama di masyarakat. Citra diri ini harus mencerminkan nilai-nilai yang menegaskan bahwa ASN Kemenag adalah aparatur negara yang bersikap adil, imparsial, dan profesional dalam mengemban mandat perlindungan dan pelayanan bagi umat beragama di Indonesia.

B. Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu:

a. Mengenali praktik beragama moderat dan tidak moderat
b. Mengenali kapasitas dan citra diri penggerak Moderasi Beragama.
c. Memformulasikan peran penggerak Moderasi Beragama.

C. Pokok Bahasan

a. Deteksi Dini Praktik Beragama Moderat dan Tidak Moderat
b. Kapasitas dan Citra Diri Penggerak Moderasi Beragama (Wawasan Keagamaan, Wawasan Kebangsaan, Agensi Dan Kemampuan, Paham Konteks Kehidupan Beragama, dan Sikap Diri)
c. Peran Penggerak Moderasi Beragama

D. Metode

- Curah Pendapat
- Diskusi Kelompok dengan metode "*Hot 7 Dots*"

E. Waktu

135 menit (3 jam pelatihan).

F. Peralatan dan Bahan

- LCD
- Laptop/Komputer
- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting
- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoin
- Kertas
- Jaringan internet

G. Langkah-langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	10 menit	**Pengantar** 1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan tujuan sesi yakni, setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu: a. Mengenali praktik beragama moderat dan tidak moderat b. Mengenali kapasitas dan citra diri penggerak Moderasi Beragama. c. Memformulasikan peran penggerak Moderasi Beragama. 2. Fasilitator menjelaskan singkat hubungan sesi dengan pendekatan "Proses U".
2	30 menit	**Menggambar Kelompok Moderat *versus* Tidak Moderat** 1. Fasilitator membagi peserta menjadi enam kelompok dengan meminta peserta berhitung satu hingga enam. 2. Fasilitator membagi enam kelompok menjadi dua: ganjil (kelompok satu, tiga, dan lima) dan genap (kelompok dua, empat, dan enam). 3. Fasilitator meminta kelompok ganjil mengambil tempat sebelah kiri fasilitator dan genap sebelah kanan fasilitator.

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
		4. Fasilitator meminta panitia menyediakan satu kertas plano untuk masing-masing kelompok dan spidol untuk setiap anggota kelompok (1 orang, 1 spidol) sebagai alat untuk menggambar. 5. Fasilitator meminta kelompok ganjil untuk menggambar ciri-ciri, karakter, dan sifat atau simbol moderat, dan kelompok genap menggambar ciri-ciri, karakter, dan sifat atau simbol tidak moderat, dengan langkah-langkah berikut (dipandu secara ketat): ● Setiap orang pada setiap kelompok menempelkan alat tulis di kertas plano yang sudah disediakan dan secara bersama masing-masing membuat satu lingkaran di kertas plano tersebut. ● Menggunakan lingkaran-lingkaran tersebut, kelompok diminta untuk mulai menggambar dengan waktu 7 menit. **Catatan**. ketentuan menggambar di masing-masing kelompok dibebaskan. Mereka dapat menggambar sendiri-sendiri atau berembuk bersama. 6. Fasilitator meminta peserta untuk mengangkat tangan mereka ke atas sebagai tanda berhenti menggambar ketika sudah 7 menit. 7. Setelah setiap kelompok selesai menggambar, fasilitator meminta hasil gambar kelompok ganjil ditukar dengan kelompok genap seberangnya (menukar gambar kelompok moderat dengan gambar kelompok tidak moderat). Misalnya antara kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 2 dengan kelompok 3, dan seterunya. 8. Fasilitator meminta setiap kelompok melanjutkan gambar yang ada dengan instruksi awal. Dengan gambar yang ada, kelompok ganjil untuk mengubah gambar tidak moderat menjadi gambar moderat, sementara kelompok genap mengubah gambar moderat menjadi gambar tidak moderat. Waktu perubahan gambar 7 menit. 9. Setelah 7 menit, fasilitator meminta peserta untuk mengangkat tangan mereka ke atas sebagai tanda berhenti menggambar.
3	30 menit	**Presentasi Gambar** 1. Setelah waktu yang disediakan selesai, fasilitator mempersilakan masing-masing juru bicara yang sudah mereka tunjuk menjelaskan gambar masing-masing.

<table>
<tr><th>LANGKAH KE-</th><th>ALOKASI WAKTU</th><th>AKTIVITAS</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
2. Untuk menyemangati forum, fasilitator/trainer meminta peserta bermain “camera, rolling, action!” sebelum juru bicara menjelaskan gambar dengan langkah berikut:
a. Seorang peserta ditunjuk sebagai pembaca aba-aba. Misalnya dengan berhitung satu-dua-tiga.
b. Seluruh peserta, kecuali juru bicara, menekuk siku dan mengangkat siku dan mengarahkan pada juru bicara seolah-olah sedang memanggul kamera sembari berteriak “camera, rolling, action!”
c. Fasilitator mempersilakan setiap juru bicara menjelaskan gambar yang diterima dan ciri-cirinya, serta bagaimana mengubahnya. Masing-masing selama 7 menit.
3. Fasilitator mencatat karakteristik moderat dan tidak moderat di balik gambar atau pernyataan yang disampaikan juru bicara dalam presentasi dan anggota kelompok dalam sesi diskusi dan tanggapan.
4. Fasilitator mengklarifikasi kepada peserta karakteristik tersebut. Misalnya berikut ini.
<table>
<tr><th>MODERAT</th><th>TIDAK MODERAT</th></tr>
<tr><td>● Tidak mengganggu orang lain, meskipun dalam pelaksanaan agama
● Inklusif (terbuka)
● Dalam konteks kebangsaan diorientasikan pada Pancasila</td><td>● Mengganggu orang lain dalam pelaksaan agama
● Bersaing antaragama
● Penyegelan rumah ibadah di luar hukum
● Saling mengganggu dalam beragama</td></tr>
</table>
5. Fasilitator meminta satu-dua peserta menanggapi atau bertanya tentang karakteristik yang sudah dituliskan tersebut.
Tips. Fasilitator dapat menggali dan menyatakan apakah pekerjaan menggambar ini pekerjaan yang tampak ringan, tapi memberi pesan penting antara lain, pertama, kebanyakan orang melambangkan moderat tidak moderat dengan simbol tertentu seperti jenggot, celana cingkrang; kedua, kita sering menghadapi kenyataan yang tidak kita inginkan, tapi setiap orang punya potensi/kekuatan untuk mengubahnya
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>55 menit</td><td>1. Fasilitator menjelaskan relevansi metode menggambar untuk membantu peserta pelatihan dalam merumuskan citra diri ASN Kemenag RI.</td></tr>
</table>

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
		2. Fasilitator menjelaskan Kapasitas yang harus dimiliki ASN dalam penguatan Moderasi Beragama. **Catatan.** Fasilitator menayangkan bahan tayang Kapasitas ASN Kemenag dalam Penguatan Moderasi Beragama. 3. Fasilitator membagi peserta dalam lima kelompok berdasarkan tema ● Kelompok 1 Wawasan Keagamaan ● Kelompok 2 Wawasan Kebangsaan ● Kelompok 3 Kecakapan ● Kelompok 4 Sikap Diri ● Kelompok 5 Paham Konteks Persoalan kehidupan Keagamaan 4. Fasilitator meminta masing-masing kelompok mendiskusikan: ● Praktik baik dan praktik buruk ● Apa yang wajib dilakukan? ● Apa yang dilarang dilakukan? 5. Fasilitator meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 6. Fasilitator memberi kesempatan anggota kelompok menambahkan informasi dan peserta di luar kelompok yang mempresentasikan menanggapi.
5	10 menit	**Penutup** 1. Fasilitator mengulang kembali poin-poin penting yang sudah dibahas sambil mengaitkan dengan sikap yang seharusnya dilakukan oleh ASN Kemenag sebagai bagian dari citra diri seorang moderat dalam beragama, dan juga sikap ASN Kemenag dalam memandang negara ini dan menjalankan fungsinya. 2. Fasilitator trainer menutup sesi.
Total	**135 menit**	

H. Lampiran Materi

a. Kapasitas ASN Kemenag dalam Penguatan Moderasi Beragama.

I. Bahan Tayang

a. Kapasitas ASN Kemenag dalam Penguatan Moderasi Beragama.

Lampiran Materi 1
Kapasitas ASN Kemenag dalam Penguatan Moderasi Beragama.

KAPASITAS ASN KEMENAG DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

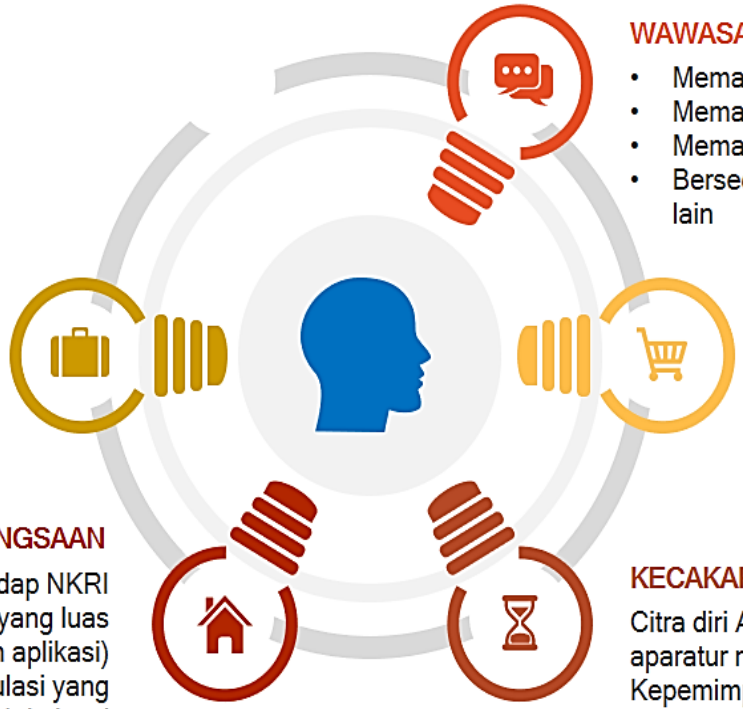

WAWASAN KEAGAMAAN

- Memahami nilai universal ajaran agama
- Memahami argumentasi teologis MB
- Memahami indikator MB
- Bersedia menghormati keyakinan umat agama lain

SIKAP DIRI

Memiliki nilai-nilai Kemenag, inklusif, demokratis, egaliter dan moderat, humanis, non diskriminatif, berani, anti kekerasan

KECAKAPAN

Citra diri ASN Kemenag (konsep diri sebagai aparatur negara untuk urusan agama), Kepemimpinan, Keterampilan membangun jejaring, kemampuan membentuk pemahaman, resolusi konflik, berpikir kritis, analisis sosial, literasi digital

WAWASAN KEBANGSAAN

- Memiliki komitmen terhadap NKRI
- Memiliki wawasan kebangsaan yang luas
- Memahami regulasi (konsep dan aplikasi)
- Mendukung dan implementasikan regulasi yang adil dan non diskriminasi
- Memiliki kesadaran menjadi ASN Kemenag adalah wujud keimanan
- Memiliki kesadaran menerima kesetaraan warga negara adalah bagian dari ajaran agama

PAHAM KONTEKS PERSOALAN KEHIDUPAN KEAGAMAN

- Memahami konteks yang membenturkan agama dan negara
- Memahami konteks benturan paham dan praktik keagamaan dalam ruang intra (internal) agama
- Memahami REEVE (*Religious, Excluvism, Extremism, Violent Extremism*)

SESI XIII
EKOSISTEM MODERASI BERAGAMA

A. Pengantar

Materi ini terkait dengan pemahaman peserta tentang peran aktor, posisi, dan jejaring dalam keberagamaan. Yakni, bagaimana menerapkan Moderasi Beragama ini dalam ekosistem tugas dan fungsi pekerjaan dan masyarakat. Sesi ini merupakan bagian dari sikap dan peran Kementerian Agama dalam penerapan Moderasi Beragama di antara *stakeholder* yang lain. Sesi ini juga mengajak peserta untuk memandang kondisi Moderasi Beragama di Indonesia saat ini dan seperti apa seharusnya kondisi ideal yang seharusnya ada.

B. Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu:

1. Mempraktikkan analisis aktor sosial politik terhadap isu-isu intoleransi dengan Teater Pertunjukan Sosial (*Social Presencing Theatre);*
2. Merekomendasikan peta ideal aktor dan jejaring kerja untuk Penguatan Moderasi Beragama.

C. Pokok Bahasan

1. Analisis Aktor Sosial Politik dalam Isu Intoleransi dan Ekstremisme Kekerasan.
2. Pemetaan Ideal Aktor dan Jejaring Kerja untuk Moderasi Beragama.

D. Metode

- Pemetaan empat dimesi (*four D's mapping*) dengan Teater Pertunjukan Sosial (*Social Presencing Theatre*)
- Curah Pendapat
- Refleksi

E. Waktu

135 menit (3jam pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

- Laptop/komputer/gadget
- Kamera
- Spidol besar dan kecil
- Kertas plano
- Bolpoin
- Kertas
- Kertas ukuran 15X10 cm sebanyak 15-20 buah.
- Tali kalung sebanyak 15-20

G. Langkah-langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	10 menit	**Pengantar** 1. Fasilitator memastikan para peserta duduk di kursi yang dibentuk melingkar (berbentuk h U) dan area tengah lebih luas untuk tempat melakukan Teater Pertunjukan Sosial. 2. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi ini, yakni setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu: a. Mempraktikkan analisis aktor sosial politik terhadap isu-isu intoleransi dengan Teater Kehadiran Sosial (*Social Presencing Theatre);* b. Merekomendasikan peta ideal aktor dan jejaring kerja untuk Penguatan Moderasi Beragama. 3. Fasitator menjelaskan untuk mencapai tujuan sesi di atas, peserta akan diminta untuk mengikuti Teater Pertunjukan Sosial (*Social Presencing Theater)*. 4. Fasilitator menjelaskan singkat sejarah dan apa itu Teater Pertunjukan Sosial.

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
2	20 menit	**Persiapan** Teater Pertunjukan Sosial 1. Untuk uji coba, fasilitator meminta peserta berakting setotal mungkin ketika mengalami atau melihat situasi yang disebutkan fasilitator ● Peserta melihat jumlah uang besar dalam rekening! ● Peserta dikunjungi Menteri Agama ● Peserta sedang memarahi staf ● Peserta diomeli istri. ● Peserta dimarahi suami. **Catatan:** Jumlah kertas dan kalung disesuaikan dengan tema dan peran yang dipilih. 2. Fasilitator menjelaskan tema yang akan dimainkan para aktor. Misalnya, tema **perkembangan gerakan ekstrem di sekolah negeri di kabupaten/kota para peserta.** Banyak pelajar mulai terpapar paham ekstrem di daerah itu. **Catatan**. Sebelum pelatihan dilaksanakan, tim fasilitator telah menyepakati kasus dan aktor yang dipilih pada Teater Pertunjukan Sosial. Kasus disesuaikan dengan isu atau tugas dan fungsi yang dijalankan tempat peserta beraktivitas. 3. Fasilitator menjelaskan apa yang harus dilakukan para aktor (*stakeholders*) dalam memperagakan masalah di atas. ● Para aktor diminta melakukan sesuai peran yang sudah ditetapkan. ● Para aktor diminta memperhatikan empat hal dalam melakukan peran: 1) **Pose.** Gerakan apa yang dipilih? Misalnya menunjuk tangan atau bertolak pinggang. 2) **Posisi.** Posisi apa yang dipilih? Misalnya mengambil posisi yang dekat atau jauh dengan aktor-aktor lain. 3) **Arah.** Arah mana yang dipilih? Menghadap atau membelakangi aktor tertentu? 4) **Tinggi-rendah.** Mana yang dipiliha aktor? Tinggi atau rendah. Pilihan relasi itu menunjukkan makna dan hubungan antar aktor. Aktor yang duduk di bawah, sementara aktor lain berdiri menunjukkan relasi yang berbeda.

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
		● Peserta yang tidak mengambil peran aktor diminta menjadi pengamat teater dengan tugas mencatat posisi, arah, pose, dan tinggi-rendah. 4. Fasilitator meminta seorang fasilitor lain atau peserta menjadi relawan untuk berperan sebagai pelajar yang terpapar paham ekstremisme. 5. Fasilitor meminta fasilitator lain atau peserta yang menjadi relawan tersebut maju ke depan dan berakting. Akting tersebut dibebaskan sesuai pandangan dan keinginan relawab. Misalnya, duduk bersila di tengah lokasi teater. 6. Fasilitator meminta peserta lain memperhatikan contoh akting tersebut. Catatan. Untuk tema perkembangan gerakan ekstrem di sekolah negeri di kabupaten/kota para peserta, berikut ini aktor-aktor yang dimainkan: ● Kemenag Pusat ● Kepala Kantor Kemenag ● Bupati ● Politisi ● Media sosial ● Media Massa ● Karim (organisasi yang terafiliasi dengan HTI) ● Ormas Islam ● Tokoh agama ● Remaja ● Guru ● Kepala sekolah ● Kepala Dinas Pendidikan ● Orang Tua ● Kapolres **Catatan.** Panitia sudah menyiapkan peralatan untuk aktor-akto tersebut. Peralatan dapat dibuat dari kertas karton yang dipoton persegi panjang dengan tulisan nama masing-masing aktor Kertas karton itu diikat antarujung untuk dikalungkan.
3	70 menit	**Teater Pertunjukan Sosial** **Babak Pertama** 1. Fasilitator menyebutkan satu per satu para aktor yang peserta yang diminta berperan untuk menjadi aktor-aktor yang sudah ditetapkan maju ke lokasi teater. Para aktor yang dipanggil diminta langsung diminta mengambil

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
		posisi atau pose yang mereka pilih. Misalnya, orang tua mengambil posisi duduk dan memegang *handphone* seolah-seolah sedang mengikuti pertemuan daring. Ini merupakan **babak pertama** Teater Pertunjukan Sosial**.** 2. Setelah semua aktor sudah berpose dan mengambil posisi masing-masing, fasilitator meminta peserta lain (yang merepresentasikan masyarakat) yang tidak ikut berakting, memberikan pertanyaan atas peran yang mereka lihat. Peserta diminta **hanya bertanya** atas apa yang mereka lihat dan tidak memberi penilaian atau komentar bagaimana seharusnya. 2. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta yang berperan untuk menjelaskan alasan kenapa ia memilih berada pada posisi dengan pose seperti itu. Fasilitator dapat memberi kesempatan kepada 5-6 aktor merespons. Fasilitator sekaligus merangkum tanggapan dari peserta secara lisan. **Babak Kedua** 1. Fasilitator mengajak para aktor memainkan teater **babak kedua**. Di babak ini, para aktor diminta mengubah posisi sesuai yang mereka pikirkan dan menggambarkan situasi saat ini terkait **perkembangan gerakan ekstrem di sekolah negeri di kabupaten/kota para peserta.** Peserta berakting tanpa ada komunikasi verbal. 2. Setelah aktor semua pemeran berpindah atau mengubah posisi mereka, fasilitator menanyakan ke beberapa peserta: **mengapa mereka berpindah posisi? Mengapa posisinya mendekati aktor lain?** 3. Fasilitator memberi kesempatan kepada 4-5 orang peserta yang berperan untuk menjawab. 3. Fasilitator meminta peserta 3-4 peserta yang tidak berperan (masyarakat) memberikan tanggapan mereka apakah posisi dan peran yang dipilih para aktor menggambarkan situasi dan kondisi aktual. 4. Fasilitator merangkum komentar dan respons para aktor dan peserta lain (masyarakat) diberikan. **Babak Ketiga** 1. Fasilitator mengajak para aktor memainkan teater **babak Ketiga**. Di babak ini, para aktor diminta mengubah posisi sesuai yang mereka pikirkan dan menggambarkan situasi yang ideal terkait **perkembangan gerakan**

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
		ekstrem di sekolah negeri di kabupaten/kota para peserta. Peserta berakting tanpa ada komunikasi verbal. 2. Fasilitator meminta 5-6 orang dari peserta (masyarakat) dan para pemeran mendiskusikan beberapa pertanyaan kunci berikut: a. Apakah akting peran yang tampak di babak ketiga sudah ideal? b. Jika belum, bagaimana seharusnya? c. Apa yang akan terjadi jika gambaran ideal itu betul-betul terjadi? 3. Fasilitator membuat rangkuman terhadap respons peserta.
4	25	**Refleksi** 1. Fasilitator mengajak 3-4 peserta menyampaikan tanggapan tentang apa yang dirasakan setelah mengikuti sesi ini dan apa yang ingin dilakukan.
5	10 menit	**Penutup** Fasilitator merangkum tanggapan peserta dan menutup sesi.
Total	**135 menit**	

5. Lampiran Materi

1. Teater Pertunjukan Sosial (*Social Presencing Theater)*.

Lampiran Materi 1

Teater Pertunjukan Sosial (*Social Presencing Theater)*.

Pendekatan ini dilakukan para aktor yang dipilih melakukan *pose non-verbal* (hanya dengan gerakan dan ekspresi) sesuai dengan peran-peran tertentu yang menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Untuk itu, peserta diharapkan berperan atau berpose dengan ekspresi dan bahasa tubuh yang menjiwai peran itu sesuai dengan persepsi mereka terhadap peran itu. Misalnya, seorang perempuan korban KDRT, melakukan *pose* dengan duduk, kaki ditekuk, dan menundukkan kepala. Peserta yang tidak ikut berperan dianggap sebagai masyarakat umum yang menjadi sasaran dari pelayanan tiap peran. Tugasnya memberikan pertanyaan atau komentar atau peran yang diperagakan para aktor.

SESI XIV
STRATEGI PENGUATAN MODERASI BERAGAMA: PROSES U

A. Pengantar

Berdasarkan perundang-undangan, agama menjadi kewenangan pemerintah pusat di mana institusi yang mengurus agama adalah Kemenag. Di tengah banyaknya peristiwa intoleransi dan ekstremisme kekerasan berbasis sentimen agama, Kemenag menjadi tumpuan banyak pihak. Di banyak kasus intoleransi dan kekerasan agama, ada kecenderungan aparatur negara yang semestinya bertindak berdasarkan norma-norma konstitusi justru tunduk pada tuntutan kelompok intoleran. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak mengabaikan fakta-fakta yang dihadapi.

Sebelumnya, peserta sudah diajak untuk memikirkan kembali *(rethinking)* atas mental model yang sudah terbentuk. Peserta juga sudah diajak untuk melakukan pemetaan jaringan aktor melalui materi ekosistem Moderasi Beragama. Kali ini, peserta diajak untuk merespons masalah-masalah yang sudah ditemukan melalui Analisis Gunung Es (*Iceberg Analysis*) sebelumnya dengan menggunakan Proses U.

B. Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu:

1. Merekomendasikan langkah-langkah intervensi untuk praktik beragama yang transformatif.
2. Menyusun rencana aksi Penguatan Moderasi Beragama di lingkungan kerja dan masyarakat dengan Teori Proses U.

C. Pokok Bahasan

1. Pengembangan Langkah Intervensi Untuk Perubahan Beragama Yang Transformatif.
2. Teori Proses U (*Rethinking*, *Redesigning*, *Reframing*, *Reacting*).

D. Metode

- *U Process*
- Tanya-jawab dengan *Menti.com*
- Diskusi kelompok
- *World Café*

E. Waktu

255 menit (5 jam pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

- LCD
- Laptop/Komputer
- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting
- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoin
- Kertas
- Jaringan internet

G. Langkah-langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	10 menit	**Pengantar:** 1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi ini, yakni setelah sesi ini, peserta mampu: a. Merekomendasikan langkah-langkah intervensi untuk praktik beragama yang transformatif. b. Menyusun rencana aksi Penguatan Moderasi Beragama di lingkungan kerja dan masyarakat dengan Teori Proses U. 2. Fasilitator mengajak peserta melanjutkan *iceberg analysis* dengan menggunakan proses U.

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
		3. Fasilitator mengaitkan materi ini dengan rumusan-rumusan peserta sebelumnya dengan mengangkat beberapa kasus keagamaan. Cara ini digunakan untuk menunjukkan peran ideal Kemenag yang belum maksimal dilakukan.
2	75 menit	**Proses U** 1. Fasilitator mengajak peserta *membuka www.menti.com*. 2. Fasilitator meminta peserta untuk menjawab beberapa pertanyaan melalui *menti.com.* Konteks persoalan yang diangkat adalah *berkembangnya kelompok masyarakat yang beragama secara ekstrem dan Kemenag belum optimal meresponsnya***.** Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab peserta adalah: a. Apa tren/perkembangan yang menyebabkan Kemenag belum optimal menghadapi berkembangnya kelompok ekstremisme beragama? b. Apa saja kondisi struktural dan sistemis yang menyebabkan tren tersebut? (Dimensi struktural, tradisi, organisasi masyarakat, kebijakan pemerintah dst). 3. Setelah peserta menjawab pertanyaan, fasilitator membacakannya dan mengajak peserta untuk mendiskusikannya. 4. Fasilitator melanjutkan dengan membagi peserta menjadi beberapa kelompok, dengan tugas membahas mental model yang berkembang di masing-masing dimensi sistem yang telah dibahas, yaitu: ● Dimensi ASN Kemenag ● Dimensi kelompok ekstrimis ● Dimensi stakeholder non-Kemenag **Tips.** Fasilitator dapat menginformasikan kepada peserta tentang mental model dalam bentuk keyakinan terhadap dalil-dalil keagamaan kelompok ekstremis. 5. Fasilitator mempersilakan masing-masing menyampaikan hasil diskusi kelompok. 6. Dari diskusi, fasilitator mencatat mental model yang berkembang di kalangan ASN Kemenag, kelompok ekstremis, dan moderat. Misalnya, mental model ASN Kemenag hasil diskusi sebagai berikut: 1. MB dinilai belum urgen; 2. Pelaksanaan kegiatan bersifat formalitas; 3. Sanksi belum efektif;

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
		4. Masih fokus pada tugas dan fungsi masing-masing; 5. ASN Kemenag merasa belum memiliki kewenangan yang memadai; 6. Kemenag masih bergantung pada penguasa 7. Bersifat apatis. 7. Fasilitator menutup tahapan ini dengan menjelaskan singkat poin-poin diskusi dan menghubungkan dengan tahapan berikutnya.
3	75	***Rethinking*** 1. Fasilitator meminta peserta bergabung kembali dalam kelompok sesuai pembagian kelompok dalam sesi grup diskusi yang membahas mental model. 2. Fasilitator meminta masing-masing kelompok mendiskusikan dan merumuskan *Rethinking* Kemenag (baru) dan dalil-dalil atau keyakinan Moderat. 3. Fasilitator meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 4. Fasilitator mencatat mental model baru berdasarkan hasil diskusi kelompok. Rumusan *rethinking* mental model baru Kemenag, misalnya sebagai berikut: • Moderasi Beragama menjadi program prioritas Kemenag • Militansi ASN adalah suatu kemutlakan • Sanksi yang tegas sangat dibutuhkan untuk kedisiplinan • Moderasi Beragama melekat pada jati diri ASN Kemenag • Program kemenag berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan, termasuk Moderasi Beragama • ASN Kemenag memiliki kewenangan absolut di bidang agama • ASN Kemenag harus percaya diri dengan kewenangan absolutnya • Kemenag saling berkolaborasi dan bersinergi dengan penguasa wilayah • Otoritas Kemenag diperluas dalam bidang keagamaan • ASN Kemenag harus memiliki *sense of belonging* terhadap NKRI • ASN Kemenag harus memiliki akses dan kewenangan terhadap praktik keagamaan lembaga/instansi lain

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
		5. Fasilitator merespons hasil diskusi kelompok tentang dalil atau keyakinan moderat. **Catatan.** Jika masih ada dalam forum, Fasilitator dapat meminta narasumber Nilai-Nilai Universal dan Landasan Teologi Moxderasi Beragama 6. Fasilitator menutup diskusi dengan penjelasan singkat isu penting dalam tahapan ini dan menghubungkan dengan tahapan berikutnya.
4	55 menit	**Diskusi Kelompok (*World Cafe*):** 1. Fasilitator membagi peserta menjadi tiga kelompok berdasarkan tiga kelompok sasaran MB: a. Kemenag b. Pemangku kepentingan (*stakeholder*s) non-Kemenag, c. Masyarakat. 2. Setiap kelompok diminta menjawab pertanyaan: a. Apa target yang ingin dicapai? b. Apa strategi mencapai target dan program? c. Apa saja yang perlu diperhatikan untuk memperkuat Moderasi Beragama dalam rangka menghadapi ekstremisme? 3. Setelah selesai, masing-masing kelompok berkunjung ke kelompok lain. Satu orang perwakilan kelompok tetap menjaga "cafe" untuk menerima kunjungan kelompok lain dan bertugas menjelaskan apa saja hasil diskusi kelompoknya. 4. Dalam kunjungan ini, pengunjung bisa memberikan pertanyaan, mengklarifikasi, atau mengonfirmasi, sehingga terjadi diskusi antara pengunjung dengan perwakilan kelompok yang dikunjungi.
5	10 menit	**Penutup** Fasilitator/trainer menutup sesi dengan menekankan kembali bahwa mengapa selama ini peran ideal Kemenag belum tercapai secara maksimal salah satunya adalah karena program-program disusun tidak berdasarkan analisis yang memadai.
Total	**225 menit**	

H. Lampiran Materi

1. Model Analisis Gunung Es dengan Proses U (*Iceberg Model with U-Process*)

Lampiran Materi 1

Model Analisis Gunung Es dengan Proses U
(*Iceberg Model with U-Process*)

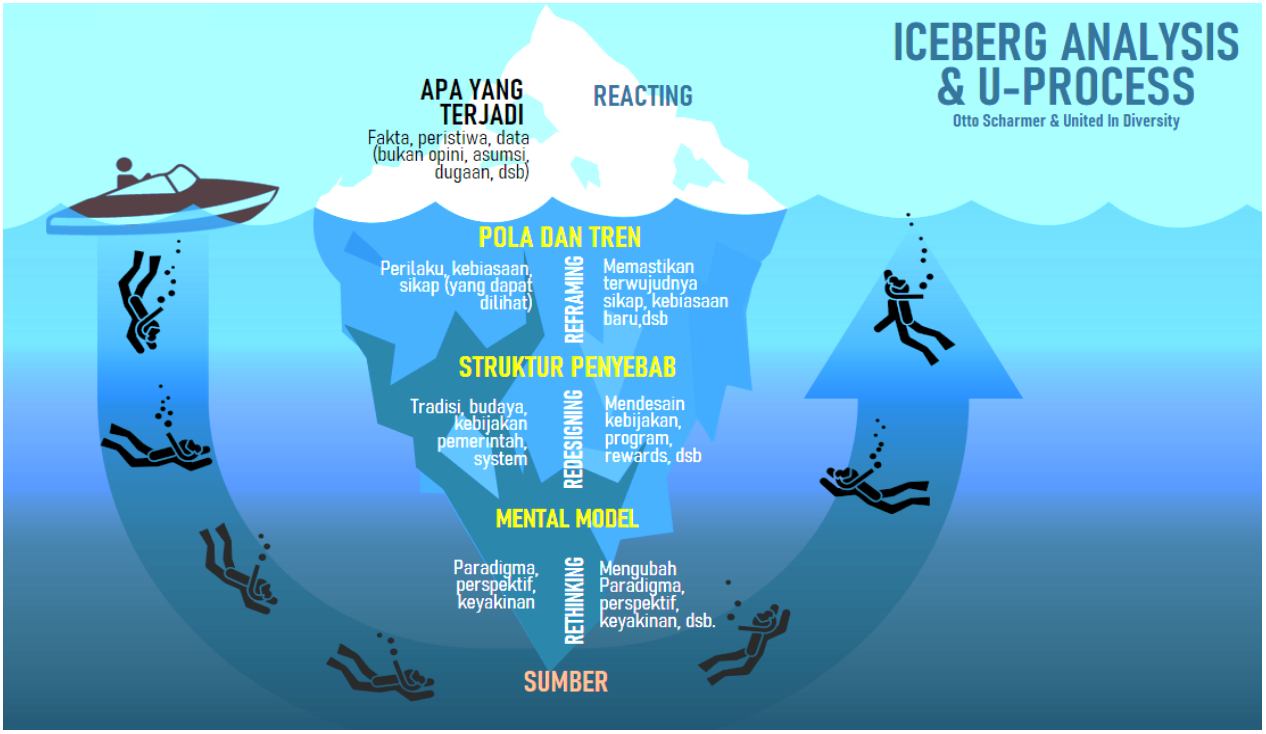

- Dikembangkan oleh Otto Scharmer dengan kombinasi *Iceberg Model & Proses U*.
- Analisis dilakukan di sisi kiri dari lapisan teratas ke arah bawah:
  - Asesmen fenomena tampak
  - Analisis pola/kecenderungan
  - Analisis struktur & sistem sosial
  - Analisis mental model (paradigma)
  - Menemukan sumber model mental
- Intervensi dilakukan di sisi kanan dari lapisan terbawah ke atas.
  - *Rethinking* (mengembangkan paradigma baru) yang idealnya diambil dari sumber mental model yang akan diubah.
    - *Redesigning* (menata ulang struktur dan sistem, melakukan inovasi) yang akan digunakan untuk membangun mental model

(paradigma) baru dalam masyarakat dan akan menjadi dasar perubahan fenomena.

- *Reframing* (membingkai ulang pola/kecenderungan yang ada, termasuk mendorong pola/kecenderungan baru yang lebih ideal).
- *Future reality* (mengimajinasikan, menginisiasi dan mengawal fenomena sosial baru yang akan diwujudkan).

SESI XV
MEMBANGUN GERAKAN: KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN

A. Pengantar

Setelah peserta merumuskan mental model baru hingga menyusun program, pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana program-program itu dijalankan? Bagaimanapun juga, program hanya akan berhenti sebatas program. Perubahan ditentukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang secara indah kita angankan.

Sesi ini mengajak peserta untuk mulai membangun gerakan. Kepemimpinan dan kepeloporan adalah salah satu kunci penting dalam membangun gerakan. Program bisa dijalankan melalui kepemimpinan yang mengarahkan dan kepeloporan yang menginspirasi.

B. Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu:

1. Mengidentifikasi nilai dan karakteristik kepemimpinan ideal;
2. Mengenali nilai-nilai kepeloporan;
3. Menunjukkan sikap yang mendukung nilai-nilai perubahan transformative.

C. Pokok Bahasan

1. Kepemimpinan
2. Kepeloporan
3. Perubahan Transformatif

D. Metode

- Menonton film
- Studi kasus
- Diskusi

E. Waktu

90 menit (2 jam pelatihan)

F. Peralatan dan bahan

- LCD
- Laptop/Komputer
- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting
- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoin
- Kertas

G. Langkah-langkah Fasilitasi

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
1	5 menit	**Pengantar:** Fasilitator membuka dan menjelaskan tujuan sesi, yaitu meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan kepeloporan yang sesuai untuk melakukan penguatan Moderasi Beragama di lingkungan kerja dan masyarakat.
2	30 menit	**Menonton video:** 1. Fasilitator mengajak peserta menonton video yang berkisah tentang kepeloporan. **Catatan.** Fasilitator dapat memilih film *Tree* (lihat sinopsis film *Tree* dalam lampiran materi). Fasilitator dapat memilih film lain yang dinilai lebih cocok untuk tujuan materi dan karakteristik peserta. 2. Setelah menonton film, fasilitator mengajak peserta mendiskusikan film dengan melontarkan pertanyaan: apa yang bisa dipelajari dari film tersebut? 3. Peserta dipersilakan memberi komentar dan mendiskusikannya. 4. Fasilitator menulis jawaban-jawaban dari peserta. **Contoh.** Kepemimpinan dan Kepeloporan adalah: ● Tidak mudah menyerah ● Keteladanan ● Walau sendirian harus mulai

		● Harus memulai, meski awalnya tidak yakin berhasil. ● Harapan ● Dukungan ● Kekuatan ● Ketulusan ● Tidak apatis terhadap masalah, tapi merespons dengan aktif. ● Menginspirasi.
	30	**Presentasi Materi** 1. Fasilitator menjelaskan fungsi kepemimpinan dan kepeloporan. **Catatan.** Fasilitator menayangkan gambar 5 Level of Leadership; kepemimpinan=Pengaruh=Kepercayaan; dan Karakter dan Kompetensi pada Lampiran Materi.
3	20 menit	**Tanya Jawab**: 1. Fasilitator mempersilakan peserta untuk bertanya 2. Fasilitator merespons atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan peserta. **Catatan.** Fasilitator dapat meminta peserta berbagi pengalaman tentang kasus-kasus yang mereka alami terkait kepemimpinan dan kepeloporan .
4	5 menit	**Penutup**: 1. Fasilitator menutup sesi dengan merangkum poin-poin penting yang sudah dibahas, dan menghubungkannya dengan sesi selanjutnya.
	180 menit	

H. Lampiran Materi

1. Sinopsis film

I. Bahan Tayang

1. Kepemimpinan dan Kepeloporan**Lampiran Materi 1**

Sinopsis Film *Tree*.

Film ini berkisah tentang kepeloporan. Seorang anak kecil mengambil inisiatif memindahkan batang pohon besar yang roboh dan melintang di tengah jalan saat hujan deras hingga membuat jalanan macet. Kendaraan terjebak dalam kemacetan total. Di saat orang-orang lain merasa kesal karena kemacetan parah yang tidak bisa diurai, saling menyalahkan, atau memilih memutar jalan dan meninggalkan batang pohon tetap ada di sana,

si anak kecil itu memutuskan turun dari kereta, membiarkan tubuhnya basah kuyup terkena air hujan, dan mulai mendorong batang pohon yang jelas tenaganya tak mungkin mampu menggesernya seinci pun. Tapi, kepeloporan ini akhirnya menggerakkan banyak orang. Satu per satu orang turun dari kendaraannya untuk turut memindahkan batang pohon. Dan, akhirnya berhasil!.

Dapat dilihat melalui link ini

https://www.youtube.com/watch?v=wblstQNEm3Y

Lampiran Materi

KEPEMIMPINAN

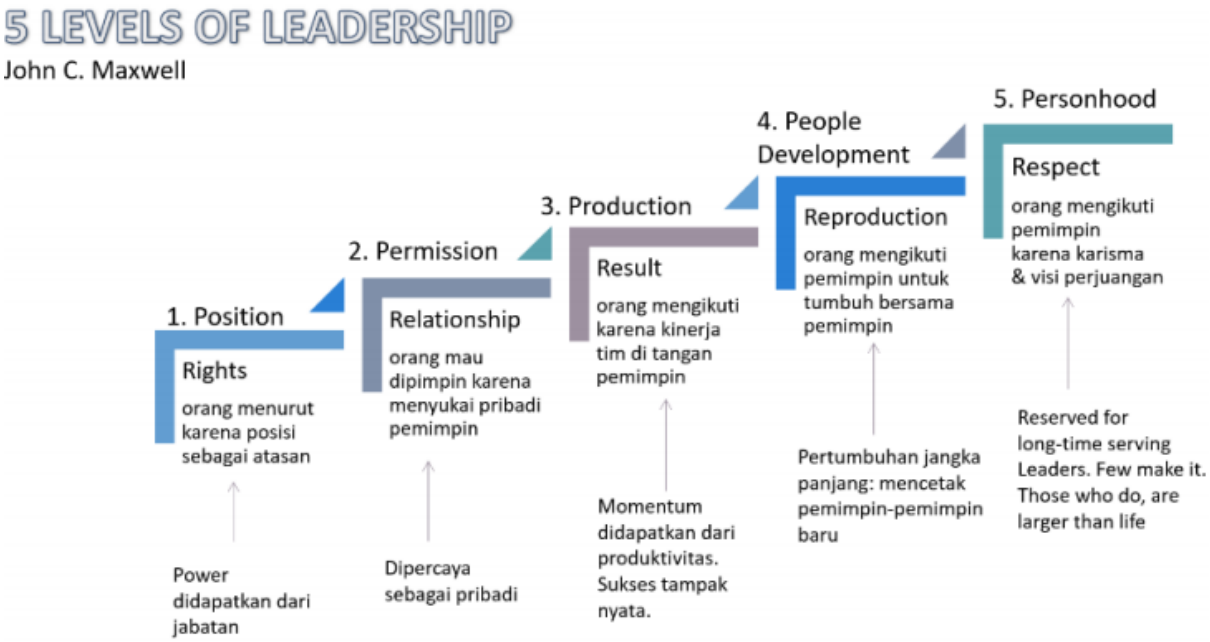

- Lima Tingkat Kepemimpinan dari John C. Maxwell, yang menekankan pada pemahaman bahwa :
  - setiap anak tangga kepemimpinan dilandasi oleh kemampuan di tingkat bawahnya.
  - setiap tingkat kepemimpinan memiliki prakondisi dan karakteristik yang berbeda

- seorang pemimpin di setiap tingkat tidak dapat mempengaruhi seorang pemimpin pada tingkat di atasnya.

- Lima tingkat kepemimpinan tersebut adalah :
  - Kepemimpinan tingkat 1 : karena Posisi
  - Kepemimpinan tingkat 2 : karena Hubungan
  - Kepemimpinan tingkat 3 : karena Produktivitas
  - Kepemimpinan tingkat 4 : karena Pengembangan SDM
  - Kepemimpinan tingkat 5 : karena Karisma
- Seorang penggerak jejaring setidaknya perlu memiliki modal kepemimpinan di tingkat dua, yaitu kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan publik dan dengan anggota jejaring.
- Pemimpin yang bertumpu pada hubungan mensyaratkan kredibilitas yang tinggi. Stephen Covey, Jr. mengembangkan konsep kredibilitas pribadi dengan rumus seperti gambar berikut :

Karakter ditambah kompetensi seorang pemimpin akan menghasilkan kredibilitas. Dari kredibilitas itulah orang akan memberikan penilaian. Dari penilaian, pengaruh akan didapat. Tinggi rendahnya pengaruh bergantung pada tinggi-rendahnya penilaian. Tinggi rendahnya penilaian bergantung

pada tinggi rendahnya kredibilitas. Tinggi rendahnya kredibilitas bergantung pada tinggi rendahnya karakter dan kompetensi seseorang. Artinya kunci kredibilitas seorang pemimpin ada pada kompetensi dan karakter. Hal-hal yang terkait dengan karakter dan kompetensi ada pada gambar berikut:

SESI XVI
MEMBANGUN GERAKAN :
BINA DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK

A. Pengantar

Terciptanya praktik Moderasi Beragama membutuhkan serangkaian upaya terencana membangun perdamaian, pencegahan, dan penanganan konflik. Langkah ini mensyaratkan tersedianya sumber daya manusia dan aktor-aktor yang tidak hanya memiliki kemampuan dalam membangun perdamaian dan nilai-nilai moderasi, namun juga kemampuan mencegah dan menangani konflik-konflik keagamaan.

Sesi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam bina damai dan resolusi konflik. Setelah mengikuti sesi ini, peserta memiliki pengetahuan tentang kemampuan praktis mengidentifikasi dan memilih langkah-langkah menyasar sumber-sumber konflik keagamaan; tips-tips praktis mencegah dan menangani konflik keagamaan.

B. Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu:

1. Mengenali kecakapan utama dalam menejalankankan Bina Damai;
2. Mengenali kecakapan utama dalam melakukan Resolusi Konflik.

C. Pokok Bahasan

1. Bina damai
2. Resolusi konflik

D. Metode

- Ceramah
- Tanya-jawab
- Studi kasus

E. Waktu

90 menit (2 jam pelatihan).

F. Peralatan dan Bahan

- LCD

- Laptop
- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting
- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoin

G. Langkah-langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	10 menit	**Pengantar:** 1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan tujuan sesi, yaitu setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu: a. Mengenali kecakapan utama dalam menejalankankan Bina Damai; b. Mengenali kecakapan utama dalam melakukan Resolusi Konflik. 2. Fasilitator mengaitkan materi dalam sesi ini dengan materi-materi sebelumnya dan pentingnya materi ini dengan tugas, fungsi, dan tanggung peserta di Kementerian Agama 3. Fasilitator memperkenalkan nara sumber dan materi pokok yang akan disampaikan. a. Konsep bina damai dan resolusi konflik. b. Kapasitas minimal dalam bina damai dan resolusi konflik. c. Tips praktis bina damai dan resolusi konflik. d. Contoh kasus bina damai dan resolusi konflik terkait isu-isu keagamaan berdasarkan pengalaman narasumber. **Catatan.** Jika *narasumber* merupakan *narasumber pakar,* panitia dan fasilitator perlu memastikan kesesuaian dengan kualifikasi berikut: 1. Memiliki kepakaran terkait topik yang disampaikan 2. Pernah terlibat dalam satu atau lebih pelatihan PMB 3. Membaca modul Sketsa Kehidupan Keberagamaan.

		4. Menyiapkan materi dengan kisi-kisi yang diberikan. 5. Direkomendasikan dan/atau mendapat persetujuan dari Pokja. Jika *narasumber* merupakan *narasumber fasilitator,* panitia dan tim fasilitator perlu memastikan bahwa narasumber memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dan bersedia mengikuti kisi-kisi yang diberikan.
2	75 menit	**Pemaparan Materi dan Tanya Jawab** 1. Fasilitator memprilakan narasumber menyampaikan materi dengan kisi-kisi yang sudah diberikan. 2. Fasilitator mempersilakan peserta bertanya atau menanggapi presentasi narasumber. 3. Fasilitator mempersilaka narasumber menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari peserta. 4. Fasilitator mengajak beberapa peserta berbagi cerita secara singkat pengalaman dalam mengatasi kasus-kasus konflik keagamaan. 5. Fasilitator meminta narasumber menanggapi pengalaman tersebut. **Langkah Alternatif** 1. Fasilitator menjelaskan konsep-konsep kunci bina dan resolusi konflik dan kapasitas minimal yang perlu dimiliki. **Catatan.** Fasilitator dapat menayangkan gambar Lengkungan Konflik dan menjelaskan istilah-istilah kunci Bina Damai dan Resolusi Konflik pada Lampiran Materi. 2. Fasilitator membagi peserta ke dalam tiga kelompok. 3. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan pengalaman peserta dalam merespons atau mengatasi kasus-kasus konflik sosial-keagamaan, dengan panduan pertanyaan sebagai berikut: a. Deskripsikan secara singkat kasus yang dipilih dalam diskusi kelompok (kasus, aktor yang terlibat, dan korban). b. Langkah-langkah apa yang ditempuh dalam merespons atau mengatasi kasus tersebut?

		c. Apa hasil dari langkah-langkah tersebut? Jika berhasil, mengapa? Jika gagal, mengapa? 4. Fasilitator meminta perwakilan peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 5. Fasilitator meminta tanggapan dari peserta di luar kelompok. 6. Fasilitator merangkum dan menggarisbawahi hasil diskusi kelompok dan menutup sesi.
3	5 menit	**Penutup** 1. Fasilitator menyampaikan kembali poin-poin penting materi dan diskusi serta menutup sesi.

H. Lampiran Materi

1. Istilah-Istilah Kunci Bina Damai dan Resolusi Konflik
2. Kurva Konflik
3. Kompetensi Respons Dini dan Resolusi Konflik

Lampiran Materi 1

Istilah-Istilah Kunci Bina Damai dan Resolusi Konflik

Bina Damai:

Serangkaian usaha terencana dan komprehensif oleh berbagai pihak, dari individu, masyarakat, dan pemerintah untuk mengatasi ketidakadilan dengan cara-cara non-kekerasan. Bina dapat mencakup pencegahan konflik; manajemen konflik; resolusi konflik dan transformasi, dan rekonsiliasi pasca konflik.[19]

Resolusi Konflik:

Serangkaian usaha menangani dan mengatasi sumber-sumber konflik dengan metodologi tertentu untuk mengidentifikasi dan memilih langkah-langkah menyasar sumber-sumber konflik.

Konflik Sosial:

Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (UU No. 7 Tahun 2012).

Penanganan Konflik:

Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik (UU No. 7 Tahun 2012).

---

[19]USIP, "What is Strategic Peacebuilding?," *www.usip.org*, 2021 <https://kroc.nd.edu/about-us/what-is-peace-studies/what-is-strategic-peacebuilding/> diakses 1 Oktober 2021].

Pencegahan Konflik:

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini (UU No. 7 Tahun 2012).

Penghentian Konflik:

Serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda (UU No. 7 Tahun 2012).

Pemulihan Pascakonflik:

Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi (UU No. 7 Tahun 2012).

Respons Dini Konflik Keagamaan:

Tindakan yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi tercapainya penyelesaian damai atas pertikaian yang terjadi menyangkut isu keagamaan tertentu serta mencegah pertikaian tersebut mengalami eskalasi menjadi konfrontasi fisik atau konflik yang melibatkan penggunaan kekerasan.[20]

[20] Rudy Harisyah Alam, *Panduan Sistem Peringatan dan Respons Dini Konflik Keagamaan* (Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta; 2019)

Lampiran Materi 2

Lengkungan Konflik [21]

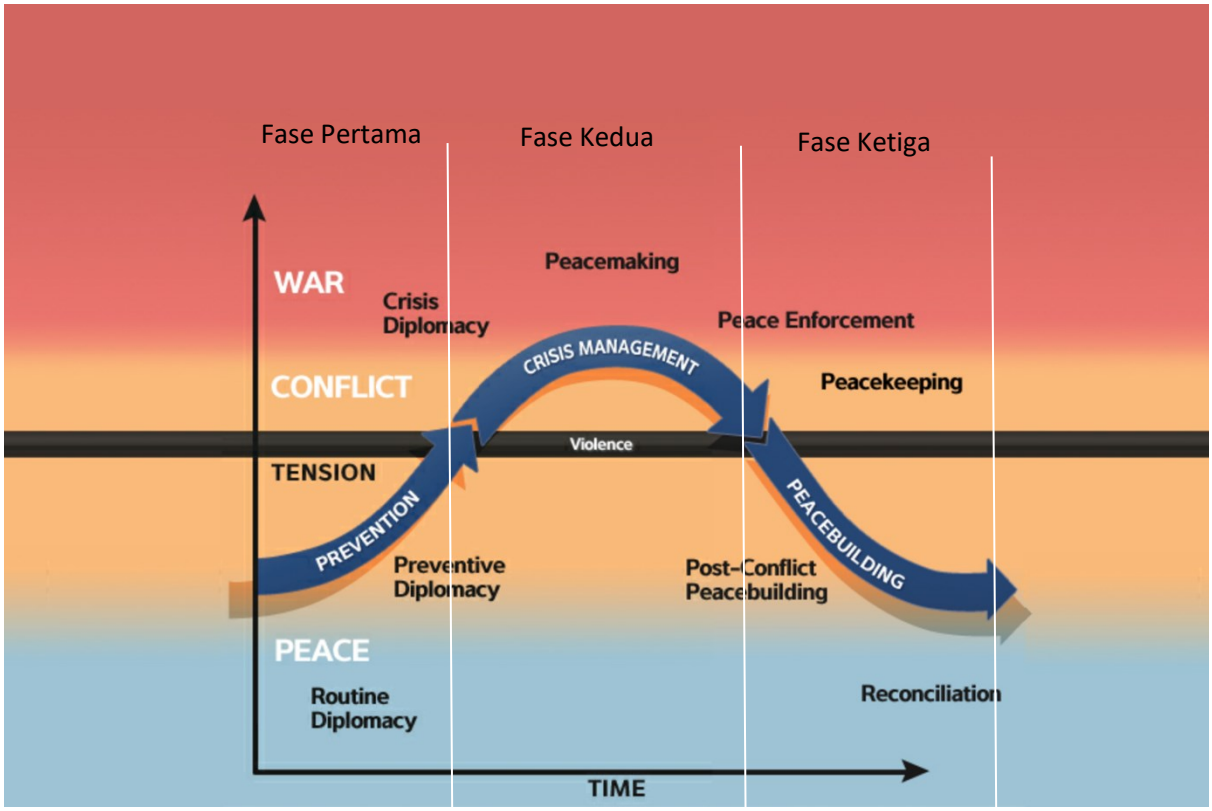

- Konflik keagamaan, termasuk dalam bentuk kekerasan, tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Misalnya, kekerasan terhadap kelompok yang diduga sesat biasanya terjadi setelah terjadi serangkaian ujaran kebencian terhadap mereka dan aparat belum melakukan usaha maksimal untuk merespons ujaran kebencian. Konflik dapat dikenali melalui gejala dan pola-pola tertentu. Pengenalan, dan sebaliknya, pengabaian atas gejala-gejalanya akan mempengaruhi keberhasilan mencegah dan mengatasi konflik.
- Pola konflik dapat dilihat dalam tiga pola seperti terlihat dalam gambar di atas:

[21]Dikembangkan dari USIP, "Curve of Conflict," *www.usip.org*, 2021 <https://www.usip.org/public-education/students/curve-conflict> [diakses 1 Oktober 2021].

- **Fase pertama**, memperlihat situasi eskalasi dari perdamaian yang stabil menjadi permusuhan yang meningkat, ketegangan yang meningkat, dan dapat berakhir dengan pecahnya kekerasan
- **Fase kedua**, menunjukkan situasi konflik kekerasan yang memuncak dan kemudian mulai mereda
- **Fase ketiga**, menampilkan situasi di mana terjadi de-eskalasi atau menurunnya konflik.

- Memahami di mana tahap konflik terjadi dalam siklus konflik sangat penting untuk mengembangkan strategi mana yang efektif untuk mencegah atau mengatasi konflik. Misalnya, deteksi dini efektif dilakukan pada fase pertama ketika ketegangan mulai terjadi. Usaha ini belum tentu efektif ketika konflik telah meledak dalam bentuk kekerasan.

Lampiran Materi 3

Kompetensi Respons Dini dan Resolusi Konflik

Sembilan Kompetensi dalam menjalankan respons dini konflik:[22]

1. Memahami berbagai peraturan yang mengatur soal kehidupan beragama
2. Peka terhadap situasi konflik
3. Bertindak cepat merespons ketika mengetahui/menerima informasi tentang gelagat konflik
4. Menggali permasalahan yang terjadi dari para pihak yang berkonflik
5. Menempatkan diri pada posisi di tengah dan tidak memihak (imparsial) salah satu pihak yang berkonflik
6. Berusaha untuk tidak melakukan yang akan memperburuk situasi konflik
7. Selalu mengecek dan memvalidasi kebenaran informasi yang diterima
8. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
9. Menguasai teknik negosiasi dan mediasi

- Untuk memperkuat kompetensi **menjalankan respons dini dan resolusi konflik**, para aktor tidak hanya memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di tingkat lokal dan nasional, tapi juga berbagai instrumen internasional terkait.

Pada Pelatihan Fasilitator Moderasi Beragama bagi Pimpinan Angkatan V, 10-14 September 2021 di Semarang Jawa Tengah, Komisioner Komnas HAM Muhammad Choirul Anam, mendorong para peserta yang umumnya para Kepala Kantor Kementerian Agama di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Barat, memahami Rabat *Plan of Action* dalam merespons dan menangani kasus-kasus ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia. Anam menyebutkan, dokumen ini digunakan Komnas HAM dalam menangani para pelaku ujaran kebencian dan tindakan perusakan masjid JAI di Sintang Kalimantan Barat.

Rabat *Plan of Action* merupakan dokumen yang dikeluarkan Komisi Tinggi HAM PBB pada 2013. Dokumen ini dihasilkan dari empat workshop ahli di empat wilayah regional pada 2011 dan diadopsi para ahli dalam pertemuan di Rabat Maroko, 5 Oktober 2012. Dokumen Rabat ini menyebut jika kasus-kasus kebencian dan sinisme yang terjadi di

[22] Rudy Harisyah Alam, *Modul Pelatihan Moderasi Beragama Pencegahan Konflik* (Jakarta: Litbang dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, 2020).

masyarakat bahkan telah mengarah pada aksi-aksi kekerasan dan menimbulkan korban nyawa. Dokumen Rabat menjelaskan bagaimana seharusnya memidanakan siar kebencian dengan tanpa melanggar hak dasar lainnya.

Rabat *Plan of Action* mengemukakan enam uji ambang rangsangan untuk melihat sebuah pernyataan dapat dianggap sebagai pelanggaran kriminal atau tidak:[23]

1. **Konteks.**
   Konteks amatlah penting ketika menilai apakah suatu pernyataan tertentu sangat mungkin menghasut diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan terhadap kelompok yang dituju, dan mengandung sikap langsung baik dalam hal maksud dan/atau sebab.
2. **Pengujar**
   Posisi atau status dari pengujar di dalam masyarakat harus dipertimbangkan, khususnya kedudukan individual atau organisasi tersebut dalam konteks pihak penerima kepada siapa ungkapan tersebut ditujukan
3. **Maksud**
   Kelalaian dan keteledoran tidak cukup untuk menjadikan sebuah tindakan sebagai pelanggaran, karena mengharuskan adanya "imbauan" dan "hasutan" ketimbang distribusi atau sirkulasi materi semata.
4. **Isi dan bentuk**
   Analisis isi ujaran kebencian dapat mencakup sejauh mana tingkatan ujaran tersebut disebut provokatif dan langsung; menganalisis bentuk, gaya, dan dasar argumen yang dilontarkan dalam ujaran.
5. **Batasan ujaran**
   Batasan termasuk unsur-unsur seperti jangkauan ujaran tersebut, apakah ujarannya bersifat publik, skala dan ukuran pendengarnya. Unsur-unsur lain untuk dipertimbangkan antara lain bagaimana cara penyebarannya, misalnya apakah dari sebuah selebaran atau disiarkan di media arus utama atau melalui Internet, frekuensi, kuantitas dan cakupan komunikasinya.
6. **Kemungkinan**, termasuk kecenderungan tinggi.

[23] Versi ringkasan dan penyederhanaan. Versi lengkap dapat dibaca dalam OHCHR "Jabaran satu halaman tentang 'hasutan kebencian" https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Articles19-20/ThresholdTestTranslations/Rabat_threshold_test_Indonesian.pdf (diakses 5 Oktober 2021)

Tindakan yang dianjurkan oleh hasutan tidak harus dilakukan untuk dapat menjadi tindak kejahatan. Meskipun demikian, risiko terjadinya kerugian pada tahap tertentu perlu diidentifikasi sejauh mana hasutan tersebut dapat memicu tindakan nyata terhadap kelompok target.

- **Peka terhadap situasi konflik** dapat diasah dengan kemampuan memahami isu-isu yang biasanya menjadi penyebab konflik keagamaan di Indonesia. Isu-isu tersebut antara lain:[24]

* Aspek-aspek non agama yang dapat mempengaruhi kerukunan hidup umat beragama antara lain: kepadatan penduduk, kesenjangan sosial-ekonomi, pelaksanaan pendidikan, penyusupan ideologi dan politik berhaluan keras yang berskala regional maupun internasional yang masuk ke Indonesia melalui kegiatan keagamaan.

[24] Rudy Harisyah Alam, *Modul Pelatihan Moderasi Beragama Pencegahan Konflik* ...

SESI XVII
REFLEKSI, EVALUASI, DAN RENCANA AKSI

A. Pengantar

Sesi terakhir dalam pelatihan ini berisi refleksi dan evaluasi para peserta terhadap keseluruhan proses pelatihan. Peserta diajak merefleksikan perubahan paling dirasakan sebelum dan sesudah pelatihan dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut. Sesi ini mengajak pula peserta mengevaluasi keseluruhan proses pelatihan, baik secara substansi maupun teknis agar bisa dijadikan dasar peningkatan layanan pelatihan penguatan Moderasi Beragama selanjutnya. Hasil refleksi dan evaluasi sangat berguna untuk melihat apakah tujuan pelatihan tercapai atau belum tercapai, sekaligus rencana-rencana setelah pelatihan.

B. Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu:

1. Menilai perubahan penting sebelum dan sesudah pelatihan;
2. Mengevaluasi pelaksanaan pelatihan;
3. Menyusun rencana aksi individu untuk Penguatan Moderasi Beragama.

C. Pokok Bahasan

1. Refleksi Diri
2. Evaluasi Pelatihan
3. Rencana Aksi

D. Metode

- Curah pendapat
- Uji pascapelatihan *(post test)*.

E. Waktu

90 menit (2 jam pelatihan)

F. Peralatan dan Bahan

- LCD
- Laptop
- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting
- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoin
- Jaringan internet

G. Langkah-langkah Fasilitasi

Langkah ke-	Alokasi Waktu	Aktivitas
1	5 menit	**Pengantar:** 1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi, yaitu Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu: a. Menilai perubahan penting sebelum dan sesudah pelatihan; b. Mengevaluasi pelaksanaan pelatihan; c. Menyusun rencana aksi individu untuk Penguatan Moderasi Beragama.
2	40	**Rencana Aksi** 1. Fasilitator mengajak peserta menuliskan untuk menuliskan rencana aksi yang akan dilakukan peserta pada Kanvas Kerja Purwa-Rupa Individu sebagai tindak-lanjut pelatihan. 2. Fasilitator membagikan dokumen Kanvas Kerja Purwa-Rupa Individu dan menjelaskan apa yang harus diisi. 3. Fasilitator meminta peserta memfoto kanvas kerja tersebut sebagai dokumen pribadi. 4. Fasilitator meminta peserta mengumpulkan kanvas kerja. **Langkah fasilitasi Alternatif** 1. Fasilitator meminta setiap peserta menulis pada plano yang disediakan rencana aksi yang akan dilakukan dalam tiga bulan ke depan untuk Penguatan Moderasi Beragama di lingkungan tempat kerja masing-masing. 2. Fasilitator meminta setiap peserta menempel rencana aksi tersebut pada dinding.

		3. Fasilitator meminta setiap peserta berkeliling untuk melihat rencana aksi yang dibuat peserta lain. 4. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau memberi saran dalam betuk tertulis. Pertanyaan dan saran ditulis pada kertas *post-it* dan ditempelkan pada plano berisi rencana aksi yang dipilih.
3	35 menit	**Refleksi** 1. Fasilitator meminta setiap peserta untuk menyampaikan satu-dua kata sebagai refleksi dengan panduan berikut: Selama mengikuti pelatihan ini: a. Saya mendengar ... (satu-dua kata. Contoh: “keresahan”) b. Saya melihat ... (satu-dua kata. Contoh: “semangat perubahan”) c. Maka saya akan melakukan ... satu-dua kata. Contoh: penguatan “Moderasi Beragama”)
4	10 menit	**Penutup** 1. Fasilitator mengingatkan peserta untuk mengisi Lembar elektronik evaluasi dan uji tes pasca (*post-test*) Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama sesat setelah sesi penutupan. Catatan. Panitia membagi link elektronik evaluasi dan uji tes pasca kepada para peserta 2. Fasilitator menutup sesi dengan memberikan semangat dan ucapan terima kasih kepada peserta dan panitia yang terlibat.

H. Lampiran Materi

1. Kanvas Kerja Purwa-Rupa Individu
2. Lembar Evaluasi Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama

LAMPIRAN

KANVAS KERJA PURWA-RUPA INDIVIDU
(INDIVIDUAL PROTOTYPE WORKING CANVAS)

Nama : _____
Utusan : _____

PROBLEM SISTEMATIS ***(SYSTEMIC PROBLEM):*** Apa masalah sistemik di lingkungan Anda yang akan Anda fokuskan terkait moderasi beragama?	**MASALAH-MSALAH** ***(MATTERS)*** Mengapa masalah itu penting bagi Anda? Apa yang mungkin akan terjadi jika Anda tidak melakukan apa-apa?	**TITIK AKUNPUNTUR** ***(ACCUPUNTURE POINT)*** Apa poin akupuntur yang ingin Anda jelajahi dengan prototipe ini?
PERTANYAAN BAGAIMANA KITA BISA **(HMW (HOW MIGHT WE) QUESTIONS)** Apa pertanyaan “Bagaimana Kita Bisa” yang ingin Anda jelajahi dengan prototipe ini?	**PURWA-RUPA** ***(PROTOTYPE)*** Apa prototipe Anda? Bagaimana gambaran singkat eksperimen tersebut?	

TIM PURWA-RUPA **(*PROTOTYPE TEAM*)** Siapa yang bisa Anda ajak menjadi tim? Siapa orang yang berkomitmen di lingkungan Anda untuk mengeksplorasi kemungkinan transformasi ini dan peran serta tanggung jawab apa yang dibutuhkan?	**MITRA** ***(PARTNERS)*** Siapa pemangku kepentingan utama yang Anda perlukan untuk berkolaborasi mewujudkan prototipe ini?	**SUMBER DAYA & DUKUNGAN** ***(RECOURCES & SUPPORT)*** Sumber daya & dukungan apa yang Anda butuhkan untuk mengimplementasikan prototipe Anda?

APA? BAGAIMANA? BAGAIMANA ***(WHAT? HOW? WHEN?)*** Secara kasar, apa yang akan Anda lakukan dalam 1-3 bulan ke depan? Bagaimana rencana implementasinya?	**LANGKAH AWAL-KONKRET** ***(BABY STEPS)*** Apa langkah konkret yang akan Anda lakukan dalam 7 hari ke depan untuk memulai ini?

WAWASAN DAN PEMBELAJARAN KUNCI ***(KEY INSIGHTS & LEARNINGS)*** (Diisi sepanjang proses prototyping). Apa temuan yang mengejutkan Anda dari proses ini? Apa yang menarik? Pembelajaran apa yang Anda petik dari prototipe ini dalam konteks moderasi beragama?	**NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP** ***(VALUES & PRINCIPLES)*** Apa nilai dan prinsip yang akan Anda gunakan dalam memandu prototipe Anda? **Nilai: Prinsip**: 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5.

MODUL TAMBAHAN
BAB XV MEMBANGUN GERAKAN : TIM DAN JARINGAN

A. Pengantar

Membangun jejaring pada dasarnya membangun kepercayaan. Karena sekuat apa pun sebuah jaringan yang terjalin tanpa kepercayaan, ia laksana sarang laba-laba, rapuh tak memiliki kekuatan apa-apa. Dari seluruh orang yang dikenal coba kita perhatikan, berapa yang kita yakin dan percaya pada mereka. Artinya, semakin dekat dan kenal dengan baik, maka semakin yakin dan percayalah kita pada seseorang. Sebaliknya, semakin tidak punya informasi, semakin kesulitan kita mempercayainya.

Sesi ini mengajak peserta untuk mengenali dasar-dasar dan karakter dari jejaring. Jejaring berbeda karakternya dengan lembaga atau organisasi sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda. Selain itu, peserta akan diajak untuk melatih kemampuannya dalam memetakan pemangku kepentingan (*stakehoder)* dengan analisis *stakeholder* dan tahapan-tahapan dalam melakukan analisis *stakeholder* sehingga menghasilkan *stakeholder* dalam berbagai kategori. Dari pemetaan tersebut, peserta akan memahami bagaimana pendekatan yang harus dilakukan terhadap *stakeholder* di masing-masing kategori agar lebih efektif dan efisien dalam membangun jejaring.

B. Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi peserta:

1. Memahami strategi membangun jejaring yang efektif untuk penguatan Moderasi Beragama.
2. Mampu membangun tim dan jaringan yang kuat untuk penguatan Moderasi Beragama.

C. Pokok Bahasan

1. Dasar dan karakteristik jejaring.

2. Analisis *stakeholder*.

D. Metode

- Presentasi
- Diskusi kelompok
- Praktik
- Bermain peran (*role play*)

E. Waktu

135 menit (3 jam pelatihan).

F. Bahan dan Peralatan

- LCD
- Komputer/Laptop
- Kertas plano
- Kertas metaplan
- Gunting
- Selotip
- Spidol besar warna-warni
- Spidol kecil warna-warni
- Bolpoin
- Kertas
- Jaringa internet

G. Langkah-Langkah Fasilitasi

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
1	15 menit	**Pengantar:** 1. Fasilitator/trainer membuka sesi dan melakukan *check in* dengan meminta peserta untuk menuliskan di kertas metaplan terkait mimpi mereka tentang perubahan yang dibayangkan. 2. Fasilitator/trainer meminta peserta menempelkan kertas metaplan di kertas plano yang sudah tersedia. 3. Fasilitator/trainer secara acak meminta beberapa peserta untuk menjelaskan secara singkat apa yang mereka tulis.
2	25 menit	**Batik Puzzle:** 1. Fasilitator/trainer mengajak peserta melakukan aktivitas teka-teki batik. Aktivitas ini dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam jejaring. Teka-teki Batik ini dilakukan dengan langkah:

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
		a. Peserta dibagi ke dalam tiga kelompok. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk menyusun potongan-potongan (*puzzle*) gambar batik yang sudah dibagikan satu per satu menjadi satu kesatuan. b. Setelah menjadi satu kesatuan gambar, kelompok menebak bentuk gambar tersebut. c. Kelompok yang pertama kali menyelesaikan tugas, dialah pemenangnya. 2. Fasilitator/trainer meminta pandangan dari kelompok pemenang dengan pertanyaan: **"apa yang membuat kelompoknya berhasil menyelesaikan tugas dengan cepat?"** Sedang kepada kelompok yang kalah, fasilitator/trainer menanyakan: **"apa yang membuat kelompok Anda tidak berhasil menyelesaikan tugas dengan cepat?"** 3. Fasilitator meminta pandangan dari peserta terkait aktivitas ini dengan pertanyaan sebagai berikut: **a. Apa yang mempersatukan kelompok?** **b. Apa yang mendorong orang untuk berkumpul dan berjejaring?**
3	20 menit	**Paparan Materi dan Tanya-Jawab:** Fasilitator/trainer menyampaikan presentasi terkait dasar-dasar dan karakter jejaring, serta analisis *stakeholder*, disertai tanya-jawab. **Catatan.** Fasilitator/trainer menayangkan presentasi gambar Analisis Stakeholder dan How to Engage Stakeholder pada Lampiran Materi.
4	30 menit	**Diskusi kelompok:** 1. Fasilitator/trainer membagi peserta menjadi empat kelompok untuk mendiskusikan tentang *stakeholder* dengan panduan pertanyaan sebagai berikut: b. Siapa saja *stakeholder*-nya? c. Apa potensi yang dimilikinya? d. Apa yang bisa disumbangkan untuk jejaring? e. Apa yang mungkin menghambatnya? f. Apa kerugiannya ikut jejaring? g. Apa keuntungannya ikut jejaring? 2. Fasilitator/trainer meminta masing-masing kelompok memetakan *stakeholder* menggunakan matrik analisis *stakeholder*.
5	30 menit	**Presentasi**

LANGKAH KE-	ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS
		1. Fasilitator/trainer mempersilakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil analisisnya dan meminta peserta lain untuk menanggapinya.
6	15 menit	**Penutup** Fasilitator mengulas hasil diskusi dan menutup sesi

H. Lampiran Materi

1. Materi Dasar dan Karakteristik Jejaring

Lampiran Materi

MATERI DASAR DAN KARAKTERISTIK JEJARING

A. Jejaring adalah sekumpulan orang yang bekerja bersama secara lebih erat dan sistematis untuk mencapai tujuan bersama.
   1. Pengikat utama : kesamaan isu, nilai, atau minat
   2. Anggota bukanlah bawahan, karena itu harus mampu menjawab pertanyaan “apa manfaatnya jejaring ini untuk saya?”

B. Sangat bersifat *leadership-driven* (bergantung kepada kepemimpinan yang ada), yang menimbulkan tantangan khas yaitu terjebak pada pemimpin sehingga hilang nyawa saat ditinggal inisiator/pemimpin

C. Sifat keterlibatan yang tidak dapat dipaksakan:
   1. Jejaring bukan prioritas utama, komitmen bersifat tidak penuh
   2. Anggota tidak bisa diikat dengan kewajiban, tetapi oleh apa yang ia dapat dari komunitas tersebut: gagasan/keluarga/aktualisasi diri.
   3. Anggota cenderung datang dan pergi tanpa kejelasan komitmen, apabila tidak dibangun sistem keanggotaan yang optimal.
   4. Sangat dinamis, karena kepentingan dan cara pandang anggota jejaring yang berbeda-beda.
   5. Yang dibutuhkan dalam membangun jejaring kerja: tema yang dipilih, tujuan, nilai bersama, program, manajemen, dan *leadership*.

D. Secara umum, jejaring kerja menunjukkan karakteristik sebagai berikut :
   1. Jejaring kerja dibentuk oleh lembaga/kelompok atau anggota masyarakat yang punya minat atau tujuan yang sama terhadap sebuah isu/topik.
   2. Jejaring kerja dibentuk karena kesadaran bahwa topik/isu tidak bisa dikelola sendiri dan ada keberagaman *stakeholders* dengan kekuatan yang berbeda-beda.
   3. Jejaring kerja adalah pengorganisasian yang bersifat cair karena tidak ada keterikatan legal atau profesional

4. Jejaring kerja difungsikan sebagai ruang kolaborasi (kerja sama) antar *stakeholders*. Semakin banyak unsuryang terlibat, semakin kuat pengaruh jejaring tersebut dalam masyarakat.
5. Karena *stakeholders* cukup banyak, maka jejaring kerja bersifat dinamis. Anggota bisa datang dan pergi tanpa ada konsekuensi formal. Tarik-menarik antar kepentingan juga lebih sering terjadi.

ANALISIS STAKEHOLDER

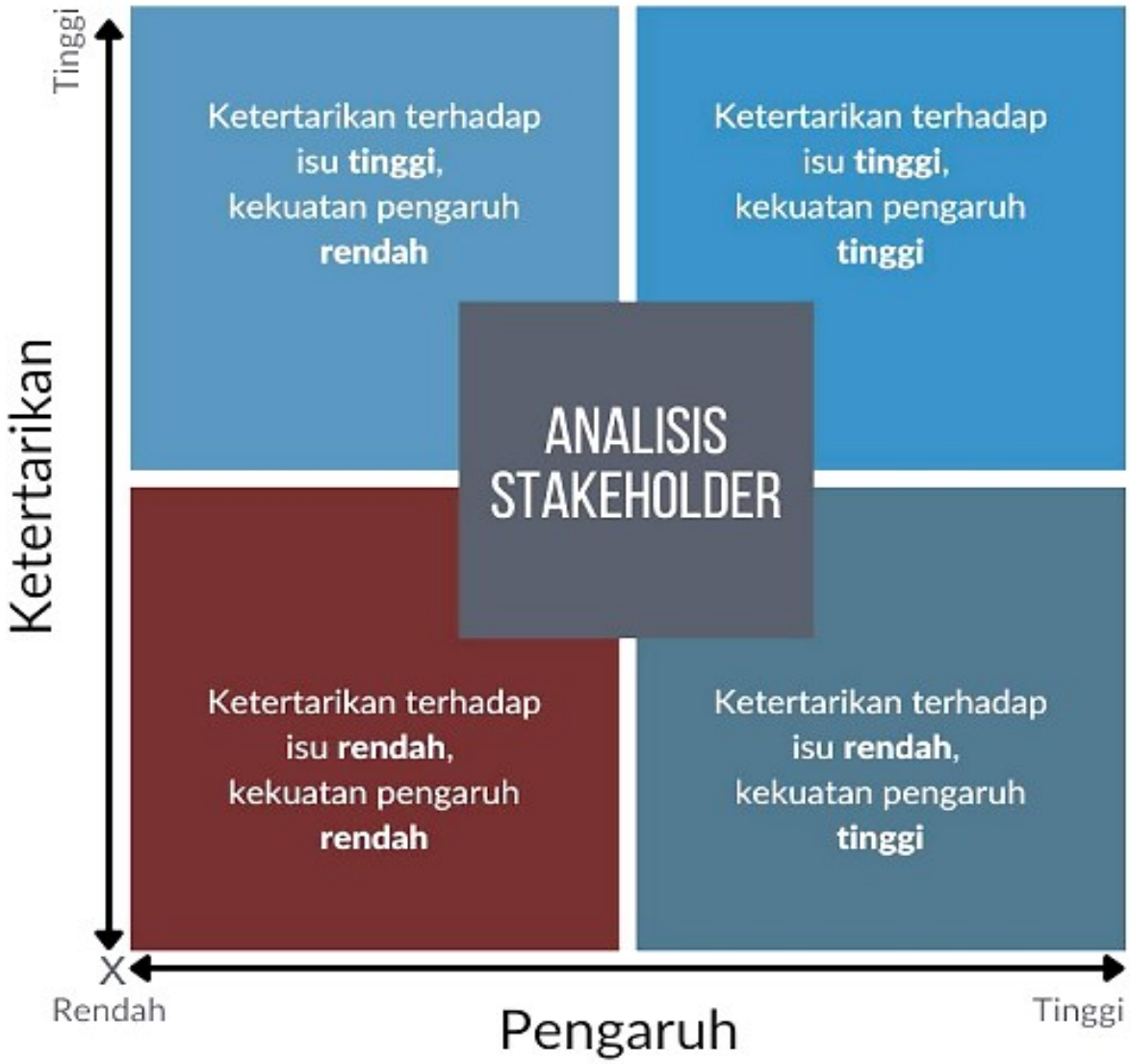

- *Stakeholder* adalah orang, kelompok, atau lembaga yang mempunyai pengaruh dan ketertarikan terhadap apa yang kita lakukan.
- Analisis *stakeholder* adalah instrumen untuk mengidentifikasi dan memetakan orang, kelompok, atau lembaga yang mempunyai pengaruh dan ketertarikan terhadap apa yang kita lakukan dengan menggunakan matrik *stakeholder*. Dengan matrik tersebut, kita bisa mengetahui empat kategori *stakeholder*:
  - ✓ *Stakeholder* I adalah *stakeholder* yang mempunyai ketertarikan tinggi tapi pengaruh yang dipunyai rendah.

- ✓ Stakeholder II adalah *stakeholder* yang mempunyai ketertarikan tinggi juga pengaruh yang dipunyai tinggi.
- ✓ Stakeholder III adalah stakeholder yang mempunyai ketertarikan rendah juga pengaruh yang dipunyai rendah.
- ✓ Stakholder IV adalah stakeholder yang mempunyai ketertarikan rendah tapi pengaruh yang dipunyai tinggi.

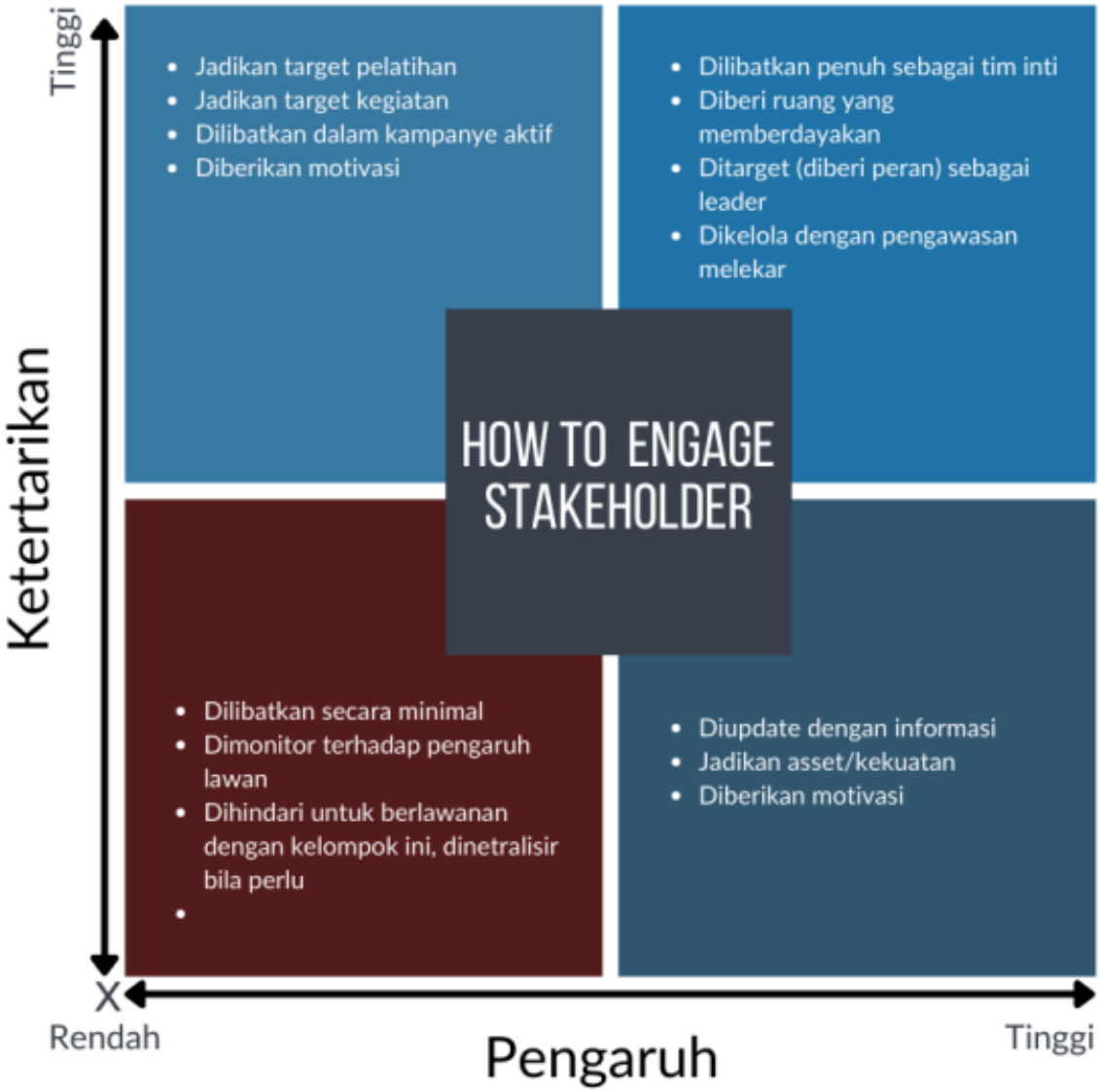

- Tujuan dari analisis stakeholder adalah untuk mengetahui target prioritas dari agenda yang kita lakukan sehingga bisa lebih efektif. Selain itu, untuk menentukan pendekatan pendekatan apa yang harus kita lakukan

di masing-masing kategori stakeholder agar tidak salah pendekatan yang menyebabkan agenda kita tidak berjalan sesuai dengan semestinya.

- Empat kategori *stakeholder* dari hasil matrik memudahkan kita untuk melakukan pendekatan dan menentukan target prioritas dalam membangun hubungan dengan stakeholder tersebut. Pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan di masing-masing kategori stakeholder sangat menentukan keberhasilan sebuah agenda.
  - ✓ *Stakeholder* I, merupakan *stakeholder* yang berpotensi untuk menambah amunisi tim namun membutuhkan upaya meningkatkan kapasitas untuk memperbesar pengaruhnya. Pendekatan yang perlu dilakukan, antara lain:
    - Jadikan mereka sebagai target pelatihan dan kegiatan.
    - Libatkan mereka dalam kampanye secara aktif.
    - Berikan mereka motivasi untuk menjaga ketertarikan tetap tinggi
  - ✓ *Stakeholder* II, merupakan *stakeholder* yang menjadi target utama sehingga perlu diberi ruang pelibatan secara penuh dalam tim. Pendekatan yang perlu dilakukan, antara lain:
    - Libatkan mereka secara penuh sebagai tim inti.
    - Berikan ruang yang memberdayakan kapasitas dan minat mereka.
    - Berikan ruang atau ditarget untuk menjadi *leader*.
    - Kelola secara pengawasan melekat agar mereka tetap menjadi bagian dari tim kita.
  - ✓ Stakeholder III, merupakan *stakeholder* yang tidak menjadi target utama sehingga tidak diperlukan upaya khusus tetapi perlu diperhatikan bahwa jangan sampai kelompok ini menentang atau menjadi lawan kita. Pendekatan yang perlu dilakukan, antara lain:
    - Libatkan mereka secara minimal.
    - Monitor mereka dari pengaruh lawan.
    - Hindari melakukan hal yang berlawanan dengan mereka.

- ✓ *Stakeholder* IV, merupakan *stakeholder* yang perlu kita waspadai karena mempunyai pengaruh yang tinggi. Dibutuhkan upaya khusus agar kelompok ini bisa tertarik dengan kita, minimal tidak menentang atau menjadi lawan kita.
  - Perbaharui mereka terkait informasi tentang apa yang sedang kita lakukan.
  - Jadikan mereka aset kekuatan karena punya pengaruh yang tinggi.
  - Berikan mereka motivasi dan urgensi dari isu yang sedang berkembang agar menambah ketertarikan terhadap apa yang sedang kita lakukan.

REFERENSI

Abdullah, Irwan. “Politik Bhinneka Tunggal Ika dalam keragaman budaya Indonesia,” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 5, No. 2 (2003): 1-13.

Alam, Rudy Harisyah. *Modul Pelatihan Moderasi Beragama Pencegahan Konflik.* Jakarta: Litbang dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, 2020.

Alam, Rudy Harisyah. *Panduan Sistem Peringatan dan Respons Dini Konflik Keagamaan* (Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta; 2019.

Anwar, M. Syafi’i, “Islamku, Islam Anda, Islam Kita Membingkai Potret Pemikiran Politik KH Abdurrahman Wahid,” dalam *Islamku, Islam Anda, Islam Kita,* xix-xxii. Jakarta: Wahid Institute, 2006.

B. Singh, “The challenge of militant Islam and terrorism in Indonesia,” *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 58, No. 1 (2004): 47-68.

Berita Satu, “Survei Wahid Foundation: 86% Aktivis Rohis Ingin Berjihad ke Suriah,” www.beritasatu.com, 2017, https://www.beritasatu.com/megapolitan/414934/survei-wahid-foundation-86-aktivis-rohis-ingin-berjihad-ke-suriah.

BBC, “Survei: hampir 50% pelajar setuju tindakan radikal,” www.bbc.com, 2011, diakses 26 Oktober 2021

Fenton, A. dan D. Price. “ISIS, jihad and Indonesian law: Legal impacts of the January 2016 Jakarta terrorist attacks,” *Issues in Legal Scholarship*, Vol. 14, No. 1 (2016): 1-26.

Galamas F. “Terrorism in Indonesia: an overview,” *Research Papers*, Vol. 4 (2015): 215.

Hakim Saifuddin, Lukman. “Prolog,” *Moderasi Beragama*, 2-3. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.

Infid dan Gusdurian, “Laporan Mapping Internet dan Sosial Media” (Jakarta, 2016).

Intan, B.F. *Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis*. New York: Peter Lang, 2006.

Irawan, I.A., “Pergeseran orientasi terorisme di Indonesia 2000-21018,” kumparan.com 17 Mei 2018, diakses 26 Oktober 2021. https://kumparan.com/erucakra-garuda-nusantara/pergeseran-orientasi-terorisme-di-indonesia-2000-2018 (Diakses 7 Juni 2019).

K. Ramakrishna, dan S.S. Tan, *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia* (Singapore: World Scientific and Institute of Defence and Strategic Studies, 2003);

Kelompok Kerja Moderasi Beragama. *Peta Jalan Moderasi Beragama*. Jakarta: Kemenag, 2021.

Kemenag. “Sekilas Tentang Kementerian Agama” 25 Maret 2021, diakses 26 Oktober 2021 https://kemenag.go.id/artikel/sejarah

Klinken, Gary van. *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*. London; New York: Routledge, 2007.

Kompas, “Toleransi Jadi Tantangan,” 2012, diakses 26 Oktober 2021. https://nasional.kompas.com/read/2012/06/06/03234293/toleransi.jadi.tantangan?page=all.

Madjid, Nurcholish. “Islamic Roots of Modern Pluralism: Indonesian Experience,” *Studia Islamika*, Vol. 1, No. 1 (1994).

Magouirk J., S. Atran, dan M. Sageman, “Connecting terrorist networks,” *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 31, No. 1 (2008): 1-16.

Mas'udi, Farid Masdar. *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Ciputat: Pustaka Alvabet, 2010.

Menchik, Jeremy. *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Oak, G.S. “Jemaah Islamiyah's fifth phase: the many faces of a terrorist group,” *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 33, No. 11 (2010): 989-1018.

OHCHR “Jabaran satu halaman tentang ‘hasutan kebencian,” diakses 5 Oktober 2021. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Articles19-20/ThresholdTestTranslations/Rabat_threshold_test_Indonesian.pdf

PPIM UIN Jakarta dan Convey, *Api dalam Sekam: Keberagamaan Muslim Gen-Z, Survei nasional tentang Keberagamaan di Sekolah dan Universitas di Indonesia*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta and Convey Indonesia, 2018.

Ramage ,D.E. *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the ideology of tolerance*. London; New York: Routledge, 2002.

Rizal Sukma, “Ethnic Conflict in Indonesia: Causes and the Quest for Solution”, dalam Kusuma Snitwongse dan W. Scott Thompson (eds.), *Ethnic Conflict in Souteast Asia* (Singapura: ISEAS, 2005), 1.

Steenbrink, K.A. “The Pancasila ideology and an Indonesian Muslim theology of religions,” *The Muslim World*, Vol. 85, No. 3-4 (1998).

Subhan, M. “Pergeseran orientasi gerakan terorisme Islam di Indonesia (Studi terorisme tahun 2000-2015),” *Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 4 (2016): 59-67.

Sukma Rizal, J. Ma'ruf, dan K. Abdullah, “The attitude of Indonesian Muslims towards terrorism: an important factor in counter-terrorism?,” *Journal of Human Security*, Vol. 7, No. 1 (2001).

Suparlan, Parsudi. “Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman sukubangsa atau kebudayaan?,” *Antropologi Indonesia*, Vol. 72 (2003).

Suratman Y.P. “The effectiveness of de-radicalization program in Southeast Asia: does it work? The case of Indonesia, Malaysia, and Singapore,” *Journal of Asian Studies*, Vol. 5, No. 2 (2017): 135-156.

Sundoko, H.F., R. Akbar, D. Zulkaidi, dan T.A. Argo. “Toward a Defensive Global City: Urban (In) security in an Age of Terror—The Case of Jakarta, Indonesia,” in *Metropolitan Governance in Asia and the Pacific Rim* (Singapore: Springer, 2018), 33-56.

USIP, “What is Strategic Peacebuilding?,” *www.usip.org*, 2021, diakses 1 Oktober 2021. https://kroc.nd.edu/about-us/what-is-peace-studies/what-is-strategic-peacebuilding/ .

W. Hefner, Robert. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2001.

Wahid, Abdurrahman. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Wahid Institute, 2009.

West B. “Collective memory and crisis: the 2002 Bali bombing, national heroic archetypes and the counter-narrative of cosmopolitan nationalism,” *Journal of Sociology*, Vol. 44, No. 4 (2008): 337-353.

Zora, A.S. “Terrorism in Indonesia: A review on rehabilitation and deradicalization,” *Journal of Terrorism Research*, Vol. 6, No. 2 (2015): 36-56.

LAMPIRAN

LAMPIRAN MATERI 1 |
LEMBAR EVALUASI PELATIHAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

Disesuaikan dengan instrumen terbaru

Nama : .....
Email : .....
Tanggal pelatihan : .....
Instans : .....

1. Setelah mengikuti pelatihan ini, apa yang berubah dari pengetahuan (*knowledge*) Anda?
2. Setelah mengikuti pelatihan ini, apa yang berubah dari sikap (*attitude*) Anda?
3. Setelah mengikuti Pelatihan ini, apa yang berubah dari keterampilan (*skills*) Anda?
4. Materi dan kurikulum pelatihan ini dengan kebutuhan tempat Anda bekerja:
   a. Sangat sesuai
   b. Sesuai
   c. Ragu-ragu
   d. Tidak sesuai
   e. Sangat tidak sesuai
5. Materi yang menurut Anda paling menarik adalah ...
6. Materi yang paling kurang penting adalah ...
7. Materi yang paling kurang menarik adalah ...
8. Materi yang perlu ditambahkan adalah ...

LAMPIRAN 2 |
LEMBAR UJI PRA DAN PASCAPELATIHAN (*PRE AND POST-TEST*) PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

Disesuaikan dengan instrumen terbaru

Penguatan Moderasi Beragama ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam Peta Jalan yang disusun Kementerian Agama menetapkan salah satu strategi mencapai tujuan penguatan moderasi beragama adalah dengan memberikan pelatihan kepada ASN Kementerian Agama RI.

Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama ini menjadi bagian dari implementasi program tersebut. Dalam pelatihan ini, setiap peserta akan diminta untuk mengikuti uji pra dan pascapelatihan.

Silakan Anda mengisi formulir di bawah ini dengan sebenar-benarnya. Lembar Uji ini bukan bagian dari penilaian terhadap kompetensi atau kinerja.

Nama : _____
Email : _____
Unit Kerja : _____
Jabatan : _____
Usia : _____ tahun

Moderasi Beragama:

1. Tuliskan Moderasi Beragama yang Anda pahami:
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

2. Tuliskan ekstremisme beragama yang Anda pahami:
_____
_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

3. Sebutkan indikator-indikator Moderasi Beragama yang Anda tahu:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

4. Sebutkan nilai-nilai dalam Moderasi Beragama yang Anda tahu:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

5. Pancasila sebagai dasar negara, menurut saya:
   a. masih dapat diubah bila dikehendaki mayoritas warga negara.
   b. sebetulnya tidak sesuai dengan ajaran agama tetapi saya terima sebagai kesepakatan berbangsa.
   c. karena ada janji sejarah, masih harus memperjuangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta.
   d. tidak dapat diubah sama sekali, kecuali dilakukan referendum.
   e. bagi saya sudah final dan tidak bertentangan dengan ajaran agama saya.

6. Tidak setiap gerakan politik untuk mengubah dasar negara Pancasila dengan ideologi lain adalah tindakan makar:
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju

c. Ragu-ragu
d. Tidak Setuju
e. Sangat Tidak Setuju

7. Pandangan kewarganegaraan Indonesia dalam perspektif agama:
   a. Semua umat beragama setara, namun sebagai mayoritas umat beragama seharusnya memiliki hak khusus
   b. Umat beragama tidak setara. Umat beragama menurut agamanya adalah paling mulia. Oleh karena itu, Perda berbasis agama di Indonesia diperlukan untuk menjamin kepentingan agamanya.
   c. Kewajiban kita di Indonesia adalah menjaga umat agamanya agar tidak dimanipulasi oleh umat agama lain.
   d. Umat beragama memiliki prioritas berdasarkan jumlahnya, mayoritas atau minoritas.
   e. Semua umat beragama setara di hadapan hukum dan pemerintahan Indonesia

8. Ajaran agama yang murni tidak membolehkan umat agama lain untuk menjadi pemimpin publik, mulai dari presiden hingga kepala desa di Indonesia:
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Ragu-ragu
   d. Tidak setuju
   e. Sangat tidak setuju

9. Umat beragama tidak diperkenankan membantu dan menyediakan tempat ibadah agama lain bila tidak memiliki tempat ibadah:
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Ragu-ragu
   d. Tidak setuju
   e. Sangat tidak setuju

10. Dalam pandangan keagamaan saya yang mendalam, HAM dan demokrasi bertentangan dengan ajaran agama:
   a. Sangat Setuju
   b. Setuju
   c. Ragu-ragu
   d. Tidak setuju

e. Sangat tidak setuju

11. Dalam pandangan keagamaan saya yang murni, toleransi dan membantu agama lain tidak diperbolehkan, karena berarti menyetujuinya:
    a. Sangat Setuju
    b. Setuju
    c. Ragu-ragu
    d. Tidak setuju
    e. Sangat tidak setuju

12. Dalam pandangan keagamaan saya, negara berdasar agama seharusnya diterapkan untuk Indonesia karena bangsa Indonesia sejak dulu sangat relijius:
    a. Sangat Setuju
    b. Setuju
    c. Ragu-ragu
    d. Tidak setuju
    e. Sangat tidak setuju

13. Pemerintah Indonesia adalah bukan aparat keagamaan yang otoritatif, karena itu dalam pandangan keagamaan saya tidak wajib ditaati:
    a. Sangat Setuju
    b. Setuju
    c. Ragu-ragu
    d. Tidak setuju
    e. Sangat tidak setuju

14. "Setiap umat beragama wajib memperjuangkan ajaran agamanya untuk menjadi ideologi negara. Jika tidak, maka dia bukan umat beragama yang loyal terhadap agamanya."
    a. adalah doktrin yang harus kita ikuti, tetapi tidak boleh terlalu menampakkannya di Indonesia.
    b. adalah doktrin yang harus kita ikuti, umat beragama tidak boleh memberi ruang kepada umat agama lain di Indonesia.
    c. penting untuk diamalkan oleh setiap umat agama di Indonesia, karena pada dasarnya suatu umat agama akan selalu tidak menyukai umat agama lain.
    d. Doktrin ini benar dan penting untuk Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

e. Ini bukan pandangan yang tepat untuk hubungan antar umat beragama di Indonesia

15. Jika ada peluang demokrasi seperti referendum untuk memilih suatu bentuk negara Indonesia, maka saya tentu akan memilih negara berdasar agama sebagai panggilan keimanan saya:
    a. Sangat Setuju
    b. Setuju
    c. Ragu-ragu
    d. Tidak setuju
    e. Sangat tidak setuju

16. Beragama seharusnya berbasis pada tradisi masyarakat di mana agama pertama lahir, tidak boleh berbasis tradisi yang tumbuh di Indonesia.
    a. Sangat Setuju
    b. Setuju
    c. Ragu-ragu
    d. Tidak setuju
    e. Sangat tidak setuju

17. Sikap menyesatkan amalan keagamaan yang berbeda dan layak disesatkan tidak bertentangan dengan sikap moderasi dalam beragama.
    a. Sangat Setuju
    b. Setuju
    c. Ragu-ragu
    d. Tidak setuju
    e. Sangat tidak setuju

Kemenag dan Penguatan Moderasi Beragama

18. Sebutkan alasan mengapa Pemerintah membuat program Penguatan Moderasi Beragama

    _____
    _____
    _____
    _____
    _____
    _____
    _____

_____
_____

19. Bila terjadi dinamika kehidupan keberagamaan di lingkungan Anda, apa peran yang akan Anda ambil?

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

20. Jika banyak warga negara yang tidak moderat dalam beragama, maka itu bukan tanggungjawab Kementerian Agama.
    a. Sangat Setuju
    b. Setuju
    c. Ragu-ragu
    d. Tidak setuju
    b. Sangat tidak setuju

21. Sebagai ASN, setiap pegawai Kemenag tidak wajib melayani semua agama dan umat beragama. Yang wajib adalah umat agama masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
    a. Sangat Setuju
    b. Setuju
    c. Ragu-ragu
    d. Tidak setuju
    e. Sangat tidak setuju

22. Melindungi dan melayani semua agama dan umat beragama dalam pemerintahan Indonesia adalah bukan bagian dari kewajiban agama saya.
    a. Sangat Setuju
    b. Setuju
    c. Ragu-ragu
    d. Tidak setuju
    e. Sangat tidak setuju

23. Jika ada pertentangan antara “pendapat keagamaan” dari suatu organisasi keagamaan dengan “undang-undang”, maka tentu saya akan mengikuti “pendapat keagamaan” karena bernilai spiritualtas dan transendental.
    a. Sangat Setuju

b. Setuju
c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju

24. Jika ada masyarakat yang berperilaku tidak moderat, tidak toleran, dan melakukan kekerasan, maka sikap saya sebagai ASN adalah:
    a. Melaporkan kepada Kepolisian bila terindikasi pidana, dan ke Densus 88 bila itu terindikasi terorisme.
    b. Menunggu diajak koordinasi oleh pihak berwajib, karena bukan tugas dan fungsi saya.
    c. Jika masih dalam perbedaan hukum agama, saya menghargai sebagai keragaman dalam beragama.
    d. Memaklumi karena pergolakan politik yang tak terhindarkan dalam demokrasi liberal.
    e. Ikut terlibat aktif menyelesaikannya sesuai dengan tugas dan fungsi saya.

25. Sebutkan alasan paling penting mengapa Anda sebagai ASN perlu memastikan moderasi beragama terwujud di ruang lingkup masyarakat Anda:
    a. Karena saya harus mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah ditetapkan.
    b. Karena kondisi masyarakat yang memanggil untuk melakukannya.
    c. Karena ini sudah menjadi kebijakan nasional Pemerintah Indonesia.
    d. Sebagai umat beragama, ini adalah kewajiban saya yang harus saya lakukan.
    e. Sudah menjadi tugas dan kewajiban saya.

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 93 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN MODUL
PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas mutu pelatihan teknis administrasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi perlu menyusun dan mengembangkan modul pelatihan teknis administrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan tentang Tim Penyusun Modul Pelatihan Teknis Administrasi Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi Tahun 2024:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : WTEcFY

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 711);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 846);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TIM PENYUSUN MODUL PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun dan Pengembang Modul Pelatihan Teknis Administrasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2024.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : WTEcFY

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Agustus 2024

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI,

Dr. Syafi'I, M.Ag

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : WTEcFY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI
NOMOR 93 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN MODUL PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI
TAHUN 2024

No	JUDUL	PENYUSUN
1.	Modul Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama	1. Alamsyah 2. Azis Kurnia Wihardani
2.	Modul TOT Penguatan Moderasi Beragama Lintas Kementerian/Lembaga	1. Iklilah Muzayyanah Dini 2. Djubaidah
3.	Konsep Dasar Penyusunan Instrumen Evaluasi	1. Arnis Silvia 2. Farida Ishak
4.	Evaluasi Berbasis Proses dan Hasil	Rudi Ahmad Suryadi
5.	Penyusunan Instrumen dan Laporan Evaluasi	Abdul Jamil Wahab
6.	Konsep Dasar Keragaman Budaya dan Kemajemukan Indonesia	1. Siti Kusriyah 2. Afiati
7.	Karakteristik Keberagaman Budaya Indonesia	Muh. Khamdan
8.	Semangat dan jiwa Nasionalisme melalui Pembangunan Keberagaman Budaya Indonesia	Muhammad Iqbal Fadillah
9.	Konsep dan Kebijakan Manajemen Strategis di Kementerian Agama	Suhardiman
10.	Analisis Isu-isu Strategis	1. Rahmat Aulia 2. M. Nasrul
11.	Laporan Hasil Analisis Isu Strategis	1. Artie Pramita Aptery 2. Neneng Maria Kiptyah
12.	Modul Pelatihan Teknis Kehumasan	1. Dewi Indah Ayu Diantiningrum 2. Endah Prasetyani

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : WTEcFY

No.	JUDUL	PENYUSUN
13.	Pengorganisasian Informasi, Manajemen Layanan dan Promosi Perpustakaan	Hariyah
14.	Manajemen Pelestarian Bahan Perpustakaan	1. Made Ayu Wirayati 2. Nursanti
15.	Manajemen Kelembagaan Perpustakaan serta Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka	1. Sujatna 2. Ahmad

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TENAGA
ADMINISTRASI

Dr. Syafi'i, M.Ag

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : WTEcFY

PUSDIKLAT
TENAGA ADMINISTRASI
2024